



**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Alamat : Jl. Dewi Sartika No.289, Cawang - Jakarta Timur

Telepon : 021 736515 / Fax. 021 7365704

URL : <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>



MONETER

ISSN 2355 - 2700 E-ISSN 2550 - 0139



# MONETER

Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Volume 5 No 2 Oktober 2018



Diterbitkan Oleh :

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
AKADEMI BINA SARANA INFORMATIKA**

**Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor**

Dede Suleman

**Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  
Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor**

Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, Eulin Karlina

**Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada PT  
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2013-2017**

Ratnawaty Marginingsih

**Analisa Kecukupan Penerapan Pengawasan Internal Dengan Metode System  
Development Life Cycle PT. XYZ**

Andi Martias

**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bank Mandiri Tbk dengan PT Bank  
Rakyat Indonesia Tbk**

Fazhar Sumantri, Dwi Apriliani

**Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak  
Final Bendahara Pengeluaran Kementerian**

Dinar Riftiasari

**Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok Proses Pada PT.  
Persada**

Dian Indah Sari

**Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Persero Di Bursa  
Efek Indonesia**

Sri Rusiyanti

**Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Impor Pada Kawasan  
Berikat**

Indria Widyastuti

**Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Pada BPRD DKI Jakarta**

Seno Sudarmono Hadi

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
PENGANTAR REDAKSI .....	iv
Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor Dede Suleman .....	119-124
Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, Eulin Karlina .....	125-130
Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2013-2017 Ratnawaty Marginingsih .....	131-138
Analisa Kecukupan Penerapan Pengawasan Internal Dengan Metode System Development Life Cycle PT. XYZ Andi Martias .....	139-148
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bank Mandiri Tbk dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Fazhar Sumantri, Dwi Apriliani .....	149-156
Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian Dinar Riftiasari .....	157-162
Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok Proses Pada PT. Persada Dian Indah Sari .....	163-170
Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Persero Di Bursa Efek Indonesia Sri Rusiyanti .....	171-176
Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Impor Pada Kawasan Berikat Indria Widyastuti .....	177-184
Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta Seno Sudarmono Hadi .....	185-194

# MONETER

## Editorial Team

### Chief Editor

Eka Dyah Setyaningsih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI Jakarta

### Editor

Agus Junaidi, Sistem Informasi Akuntansi Universitas BSI Jakarta  
Kartika Yuliantari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI Jakarta

### Reviewers

Susan Rachmawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI Jakarta  
Amin Setio L, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI Jakarta  
Dwiyatmoko P, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI Jakarta

### Advisory Boards

Ida Zuniarti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI Jakarta

### Administrative Staff

Maya Sopa, LPPM Universitas BSI

**Published by**  
LPPM Universitas BSI  
Jl. Dewi Sartika No. 289, Cawang,  
Jakarta Timur  
Telp : 021-8010836



<http://www.bsi.ac.id>  
e-mail: [jurnal.moneter@bsi.ac.id](mailto:jurnal.moneter@bsi.ac.id)  
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>  
p-ISSN: 2355-2700 | e-ISSN: 2550-0139  
Indexed by

# PENGANTAR REDAKSI

## Bismillahirrohmanirrohim

Redaksi mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas terbitnya Jurnal Moneter Edisi Volume V No. 2 bulan Oktober 2018 sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Jurnal Moneter yang telah terindex oleh Google Scholar, dalam edisi ini menerbitkan 10 artikel naskah yang berasal dari dosen atau peneliti. Artikel telah melalui proses review oleh reviewer yang mempunyai kompetensi dibidangnya masing-masing.

Redaksi menerima naskah berupa artikel, hasil penelitian atau karya ilmiah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya pada media-media lainnya melalui laman <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>

Akhirnya, Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan peneliti yang telah berpartisipasi dalam penerbitan Jurnal Moneter edisi ini. Semoga Jurnal Moneter kali ini dapat memenuhi khasanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas BSI Jakarta serta masyarakat pada umumnya.

Wassalam,

Redaksi

## **Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor**

**Dede Suleman**

Akademi Manajemen dan Keuangan BSI Jakarta

[Dede.dln@bsi.ac.id](mailto:Dede.dln@bsi.ac.id)

**Cara Sitasi:** Suleman, D. (2018). Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 1–6.

***Abstract** - one of the local taxes is the acquisition of land and building rights (BPHTB) which is a component of revenue in regional revenue. in this case usually the amount of its target acquisition has been calculated every year. but there could be a difference between the number of targets and receipts each year in because many factors here the authors compare the target and acceptance and ontribusinya to the regional income in bogor district 2012-2016. The effectiveness of this tax revenue is an assessment of the performance of the Department of Revenue (Dipenda) kabupateb Bogor. Tax revenue has been called effective if acceptance in accordance with the potential that has been determined BPHTB effectiveness in 2014 amounted to 131.72% and in 2015 of 114.46% decreased from 2014 and in 2016 of 124.60% increased from 2015. and can be concluded in 2014 is the year where the effectiveness of BPHTB is the largest in the number of percentage, but in terms of the largest revenue in 2016. BPTHB contribution to Local Revenue in 2014 amounted to 7.59%, while in 2015 at 6.05% and can be categorized in terms of percentage contribution has decreased but in terms of revenue increased from 2014. And in the year contribution of BPHTB 2016 amounted to 8.45% and can be said the largest since 2014 both in terms of percentage and in terms of revenue, but in 2016 PAD decreased revenue from the year 2015.*

*Key Words:* BPHTB Tax, Revenue, Revenue Target, Actual Revenue

### **PENDAHULUAN**

Kabupaten Bogor merupakan daerah yang sangat potensial daerah yang pada penduduk karena letaknya yang berdekatan dengan pusat ibu kota. Saat ini mengalami pertumbuhan pesat dari sisi pembangunan hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan hunian di kawasan kabupaten Bogor yang merupakan kota satelit dan jaraknya yang mudah dan tidak terlalu jauh dari Jakarta merupakan salah satu alternatif pemilihan daerah hunian. Atas dasar itu maka banyak sekali developer atau pengembang yang mulai membangun kawasan di area kabupaten Bogor atas dasar ini maka jumlah perpindahan dari kepemilikan baik lahan maupun rumah sangat tinggi.

Daerah kabupaten Bogor dianggap sebagai lokasi yang masih bagus dari segi lingkungan dan juga udara karena memang memilih daerah pegunungan dan juga dengan nuansa pedesaan yang masih asri dan dalam hal ini salah satu tujuan dan juga disisi hunian saat ini masyarakat memilih tinggal di pinggiran kota di karenakan di perkotaan harga perumahan yang sudah

sangat tinggi sehingga alternatif mendapatkan rumah yang masih terjangkau mereka memilih kawasan penyangga ibu kota sebagai pilihan. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah yang sedang memperbaiki system transportasi dari dan menuju pusat kegiatan ibu kota sehingga menjadi faktor pendukung pemilihan lokasi yang jauh dari ibu kota bukan lagi masalah besar karena sudah di mudahkan dengan berbagai moda transportasi yang disiapkan. Menurut sensus penduduk 2010 dan perkiraan pertumbuhan penduduk kabupaten Bogor dengan penduduk Kurang lebih 5.715.009 jiwa pada tahun 2016.

Dengan jumlah sebesar ini maka kebutuhan akan perumahan juga tinggi dan juga menjadi salah satu faktor untuk terus meningkatnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB). Hak pemungutan BPHTB merupakan kewenangan dan sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah pusat, namun setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan pajak BPHTB diserahkan dan menjadi

wewenang sepenuhnya masing-masing Kota atau kabupaten dan dihitung Januari 2011. Karena itu maka BPHTB menjadi saat ini mulai menjadi bagian dari penerimaan asli daerah bagi kabupaten/kota yang di kelola oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah tersebut. Maka dengan meningkatnya penerimaan BPHTB maka dengan sendirinya Penerimaan suatu daerah akan meningkat oleh karena itu pemerintah kota/kabupaten saat ini berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor ini untuk meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing.

Melalui penerapan otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali potensi-potensi daerah masing-masing. Hal ini berdampak sangat besar bagi tata kelola pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah setiap pemerintahan daerah baik kota/kabupaten di harapkan bisa mengoptimalkan potensi keuangan daerah dari pendapatan Asli Daerah (PAD), karena ini merupakan suatu pendapatan yang didapat dari daerah itu sendiri. Karena berdampak untuk masing-masing daerah semakin tinggi Pendapatan asli suatu daerah maka tingkat kemandirian suatu daerah akan meningkat.

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional. Pajak dalam pengelolaannya, ada beberapa pajak yang masuk ke pemerintah pusat dan ada yang masuk ke daerah-daerah. Pajak yang pengelolaannya masuk ke dalam pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak yang dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dll) dan Pajak Kabupaten/Kota dari perda No 2 pasal 2 Tahun 2016 kabupaten Bogor (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan, dan Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan).

Dari data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2009, BPHTB dikategorikan sebagai Penerimaan Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain (Kawedar, 2008)

## 1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo dalam (Suleman, 2017))

(Mardiasmo, 2002)) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi-definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

- Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- Untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Sebagai dasar yuridis penerapan pajak adalah Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, diatur dengan undang-undang. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2002)). Teori-teori tersebut antara lain adalah:

- Teori Asuransi: Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- Teori Kepentingan: Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- Teori Daya Pikul: Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

- d. Teori Bakti: Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- e. Teori Asas Daya Beli: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

## 2 Pendapatan Asli Daerah

(Fauzan Muhammad, 2006) PAD (Pendapatan Asli Daerah) ialah suatu jenis sumber pembiayaan pemerintah daerah, yang selalu bertujuan untuk membangun daerah asal. Atau dapat dikatakan kembali lagi dana yang diberikan untuk daerah yang bersangkutan.

(waluyo, 2011)“Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

(Undang - Undang Nomor : 28 tahun 2009) Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pajak daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah.
- b. Retribusi daerah retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
  - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :
- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
  - 2) Jasa giro
  - 3) Pendapatan bunga
  - 4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
  - 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
  - 6) penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  - 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - 8) Pendapatan denda pajak
  - 9) Pendapatan denda retribusi
  - 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan
  - 11) Pendapatan dari pengembalian
  - 12) Fasilitas sosial dan umum
  - 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan

## 3 Pengertian BPHTB

(Mardiasmo, 2006) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang harus dibayar sebagai akibat dari diperolehnya hak atas tanah atau bangunan yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh pribadi atau badan

(Mardiasmo, 2006) Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan

berserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan ketentuan perundang-undangan lainnya

Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No.2 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengertian BPHTB adalah sebagai berikut:

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
- b. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
- c. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak terhutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan agar akta peralihan hak seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, atau risalah lelang, atau surat keputusan pemberian hak atas tanah dapat dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.

Menurut perda kabupaten Bogor No.2 pasal 75 Tahun 2016 Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan saat :

a. -

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris yang diterima orang pribadi, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

## METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian adalah Dinas pendapatan Daerah kabupaten, Metode penelitian ini menggunakan metode perbandingan serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai

penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2014, 2015 dan 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Data Target dan Realisasi BPHTB

Data mengenai rekapan Target dan Realisasi penerimaan BPHTB kabupaten Bogor tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapan Target dan Realisasi BPHTB Tahun 2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	310.000.000.000	408.325.834.844
2015	365.000.000.000	417.793.594.254
2016	405.135.579.000	504.810.307.599

Sumber: Hasil olah data (2018)

Menyusun tabel analisis efektivitas BPHTB yaitu dengan metode perbandingan antara penerimaan dan potensi BPHTB pada tahun 2014-2016, Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas BPHTB adalah :

$$Efektivitas\ BPHTB = \frac{Realisasi\ BPHTB}{Target\ BPHTB} \times 100\%$$

- a. BPHTB Tahun 2014

Target BPHTB sebesar Rp. 310.000.000.000

Realisasi BPHTB sebesar Rp.408.325.834.844

$$Efektivitas\ BPHTB = \frac{408.325.834.844}{310.000.000.000} \times 100\% = 131,72\%$$

Hasil Persentase efektivitas BPHTB pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 131,72%. Persentase tersebut didapatkan dari Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

- b. BPHTB Tahun 2015

Target BPHTB sebesar Rp. 310.000.000.000

Realisasi BPHTB sebesar Rp.408.325.834.844

$$Efektivitas\ BPHTB = \frac{417.793.594.254}{365.000.000.000} \times 100\% = 114,46\%$$

Hasil Persentase efektivitas BPHTB pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 114,46%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%. Angka prosentase efektivitas bisa dikatakan mengalami penurunan dari tahun 2014 namun secara penerimaan lebih besar dari pada tahun 2014



c. BPHTB Tahun 2016

Target BPHTB sebesar Rp. 310.000.000.000  
Realisasi BPHTB sebesar Rp.408.325.834.844

$$\text{Efektivitas BPHTB} = \frac{504.810.307.599}{405.135.579.000} \times 100\% = 124.60\%$$

Hasil Persentase efektivitas BPHTB pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 124.60%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%. Angka prosentase efektivitas dan pendapatan mengalami kenaikan di dibandingkan tahun 2015 sedangkan dari hasil perbandingan maka bisa di katakan pada tahun 2014 efektivitas BPHTB paling tinggi di dapat oleh pemda kabupaten Bogor. Namun secara pencapaian angka yang tertinggi pada tahun 2016.

**2. Peranan Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Data rekapan penerimaan kontribusi BPHTB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dinas pendapatan Kabupaten Bogor tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kontribusi BPHTB Terhadap PAD Tahun 2014-2016

Tahun	Penerimaan BPHTB (Rp)	PAD (Rp)
2014	408.325.834.844	5.378.094.139.799
2015	417.793.594.254	6.032.958.906.738
2016	504.810.307.599	5.973.280.044.956

Sumber : hasil olah data (2018)

Untuk melihat prosentase kontribusi maka perlu dihitung dengan membandingkan antara Penerimaan BPHTB dengan PAD. pada tahun 2014-2016, Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat kontribusi BPHTB adalah :

$$\text{Kontribusi BPHTB} = \frac{\text{Penerimaan BPHTB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

a. Kontribusi BPHTB pada tahun 2014

Penerimaan BPHTB sebesar Rp. 408.325.834.844  
Penerimaan PAD sebesar Rp 5.378.094.139.799

$$\text{Tahun 2014} = \frac{408.325.834.844}{5.378.094.139.799} \times 100\% = 7.59\%$$

Hasil Persentase kontribusi BPHTB pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 7.59%. Persentase tersebut didapatkan dari penerimaan BPHTB dibagi dengan

PAD dikalikan 100%.

b. Kontribusi BPHTB pada tahun 2015

Penerimaan BPHTB Rp. 365.000.000.000  
Penerimaan PAD Rp 6.032.958.906.738

$$\text{Tahun 2014} = \frac{365.000.000.000}{6.032.958.906.738} \times 100\% = 6.05\%$$

Hasil Persentase kontribusi BPHTB pada tahun 2015 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 6.05%. Persentase tersebut didapatkan dari penerimaan BPHTB dibagi dengan PAD dikalikan 100%. Jika di lihat dari nilai kontribusinya BPHTB maka terjadi penurunan dari tahun 2014 . namun dari segi penerimaan mengalami kenaikan dalam jumlahnya.

c. Kontribusi BPHTB pada tahun 2016

Penerimaan BPHTB Rp. 504.810.307.599  
Penerimaan PAD Rp 5.973.280.044.956

$$\text{Tahun 2014} = \frac{504.810.307.599}{5.973.280.044.956} \times 100\% = 8.45\%$$

Hasil Persentase kontribusi BPHTB pada tahun 2015 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor adalah sebesar 8.45%. Persentase tersebut didapatkan dari penerimaan BPHTB dibagi dengan PAD dikalikan 100%. Jika dilihat dari prosentase kontribusinya maka BPHTB tahun 2016 berkontribusi sangat besar dari disbanding tahun 2014 dan 2015 . namun hal ini bisa dikarenakan terjadi penurunan penerimaan PAD pada tahun 2016 dari tahun 2015.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuatlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas BPHTB pada tahun 2014 sebesar 131.72% dan pada tahun 2015 sebesar 114.46% mengalami penurunan dari tahun 2014 dan pada tahun 2016 sebesar 124.60% mengalami kenaikan dari tahun 2015 . dan bisa disimpulkan pada tahun 2014 merupakan tahun dimana efektivitas BPHTB paling besar dalam jumlah prosentase .namun dari segi penerimaan terbesar pada tahun 2016.
2. Kontribusi BPTHB terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar 7,59%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 6.05% dan dapat dikataka dari segi kontribusi prosentase mengalami penurunan namun dari segi pendapatan meningkat dari tahun 2014. Dan pada tahun kontribusi BPHTB 2016 sebesar 8.45% dan bisa dikatakan terbesar sejak tahun 2014 baik dari segi prosentase maupun dari segi penerimaan , namun pada tahun 2016 PAD

mengalami penurunan penerimaan dari tahun 2015.

3. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya ada BPHTB saja tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan.

## REFERENSI

- Bogor, P. K. (2016). Perda No. 2 .
- Fauzan Muhammad. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kawedar, W. A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (PAD) Dispenda Kabupaten Bogor. *Moneter*, 57-62.

Undang - Undang Nomor : 28 tahun 2009, p. 1.-1. (n.d.).

waluyo, P. A. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

## PROFIL PENULIS

Dede Suleman adalah mahasiswa Program Doktor di Universitas Mercubuana, Jakarta. Gelar Sarjana dari Universitas Azzahra, jurusan Ekonomi, dan Magister dari Universitas BSI Bandung. Dede suleman saat ini sebagai pemilik dan sebagai pengelola di industri Restoran dengan sistem siap saji dengan merek My Bento yang telah dikembangkan selama 9 tahun, dan juga berkarier sebagai dosen tetap di prodi AMK ,kampus Bina Sarana Informatika Jakarta, selama 6 tahun. Minat penelitiannya termasuk pengembangan dunia waralaba, operasi waralaba dan manajemen waralaba, pemasaran dan perilaku konsumen serta perpajakan, keuangan, e-businesa dan E-marketing. Berikan penjelasan singkat mengenai profil penulis

## **Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor**

**Dedi Suharyadi<sup>1)</sup> Rini Martiwi<sup>2)</sup> Eulin Karlina<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Komputerisasi Akuntansi  
AMIK BSI Bekasi  
[dedi.dsi@bsi.ac.id](mailto:dedi.dsi@bsi.ac.id)

<sup>2)</sup> Program Studi Manajemen Administrasi  
ASM BSI Jakarta  
[rini.ntw@bsi.ac.id](mailto:rini.ntw@bsi.ac.id)

<sup>3)</sup> Program Studi Komputerisasi Akuntansi  
AMIK BSI Jakarta  
[eulin.eka@bsi.ac.id](mailto:eulin.eka@bsi.ac.id)

---

**Cara Sitasi:** Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–14.

---

**Abstract** - *The implementation of regional autonomy makes each region has its own authority to regulate and manage all local government affairs as regulated by the Law. Thus, the region is also authorized to make local policies to create and improve people's welfare. The local revenue should also be able to support the needs of the region and even expected each year local revenue will always increase. The purpose of this study is to determine whether there is the influence of Regional Retributions and Regional Wealth Outcomes Separated to the Original Income either partially or simultaneously. The analytical method used is statistical analysis method using multiple linear regression. The result of this research shows that partial test shows that Levy does not have a significant effect to the original income of Bogor Regency. This is shown by t test where the significance value is greater than 0.05. As well as Local Levies, the Results of Management of Regional Wealth Is Separated also has no effect on the original income of Bogor regency. While testing simultaneously or collectively there is no effect of Local Retribution and Results Management of Regional Wealth Separated to Local Original Income. Based on the F test using the significance level of 5% or 0.05 can be seen that the value of significance 0.080 greater than 0.05 then it can be said there is no influence together between independent variables to the dependent variable*

**Keywords:** *Regional Retribution, Regional Wealth Outcomes Separated to the Original Income, Local Revenue*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dengan berbagai suku dan budaya. Letak wilayah menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di masing-masing daerah mengalami perbedaan. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek dalam upaya peningkatan terhadap penerimaan daerah. Diberlakukannya otonomi daerah membuat setiap daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengelola semua urusan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang. Dengan demikian maka daerah juga berkewenangan membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah bahkan diharapkan tiap tahunnya pendapatan asli daerah akan selalu meningkat. Seperti halnya Kabupaten Bogor diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya

sebagai wujud dari asas desentralisasi. Diantaranya retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, “bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

penerimaan daerah menuntut pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mengelola sumber pajak daerah tersebut dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari propinsi Jawa Barat terus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Berdasarkan data yang bersumber pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor, PAD memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah setelah setelah Dana Perimbangan. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2016**

Tahun	PAD	%	Dana Perimbangan	%	Lain-lain Pendapatan Daerah	%	Pendapatan Daerah
2011	685.121.399.928	20	1.781.177.918.858	52	985.455.796.519	28	3.451.755.115.305
2012	1.068.548.454.296	27	2.048.587.761.028	51	857.269.137.888	22	3.974.405.353.212
2013	1.261.034.564.121	28	2.310.876.711.691	50	1.000.421.091.002	22	4.572.332.366.814
2014	1.712.937.376.136	32	2.498.370.936.940	46	1.166.785.826.723	22	5.378.094.139.799
2015	2.002.320.991.117	33	2.583.489.732.475	43	1.447.148.183.146	24	6.032.958.906.738
2016	2.292.175.034.011	38	2.692.167.023.139	45	988.937.987.806	17	5.973.280.044.956

Sumber: Dispenda Bogor (Data Diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor mengalami trend peningkatan dari tahun 2011 sampai 2016. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terus meningkat dari yang 20% di tahun 2011 menjadi 38% di tahun 2016. Ini menjadi pencapaian yang baik untuk kabupaten yang berpusat di Cibinong.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dilihat dari APBD jenis pendapatan disetiap daerah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pendapatan

bersumber dari PAD, Bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Adapun PAD dapat bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah (Waluyo, 2013). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Retribusi Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dimana retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bogor?
- Apakah terdapat pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bogor?
- Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bogor?

### 1. Retribusi Daerah

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam (Waluyo, 2013) menyebutkan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Selain dari pajak, Retribusi juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi setiap daerah. Menurut UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Beberapa ciri yang melekat pada Retribusi adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005) :

- Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Angka (3) yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan (Halim, 2008).

Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan, yaitu :

- a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
- b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
- c. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
- d. Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi

## 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), setiap daerah tidak diperkenankan untuk:

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002) . Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2008).

Indikator keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besar kecilnya PAD dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah (Siahaan, 2005).

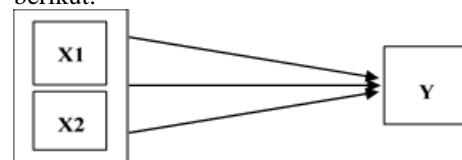
Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya.

## METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor tahun 2011 sampai dengan 2016.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2009:116). Jumlah sampel ini diambil dengan metode purposive sampling, artinya sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif penelitian yang memenuhi syarat yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel, yakni retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selalu ada selama tahun penelitian.

Variabel penelitian meliputi dua variabel bebas yaitu Retribusi Daerah (X1) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2), serta variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (Y). Hubungan antara variabel penelitian tersebut dapat digambarkan dalam konstelasi masalah sebagai berikut:



Sumber: Konsep Diolah (2018)

**Gambar 1.**

### Model Hubungan antar Variabel Penelitian

Keterangan:

X1 : Retribusi Daerah

X2 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Y : Pendapatan Asli Daerah

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Menurut (Sugiyono, 2009) model regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Retribusi Daerah

X2 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

a = konstanta

b1, b2= koefisien regresi

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi, dalam output SPSS terletak pada tabel Model Summary dan tertulis R square berkisar nol sampai satu.

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya suatu hubungan, maka dapat digunakan pedoman sebagai berikut (Sugiyono, 2009)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian secara parsial menunjukkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berikut hasil pengujian dengan menggunakan alat bantu olah data IBM SPSS Statistics 21:

### 1. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Beta (Asteria, 2015) serta Putri dan Rahayu (2015), yang membuktikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2. Coefficients<sup>a</sup>

	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Std. Error	Sig.
(Constant)	3,730		14,541	,256
X1	,776	,856	,413	,907

a. Dependent Variable: Y

Sumber: (Sugiyono, 2009)  
Berdasarkan hasil output SPSS untuk perhitungan regresi linear lihat pada hasil output coefficients di

kolom B yang menunjukkan constant = 3,730 dan X = 0,776, maka persamaan garis regresinya adalah  $\hat{Y} = 3,730 + 0,776X_1$  digambarkan bahwa Konstanta (a) = 3,730 menunjukkan nilai konstan, dimana jika variabel Retribusi Daerah (X1) sama dengan nol (0) maka Pendapatan Asli Daerah ( $\hat{Y}$ ) = 3,730. Koefisien regresi Retribusi Daerah (X1) sebesar 0,776 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,766.

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Hasil uji dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa probabilitas nilai t atau signifikansi sebesar 0,416 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dilihat dari kontribusinya, Retribusi Daerah merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketiga setelah Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah untuk Kabupaten Bogor. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat penting untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi dipungut atas dasar balas jasa yang disediakan pemerintah.

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,413 <sup>a</sup>	,170	,037	6,83486

a. Predictors: (Constant), X1

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas nilai R Square atau R<sup>2</sup> sama dengan 0,170 atau 17% artinya perubahan Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan melalui Retribusi Daerah dan sisanya 83% dijelaskan variabel bebas lainnya. Dari hasil korelasinya (R) sebesar 0,413 atau 41,3 % dapat dikatakan bahwa Retribusi Daerah memiliki hubungan yang sedang dengan Pendapatan Asli Daerah.

### 2. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor. Belum ada penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 4. Koefisien Variabel**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	8,090	4,828	1,676	,169
	X2	,515	,259	,705	,118

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan hasil output SPSS persamaan garis regresinya adalah  $\hat{Y} = 8,090 + 0,515X_2$  digambarkan bahwa Konstanta (a) = 8,090 menunjukkan nilai konstan, dimana jika variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) sama dengan nol (0) maka Pendapatan Asli Daerah ( $\hat{Y}$ ) = 8,090. Koefisien regresi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) sebesar 0,515 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,515.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa probabilitas nilai t atau signifikansi sebesar 0,118 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilihat dari kontribusinya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penyumbang terkecil bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Bogor.

**Tabel 5. Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,705 <sup>a</sup>	,497	,372	5,32035

a. Predictors: (Constant), X2

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas nilai R Square atau R2 sama dengan 0,497 atau 49,7% artinya perubahan Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan sisanya 50,3% dijelaskan variabel bebas lainnya. Dari hasil korelasinya (R) sebesar 0,705 atau 70,5 % dapat dikatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memiliki hubungan yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah.

### 3. Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Variabel independen yaitu Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dimasukkan dalam model tidak mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 6. ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	183,285	2	91,643	6,551	,080 <sup>b</sup>
Residual	41,966	3	13,989		
Total	225,252	5			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel Anova atau uji F diatas dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dapat dilihat bahwa Ftabel dengan taraf signifikansi 5% dan df pembilang = 2, serta df penyebut 6, maka Ftabel= 9,552. Dengan demikian Fhitung (6,551) lebih kecil dari Ftabel (9,552). Dilihat dari nilai signifikansi 0,080 lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen yaitu Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 7. Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,902 <sup>a</sup>	,814	,689	3,74016

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas nilai Adjusted R Square atau R2 sama dengan 0,689 atau 68,9% artinya perubahan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan melalui kedua variabel independen yaitu Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, sedangkan sisanya 0,311 atau 31,1% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Untuk analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	11,258	9,220	
1	X1	1,079	,478
	X2	,597	,185

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah (2018)

Dari tabel koefisien dapat dibuat persamaan regresi linier berganda  $\hat{Y} = 11,258 + 1,079X_1 + 0,597X_2$  digambarkan bahwa Konstanta (a) = 11,258 menunjukkan nilai konstan, dimana jika variabel Retribusi Daerah (X1) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) = 0 maka Pendapatan Asli Daerah ( $\hat{Y}$ ) = 11,258. Koefisien regresi Retribusi Daerah (X1) sebesar 1,079 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 1,079. Nilai koefisien positif menjelaskan terdapat hubungan positif antara Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Koefisien regresi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) sebesar 0,597 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,597. Nilai koefisien positif menjelaskan terdapat hubungan positif antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.
3. Secara simultan atau secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan dalam penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dengan terus menggali potensi daerah baik itu menambah maupun mengembangkan jenis-jenis Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang sesuai dengan kepentingan daerah.

## REFERENSI

- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1), 51 – 61.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Undip.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Distribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–13.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

## PROFIL PENULIS

Dedi Suharyadi, SE, MM. Lahir di Curup dan menyelesaikan study S2 di tahun 2012 dengan program studi Magister Manajemen pada Universitas BSI Bandung. Mulai bergabung di Bina Sarana Informatika dari tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Rini Martiwi, SS, MM. Lahir di Jakarta dan saat ini aktif mengajar sebagai dosen di Akademi Sekretari dan Manajemen (ASM) BSI Jakarta dan Akademi Bahasa Asing (ABA) BSI Jakarta. Selain mengajar juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) sejak tahun 2017.

Eulin Karlina, S.Pd, MM, menyelesaikan S2 tahun 2012 dengan program studi Magister Manajemen pada Universitas BSI Bandung. Bekerja di Bina Sarana Informatika dari tahun 2010 sampai sekarang.



## **Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2013-2017**

**Ratnawaty Marginingsih**

Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta  
e-mail: ratnawaty.rmg@bsi.ac.id

---

**Cara Sitasi:** Marginingsih, R. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2013-2017. *Moneter*, 15-22.

---

***Abstract** - Bank performance assessment based on the level of his health. Seen from the importance of health of a bank for the formation of a trust customers on a banking institutions, a few kind of rules that has been created by Bank Indonesia to assess the health level which commercial banks. An assessment of the health level which used the bank risk to solve social welfare RGEC based. That have been analyzed rating factor is a factor Risk Profile, GCG, Earning and Capital. Variables that were used to lower its NPL and LDR which is to gauge Risk Factors profile, tighter self assessment to GCG, ROA and NIM to increase for measuring Earning factors and CAR for measuring factors Capital. This research uses the method descriptive quantitative using data secondary and analysis the performance of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, a period of the year 2013-2017. The results of the study suggests that PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk overall having results a good for the predicate bank healthy. Assessment risk factors profile having the rank of composite 2 and 3 the predicate good and quite good. Assessment GCG having the rank of composite 2 with the predicate good. Assessment factors Earning having the rank of composite 1 at the predicate excellent. Assessment factors Capital having the rank of composite 1 at the predicate excellent.*

**Keywords:** *Performance Bank, The Health Level Bank, RGEC Method*

### **PENDAHULUAN**

Sektor perbankan memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan bank yang berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Menurut (Kasmir, 2014) secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta memberi jasa-jasa bank lainnya.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat didalam penghimpunan dana dan penyalurannya kembali serta sebagai salah satu pilar penentu kemajuan perekonomian Indonesia perlu diperhatikan kondisi tingkat kesehatan bank itu sendiri. Kesehatan suatu bank merupakan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu dapat memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. (Budisantoso, 2014)

Menurut data Biro Riset Infobank secara kinerja industri perbankan pada tahun 2016 sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Meski pertumbuhan kredit menurun dari 10,40% menjadi

hanya 7,85% komponen keuangan utama lainnya tumbuh membaik. Dalam permodalan juga mengalami peningkatan yang cukup baik menjadi 22,72% dari 21,16% pada tahun sebelumnya. Pada pengujung tahun 2016 industri perbankan mampu membalikan keadaan dari laba/rugi yang tumbuh minus 6,76% menjadi tumbuh positif 1,83%.

Penilaian kinerja perbankan didasarkan pada tingkat kesehatannya. Dilihat dari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan nasabah pada sebuah lembaga perbankan, ada beberapa peraturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank umum. Salah satu peraturan terbaru yang dibuat oleh Bank Indonesia adalah peraturan tentang tingkat kesehatan bank yang diatur sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang berisi tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tingkat kesehatan bank umum dimaksudkan agar bank mampu untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan dapat memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Berdasarkan PBI No. 13 tahun 2011 Pasal 6, faktor penilaian kesehatan bank yang wajib dipenuhi oleh bank meliputi *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital* yang biasanya disebut sebagai metode RGEC.

Bank Negara Indonesia sebagai bank BUMN pertama yang didirikan dan dimiliki pemerintah diharapkan

mampu menjaga dan mengawasi kredit yang diberikan kepada masyarakat agar dapat meminimalisir terjadinya risiko kredit dan risiko likuiditas. Untuk jaringan domestik, BNI memiliki 1.714 outlet yang tersebar di 34 provinsi dan 384 kabupaten. Sedangkan untuk jaringan internasional saat ini BNI memiliki lima kantor cabang di luar negeri; yaitu di London, New York, Tokyo, Singapura, Hongkong; satu sub branch di Osaka; Limited Purpose Branch di Singapura; dan Remittance Representative yang tersebar di Malaysia, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. BNI juga memiliki 11.209 ATM yang tersebar di 34 provinsi dan 420 kabupaten/ kota termasuk 6 (enam) ATM di luar negeri, yaitu 4 (empat) ATM di Hong Kong dan 2 (dua) ATM di Singapura. Sebagai salah satu bank umum terbesar di Indonesia kinerja PT Bank BNI (Persero) Tbk dituntut untuk selalu terjaga kesehatan dan kinerjanya dengan selalu menjalankan fungsi utama sebuah bank dengan baik dan benar sebagai salah satu tolak ukur penilaian masyarakat akan kinerja bank umum yang ada di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Fokus penelitian ini adalah penilaian terhadap faktor RGEC pada PT Bank BNI (Persero) Tbk dan menentukan tingkat kesehatannya dengan melakukan analisis kinerja PT Bank BNI (Persero) Tbk periode tahun 2013-2017. Analisis data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada surat edaran No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

### Bank

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank diartikan sebagai: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut (Dendawijaya, 2009) Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bank adalah suatu badan hukum yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya sebagai pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

### Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan suatu perusahaan mengenai posisi keuangan sebagai gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk berbagai pihak, seperti investor, kreditur, pemerintah, bankers, pihak manajemen sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pengguna. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Sedangkan menurut (Munawir, 2010) Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan dari transaksi keuangan yang berkaitan tentang posisi keuangan atau keadaan keuangan perusahaan pada periode tertentu yang dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan berguna untuk mengambil keputusan.

### Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011, tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan

### Metode RGEC

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13 tahun 2011 Pasal 6 bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*). Peraturan yang secara spesifik membahas tentang kesehatan perbankan dengan menggunakan metode RGEC adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 13/24/DPNP tanggal 25

Oktober 2011. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa indikator yang diperlukan dalam mengukur tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC dan penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank, antara lain adalah :

1. *Risk Profil* (Profil Risiko)

Profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu, risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan dan reputasi. Dalam penelitian ini mengukur risiko kredit diproksikan dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk mengukur risiko likuiditas. Semakin kecil poin yang diterima maka kesehatan bank dari sisi risiko tersebut semakin baik.

a. Risiko Kredit

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 1. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit NPL

Peringkat	Rasio	Predikat
1	0% < NPL < 2%	Sangat Baik
2	2% ≤ NPL < 5%	Baik
3	5% ≤ NPL < 8%	Cukup Baik
4	8% ≤ NPL < 11%	Kurang Baik
5	NPL > 11%	Tidak Baik

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

b. Risiko Likuiditas

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 2. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit LDR

Peringkat	Rasio	Predikat
1	50% < LDR < 75%	Sangat Baik
2	75% ≤ LDR < 85%	Baik
3	85% ≤ LDR < 100%	Cukup Baik
4	100 ≤ LDR < 120%	Kurang Baik
5	LDR > 120%	Tidak Baik

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Sesuai dengan SE BI No.15/15/DPNP/2013 tentang pelaksanaan GCG, penilaian faktor GCG dilakukan dengan sistem *self assessment* (penilaian sendiri). Faktor penilaiannya meliputi:

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- d. Penanganan Benturan Kepentingan
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- h. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposures*)
- j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal
- k. Rencana Strategis Bank

Dalam penelitian ini menggunakan data GCG dengan cara melihat hasil *self assessment* yang telah dipublikasikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 3. Predikat Komposit GCG

Nomor	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1	< 1,5	Sangat Baik
2	< 2,5	Baik
3	< 3,5	Cukup Baik
4	< 4,5	Kurang Baik
5	< 5	Tidak Baik

Sumber: SE BI No.15/15/DPNP/2013

3. *Earning* (Rentabilitas)

Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio Rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Pada rasio ini menunjukkan perolehan laba bersih jika diukur dari modal pemilik, karena semakin besar rasio ini maka akan semakin baik. Dalam penelitian ini penilaian faktor rentabilitas diproksikan dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM).

a. *Return On Assets* (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Asset}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 4. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit ROA

Peringkat	Rasio	Predikat
1	2% < ROA	Sangat Baik
2	1,25% < ROA ≤ 2%	Baik
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Baik
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Baik
5	ROA ≤ 0% (Negatif)	Tidak Baik

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

b. *Net Interest Margin* (NIM).

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 5. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit NIM

Peringkat	Rasio	Predikat
1	3% < NIM	Sangat Baik
2	2% < NIM ≤ 3%	Baik
3	1,5% < NIM ≤ 2%	Cukup Baik
4	1% < NIM ≤ 1,5%	Kurang Baik
5	NIM < 1% (Negatif)	Tidak Baik

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

4. *Capital* (Permodalan)

Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengatasi risiko saat ini dan mengantisipasi risiko dimasa mendatang. Menurut (Rivai, 2013), modal adalah faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat, maka permodalannya perlu disesuaikan dengan ukuran internasional yang dikenal dengan standar BIS (*Bank for International Settlement*). Penilaian faktor permodalan (*Capital*) diprosikan dengan menggunakan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

Tabel 6. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit CAR

Peringkat	Rasio	Predikat
1	12% < CAR	Sangat Baik
2	9% < CAR ≤ 12%	Baik

3	8% < CAR ≤ 9%	Cukup Baik
4	6% < CAR ≤ 8%	Kurang Baik
5	CAR < 6%	Tidak Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis *Risk Profil* (Profil Risiko)

a. Risiko Kredit

Tabel 7. Hasil dan Predikat Rasio NPL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2013-2017

Tahun	Nilai Rasio	Peringkat	Nilai Predikat
2013	2,2%	2	Baik
2014	2,0%	2	Baik
2015	2,7%	2	Baik
2016	3,0%	2	Baik
2017	2,3%	2	Baik

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil penilaian NPL pada tabel 7, pada tahun 2013 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat baik karena memiliki rasio diatas 2% yaitu 2,2%. Pada tahun 2014 terjadi penurunan rasio sebesar 2,0% namun tetap mendapatkan predikat baik karena nilai rasio berada di nilai 2,0%. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengalami peningkatan nilai rasio dan tetap mendapatkan predikat baik karena memiliki rasio diatas 2% yaitu 2,7% dan 3,0%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan nilai rasio sebesar 2,3% namun tetap mendapatkan predikat baik karena nilai rasio diatas 2%. Hal tersebut didapatkan dari Kriteria Penetapan Penilaian NPL pada Surat Edaran Bank Indonesia. Faktor lainnya yaitu karena manajemen bank mampu menjaga dan berhati-hati dalam penyaluran kreditnya untuk mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah.

b. Risiko Likuiditas

Tabel 8. Hasil dan Predikat Rasio LDR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2013-2017

Tahun	Nilai Rasio	Peringkat	Nilai Predikat
2013	85,3%	3	Cukup Baik
2014	87,8%	3	Cukup Baik
2015	87,8%	3	Cukup Baik
2016	90,4%	3	Cukup Baik
2017	85,6%	3	Cukup Baik

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil penilaian LDR pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat risiko likuiditas dari PT Sumber: SE BI 13/24/DPNP/2011

(LDR) pada tahun 2013-2017 mendapatkan predikat cukup baik. atau cukup sehat. Predikat tersebut didapatkan berdasarkan penyesuaian dengan tabel Kriteria Penetapan Peringkat LDR yang didasari oleh Surat Edaran Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa rasio LDR  $85\% \leq LDR < 100\%$  berada di peringkat 3 yang memiliki predikat cukup baik atau cukup sehat.

Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Semakin tinggi rasio ini menggambarkan kurang baiknya likuiditas bank. Tujuan penting dari perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.

Upaya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk menjaga kualitas aset terus dilakukan antara lain dengan langkah hati-hati, dan selektif dalam penyaluran kredit agar tetap stabil dan sehat. Ekspansi kredit yang terus dilakukan menunjukkan fungsi intermediasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tetap berjalan dengan baik.

### 3.2. Analisis Good Corporate Governance (GCG)

Hasil *self assessment* Good Corporate Governance (GCG) yang telah dipublikasikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Publikasi Hasil *Self Assessment* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Predikat Komposit atas pelaksanaan GCG Periode 2013-2017

Tahun	Nilai Komposit	Predikat Komposit
2013	2	Baik
2014	2	Baik
2015	2	Baik
2016	2	Baik
2017	2	Baik

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2013-2017

Hasil analisis pada faktor *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdapat pada tabel di atas berdasarkan aspek penilaian yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan hasil *self assessment*

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dihitung dengan menggunakan rumus *Loan to Deposit Ratio*

yang telah dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan bahwa tingkat *Good Corporate Governance* (GCG) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 memperoleh nilai komposit 2 dengan predikat baik.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih baik.

Peringkat 2 yang diperoleh. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari *governance structure* yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kelemahan dalam *governance process* yang berpengaruh pada *governance outcome*, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

### 3.3. Analisis Earning (Rentabilitas)

#### a. Return On Asset (ROA)

Tabel 10. Hasil dan Predikat Rasio ROA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2013-2017

Tahun	Nilai Rasio	Peringkat	Nilai Predikat
2013	3,4%	1	Sangat Baik
2014	3,5%	1	Sangat Baik
2015	2,6%	1	Sangat Baik
2016	2,7%	1	Sangat Baik
2017	2,7%	1	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2018

Analisis faktor *Earning* (Rentabilitas) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang diukur dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). Rasio *Return on Asset* (ROA) mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang

dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Selama periode 2013-2017 rasio ROA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tabel di atas yang menunjukkan pada tahun 2013-2014 ROA mengalami kenaikan sebesar 0,1% dari 3,4% naik menjadi 3,5%, kemudian di tahun 2015 ROA mengalami penurunan sebesar 0,9% menjadi 2,6%. Pada tahun 2016-2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,1% yakni dari 2,6% menjadi 2,7%.

Meskipun terjadi penurunan dan kenaikan nilai rasio *Return on Asset* (ROA) dari tahun 2013 sampai dengan 2017 namun nilai rasio ROA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masih berada diatas 2%, rasio tersebut menunjukkan bahwa rasio ROA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Kriteria Penetapan Peringkat ROA menurut standar minimum Peraturan Bank Indonesia, mendapatkan peringkat 1 dan memiliki predikat sangat baik atau sangat sehat. Dalam upaya menjaga ROA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan meningkatkan pendapatan non bunga atau *fee based income*, terutama dari *digital banking* dan *business trade finance* baik dari debitur korporasi maupun BUMN.

b. *Net Interest Margin* (NIM)

Tabel 11. Hasil dan Predikat Rasio NIM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2013-2017

Tahun	Nilai Rasio	Peringkat	Nilai Predikat
2013	6,1%	1	Sangat Baik
2014	6,2%	1	Sangat Baik
2015	6,4%	1	Sangat Baik
2016	6,2%	1	Sangat Baik
2017	5,5%	1	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2018

Selain rasio *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, analisis faktor *Earning* (Rentabilitas) yang diukur dengan menggunakan rasio *Net Interest Margin* (NIM). Rasio NIM merupakan ukuran untuk membedakan antara bunga pendapatan yang diperoleh bank atau mungkin lembaga keuangan dan jumlah bunga yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Rasio ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan bank dengan baik sehingga bank-bank yang bermasalah dan mengalami

masalah bisa diminimalisir. Semakin besar ratio maka hal ini akan mempengaruhi pada peningkatan pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola oleh pihak bank dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian pada tabel 11 dapat diketahui selama periode 2013-2017 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 rasio NIM sebesar 6,1% kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,1% menjadi 6,2%. Pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,2% menjadi 6,4%. Kenaikan tidak terus terjadi pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan rasio. *Net Interest Margin* (NIM). Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,2% dari 6,4% di tahun sebelumnya menjadi 6,2%. Sedangkan pada tahun 2017 penurunan kembali terjadi sebesar 0,7% dari 6,2% menjadi 5,5%.

Secara keseluruhan rasio *Net Interest Margin* (NIM) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2013-2017 mendapatkan peringkat 1 dengan predikat sangat baik atau sangat sehat dalam hal ini berdasarkan standar minimum Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bank yang sehat memiliki rasio NIM >2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki rentabilitas yang sangat baik, mampu menjaga dan meningkatkan aset produktif atau kredit yang dimiliki.

3.4. Analisis *Capital* (Permodalan)

Hasil analisis *capital* (permodalan) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Hasil dan Predikat Rasio CAR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2013-2017

Tahun	Nilai Rasio	Peringkat	Nilai Predikat
2013	15,2%	1	Sangat Baik
2014	16,2%	1	Sangat Baik
2015	19,5%	1	Sangat Baik
2016	19,4%	1	Sangat Baik
2017	18,5%	1	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, diketahui bahwa rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terjadi peningkatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan nilai rasio CAR sebesar 15,2% di tahun 2013, mengalami peningkatan sebesar 1% di tahun 2014 menjadi 16,2%. Pada tahun 2015 kembali meningkat

sebesar 3,3% dari 16,2% menjadi 19,5%. Pada tahun 2016 rasio CAR mengalami penurunan sebesar 0,1% menjadi 19,4% dan pada tahun 2017 penurunan terjadi kembali sebesar 0,9% menjadi 18,5%.

Secara keseluruhan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk pada periode 2013-2017 mendapatkan peringkat 1 dengan predikat sangat baik atau sangat sehat dalam hal ini berdasarkan standar minimum Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan bahwa rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk bank yang dikatakan sehat yaitu di atas 8%. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Kriteria Penetapan Peringkat CAR yang menjelaskan bahwa apabila rasio CAR > 12%, maka bank tersebut berada di posisi sangat baik atau sangat sehat. Sehingga secara garis besar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki tingkat kecukupan modal yang baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya ataupun untuk menghadapi risiko yang akan terjadi.

Untuk menjaga kecukupan dana, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah merancang sejumlah strategi. Antara lain, ekspansi kredit atau *earning asset* yang dilakukan secara selektif dan berkualitas, guna meningkatkan kemampuan profitabilitas bank yang akhirnya akan meningkatkan kemampuan memupuk modal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Penilaian Tingkat Kesehatan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan analisis dari faktor *Risk Profile* yang terdiri dari risiko kredit dan risiko likuiditas diperoleh hasil untuk risiko kredit yang diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan bahwa secara keseluruhan berdasarkan perhitungan pada rasio ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dapat dikategorikan baik atau sehat. Sedangkan Risiko likuiditas dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan bahwa secara keseluruhan berdasarkan perhitungan pada rasio ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat dikategorikan cukup baik atau cukup sehat dengan senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian dan lebih selektif dalam penyaluran kredit kepada pihak lain yang membutuhkan.

Penilaian Tingkat Kesehatan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan hasil analisis dari *Self Assessment* yang telah dilaksanakan menurut faktor *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2013-2017 secara keseluruhan dapat dikategorikan baik atau sehat. Dengan hasil tersebut PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia dan terus melakukan peningkatan mutu manajemen agar hasil yang diperoleh semakin baik. Penilaian Tingkat Kesehatan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan analisis *earning* atau rentabilitas dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) dan rasio *Net Interest Margin* (NIM) secara keseluruhan menunjukkan hasil sangat baik atau sangat sehat. Hal tersebut diperoleh karena PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mampu menghasilkan laba secara maksimal dengan meningkatkan pendapatan non bunga dan aset produktif.

Penilaian Tingkat Kesehatan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan hasil analisis dari faktor *Capital* (Permodalan) yang diukur dengan menggunakan rumus *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat dikategorikan sangat baik atau sangat sehat. Hal tersebut diperoleh karena PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mampu menjaga penyediaan modal minimum untuk kegiatan usahanya.

Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah rentang waktu tahun pengamatan sampel dan memperluas objek penelitian.

## REFERENSI

Budisantoso, T. & Nuritomo. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.

Dendawijaya, Lukman. (2009). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI.

Kasmir. (2014). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Munawir, S. (2010). Analisa Laporan Keuangan (keempat). Yogyakarta: Liberty.

Rivai, Vethzal; Sofyan Basir; Sarwono Sudarto; Arifiandy Permata Veithzal (2013). Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tata Cara Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

## **PROFIL PENULIS**

**Ratnawaty Marginingsih, SE, MM**, adalah alumni dari Universitas BSI Bandung dari Program Studi Magister Manajemen. Saat ini aktif sebagai Dosen di Bina Sarana Informatika, selain itu aktif sebagai anggota Konsorsium Akademi Manajemen Keuangan (AMK) BSI Jakarta dan sebagai anggota Forum

Akademisi Indonesia serta sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia. Selain itu aktif mengikuti kegiatan seminar, workshop baik yang bersifat lokal kampus, nasional dan internasional. Penelitian yang dilakukan terkait dalam bidang manajemen keuangan dan manajemen lainnya.



## **Analisa Kecukupan Penerapan Pengawasan Internal Dengan Metode System Development Life Cycle PT. XYZ**

**Andi Martias**

Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika  
Email: [andi.aim@bsi.ac.id](mailto:andi.aim@bsi.ac.id)

---

**Cara Sitasi:** Martias, A. (2018). Analisa Kecukupan Penerapan Pengawasan Internal Dengan Metode System Development Life Cycle PT. XYZ. *Moneter*, 5(2), 23–32.

---

**Abstract** - *In order to improve the efficiency of operational activities and the quality of the Company's services to its customers, the Company is required to develop the Company's business strategy, among others, by utilizing the progress of Information Technology (IT). The development of these strategies further encourages new investments in IT used in transaction processing and information. The Company's reliability of managing IT determines success in generating a complete, accurate, current, complete, secure, consistent, timely and relevant information. As a growing company is required to develop other business strategies by utilizing information technology in providing services to its customers. Therefore PT XYZ Application SDLC (System Development Life Cycle) with SDLC resolution is System Development Life Cycle (SDLC), is a method of developing / designing computer-based application system that guide the steps to build the system. User Requirement, System Design, System Development, System Testing, User Acceptance Test, System Deployment, Post Implementation Review and Disposa System. Internal auditing is an independent party typically used within an organizational structure but can not be part of a team member who serves to provide input in confirmation of the adequacy of the control (advisory capacity). Based on the conclusion, the author uses several things to know 1) physical security performance against spreading room, 2) optimal performance of SDLC, 3) increasing understanding of dual custody password. It is expected to improve the quality control of the company's internal processes and protect the company's data.*

**Keywords:** *Internal Control. System Development Life Cycle*

### **PENDAHULUAN**

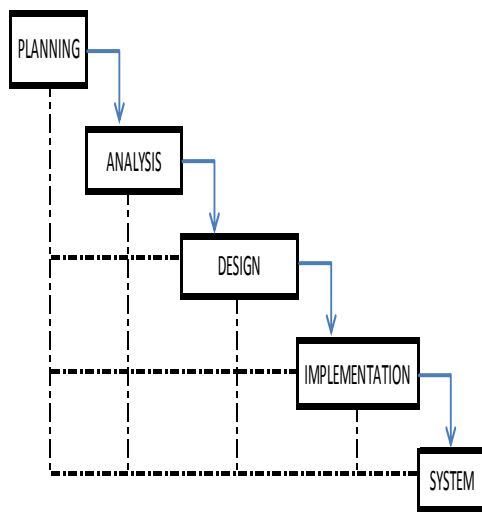
Peningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Perusahaan kepada customernya, Perusahaan dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis Perusahaan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI). Pengembangan strategi tersebut selanjutnya mendorong investasi baru dalam TI yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dan informasi. Kehandalan Perusahaan mengelola TI menentukan keberhasilan dalam menghasilkan suatu informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, aman, konsisten, tepat waktu dan relevan. Dengan demikian informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional bisnis Perusahaan (Hiro Tugiman, 2013). PT XYZ didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal Perusahaan telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan terkemuka di sektor pembiayaan yang melayani pembiayaan beragam merek kendaraan, baik untuk sepeda motor, mobil baru maupun mobil bekas. Melihat pada adanya potensi untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut, PT XYZ melakukan penawaran umum perdana atas sahamnya

pada tahun 2003, yang mana Bank BCD menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 75%, dilanjutkan dengan akuisisi selanjutnya sebesar 20% saham menjadikan Bank BCD memiliki kepemilikan saham sebesar 95% pada tahun 2009. Dalam rangka mendukung ekspansi usahanya maka Perusahaan menyediakan dana dan sumber daya yang cukup besar untuk pengembangan, pengadaan dan melanjutkan pemeliharaan suatu system aplikasi. Pada proses pengembangan dan pengadaan system Teknologi Informasi secara umum terdapat beberapa resiko yang dapat dihadapi seperti resiko operasional, reputasi, strategic dan kepatuhan. Oleh karena itu, Perusahaan perlu melakukan pengendalian atas resiko-resiko tersebut dengan menentukan metodologi yang akan digunakan. Salah satu metodologi yang dapat digunakan oleh Perusahaan adalah System Development Life Cycle (SDLC). SDLC adalah suatu tahap pengembangan aplikasi yang dibagi menjadi inisiasi, perencanaan, pendefinisian kebutuhan, desain, pemrograman, uji coba, implementasi, kaji ulang pasca implementasi, dan pemeliharaan. Dalam proses pengembangan dan pengadaan system aplikasi, audit internal merupakan pihak yang independen yang biasanya dimasukkan

dalam struktur organisasi proyek namun bukan merupakan bagian dari anggota tim pengembangan yang fungsinya untuk memberikan masukan dalam memastikan kecukupan pengendalian /advisory capacity (Shores, 2012) .

**Definisi SDLC**

SDLC adalah proses pengembangan sistem yang terdiri dari serangkaian tahap dimulai dari perencanaan studi kelayakan sampai dengan post implementation reviews untuk merubah kebutuhan manajemen ke dalam sistem aplikasi, dimana dalam pengembangannya dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau akuisisi dari vendor maupun kombinasi keduanya.



Sumber: (Shores, 2012)  
Gambar 1. Proses Sistem Aplikasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan pada SDLC (Shores, 2012)

**a. Tahap Inisiasi dan Perencanaan**

Tahap inisiasi diawali dengan identifikasi kebutuhan untuk menambahkan, menyempurnakan atau memperbaiki suatu sistem yang diminta oleh pengguna melalui suatu proposal. Tahap inisiasi ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan proposal yang berisi identifikasi untuk menambahkan, menyempurnakan atau memperbaiki suatu sistem, tujuan dan manfaat yang diharapkan serta bagaimana sistem yang akan dikembangkan dapat mendukung strategi bisnis
- 2) Evaluasi proposal oleh Manajemen
- 3) Persetujuan prinsip pengembangan sistem baru atau perubahan sistem
- 4) Studi kelayakan proyek yang antara lain pertimbangan bisnis, kebutuhan fungsional, factor-faktor yang mempengaruhi proyek dan analisis manfaat dan biaya (cost and benefit analysis)

- 5) Persetujuan manajemen atas dokumen studi kelayakan
- 6) Penandatanganan dokumen studi kelayakan oleh semua pihak terkait

Setelah persetujuan pengembangan diperoleh pada tahap inisiasi, Perusahaan melakukan perencanaan untuk identifikasi lebih rinci atas sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Tahap perencanaan ini menghasilkan suatu rencana proyek yang harus menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek dan harus disesuaikan dengan perkembangan proyek

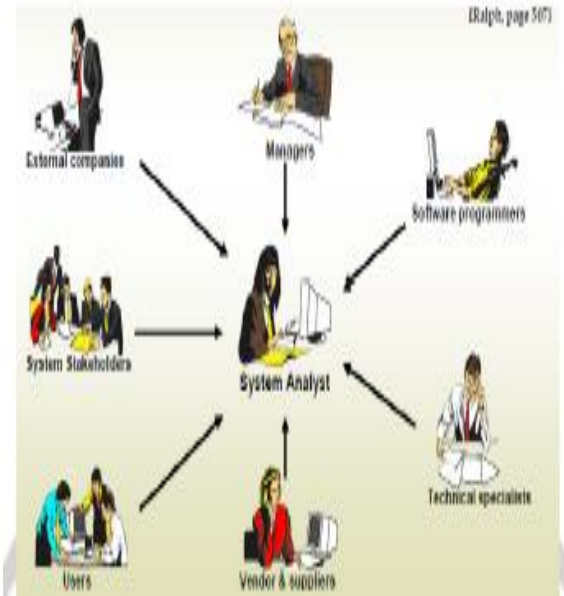
**b. Analysis terhadap Pendefinisian Kebutuhan Pengguna (User Requirement Definition)**

Berdasarkan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui secara tertulis oleh Manajemen, manajer proyek dapat membentuk tim guna menyusun requirement definition secara detail sebagai dasar dimulainya pengembangan sistem aplikasi. Pada tahapan ini, seluruh kebutuhan pengguna dikumpulkan berdasarkan contoh-contoh dokumen atau form, spesifikasi proses dan sistem yang ada saat ini, interview dengan pengguna akhir dan riset serta analisis terhadap ketentuan atau regulasi yang berlaku. Tahap pendefinisian kebutuhan ini terdiri atas :

- 1) Pengumpulan kebutuhan (Requirement Elicitation), merupakan bagian proses pengumpulan informasi mengenai tujuan pengembangan sistem, hasil yang diinginkan, bagaimana sistem dapat mengakomodir kebutuhan bisnis proses dan bagaimana sistem akan digunakan
- 2) Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis) merupakan proses pemahaman permasalahan dan kebutuhan untuk menentukan solusi yang dapat dikembangkan. Pada tahapan ini, ditentukan perkiraan umum dari waktu dan biaya pengembangan dari tiap kebutuhan. Hasil analisa kebutuhan digunakan untuk menghasilkan alur bisnis proses yang dapat menjelaskan kebutuhan dan solusinya baik bagi user maupun developer.
- 3) Spesifikasi Kebutuhan (Requirement Specification) merupakan proses yang mendeskripsikan fungsional sistem yang akan dikembangkan, baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras pendukung serta desain database. Spesifikasi kebutuhan harus lengkap, komprehensif, dapat diuji, konsisten, jelas, dan menjelaskan secara rinci kebutuhan Input, Proses, dan Output.
- 4) Pengelolaan Kebutuhan (Requirements Management) merupakan proses yang dilakukan oleh tim proyek untuk mengidentifikasi, mengendalikan dan menyimpan setiap perubahan terhadap kebutuhan pada saat pengembangan berjalan.

Prinsip-prinsip sistem informasi dalam sebuah organisasi adalah penggunaan sistem informasi pada

sebuah organisasi yang bertujuan untuk menambah Efektivitas Manajemen Sistem Infor-masi Akademik, Budaya Teknologi Infor-masi dan Komunikasi, Ketersediaan Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Sumber: Stair (2010)

Gambar 2. Peranan System Analysis (Stair, 2010)

#### c. Tahap Merancang (Design) Sistem.

Tahap ini mengkonversikan kebutuhan informasi, fungsi dan jaringan yang teridentifikasi selama tahap inisiasi dan perencanaan menjadi spesifikasi desain yang akan digunakan oleh pengembang. Salah satu teknis desain adalah dengan menggunakan prototype yang mengembangkan desain market dari bagian aplikasi seperti tampilan layar, struktur data dan struktur sistem. End user, perancang, pengembang, database administrator dan network administrator harus melakukan kaji ulang dan memilih desain yang diprototipekan dalam suatu proses berulang-ulang sampai disepakati desain yang akan digunakan. Personil auditor, security dan quality assurance harus dilibatkan dalam proses review proses diatas.

Pada tahap desain diperlukan suatu standar pengendalian aplikasi yang mencakup kebijakan dan prosedur terkait dengan aktivitas pengguna dan pengendalian terintegrasi dalam sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, audit intern berpartisipasi memberikan masukan pengendalian yang harus diterapkan dalam sistem aplikasi. Tahap ini diperlukan untuk meningkatkan keamanan, integritas dan kehandalan sistem dengan memastikan informasi Input, Proses dan Output yang terotorisasi, akurat, lengkap dan aman.

Berdasarkan tujuannya, pengendalian terbagi atas pengendalian yang bersifat pencegahan, deteksi atau temuan, atau koreksi.

Pengendalian yang harus dilakukan meliputi :

- 1) Pengendalian Input
- 2) Minimal dapat mencakup pengecekan terhadap validitas atau kebenaran data, range data atau parameter, dan duplikasi data yang di input
- 3) Pengendalian Proses
- 4) Memastikan proses bekerja secara akurat dan dapat menyimpan informasi atau menolaknya. Pengendalian proses yang dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem mencakup paling kurang Error Reporting, Transaction Log, pengecekan urutan, backup file.
- 5) Pengendalian Output
- 6) Memastikan sistem mengelola informasi dengan aman dan mendistribusikan informasi hasil proses dengan tepat serta menghapus informasi yang telah melewati masa retensi

#### d. Tahap Pemrograman

Dalam tahap ini dilakukan konversi spesifikasi desain menjadi program yang dapat dijalankan. Selama tahap ini, Perusahaan harus membuat rencana uji coba yang harus dilakukan. Selain it, Perusahaan juga harus mengkinikan rencana migrasi, implementasi dan pelatihan end user, operator dan dokumentasi manual pemeliharaan.

#### e. Tahap Uji Coba

Perusahaan harus melaksanakan beberapa rangkaian uji coba untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna serta hubungan dengan sistem lain yang telah digunakan sebelumnya. Segala koreksi dan modifikasi yang dilakukan selama uji coba harus didokumentasikan untuk menjaga integritas keseluruhan dokumentasi program. Perusahaan harus melengkapi pedoman bagi pengguna dan pengelola serta menyiapkan rencana implementasi serta pelatihan.

Uji Coba yang dapat dilakukan oleh Perusahaan antara lain :

- 1) Unit Testing
- 2) System Integration Test
- 3) Stress Testing
- 4) User Acceptance Test

User Acceptance Test (UAT) merupakan uji coba akhir yang dilakukan end user terhadap sistem atau aplikasi yang telah selesai dikembangkan dalam rangka menguji fungsionalitas keseluruhan sistem, Apakah telah sesuai dengan kebutuhan pengguna pada user requirement definition sebelum memutuskan implementasi dapat dilakukan. Jika hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem atau aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna maka harus dibuat berita acara UAT yang disetujui oleh pengguna.

f. Tahap Implementasi

Pada tahap ini hal-hal Utama yang perlu dilakukan antara lain : pemberitahuan jadwal implementasi, pelatihan pada user dan instalasi sistem aplikasi yang telah disetujui ke dalam lingkungan produksi. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan antara lain :

- 1) Pegecekan integritas program berupa pengendalian yang memadai terhadap konversi dari source code ke object code yang akan di implementasikan
- 2) Migrasi data dari sistem lama ke sistem baru
- 3) Pengecekan akurasi dan keamanan data hasil migrasi pada sistem baru
- 4) Kemungkinan diberlakukannya parallel run antara sistem yang lama dengan sistem yang baru, sampai dipastikan bahwa data pada sistem yang baru telah akurat dan handal
- 5) Integritas data, dimana perusahaan harus memastikan keakuratan dan kehandalan dari database dan integritas data
- 6) \pengaturan penyimpanan sorce code dan database dari sistem lama

**1. Change Management (Manajemen Perubahan)**

Manajemen harus menetapkan SOP pengendalian perubahan secara detail yang memuat prosedur otorisasi, uji coba, dokumentasi, implementasi dan sosialisasi atas modifikasi teknologi tersebut. Modifikasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Modifikasi perangkat keras dibutuhkan untuk menggantikan peralatan yang lama atau tidak berfungsi atau untuk meningkatkan kinerja atau kapasitas penyimpanan. Modifikasi perangkat lunak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan user, memperbaiki permasalahan perangkat lunak dan kelemahan keamanan atau implementasi teknologi baru. (Shores, 2012). Perusahaan harus mengkoordinasikan modifikasi perangkat lunak dan patch melalui proses change management yang terpusat karena adanya keterkaitan antar sistem aplikasi dan sistem operasional. Berdasarkan tingkat kepentingannya, modifikasi digolongkan menjadi :

- a. Modifikasi Utama (major modification), merupakan perubahan fungsional secara signifikan pada sistem aplikasi yang antara lain disebabkan karena adanya konversi atau pengembangan sistem baru akibat adanya merger atau akuisisi. Modifikasi Utama harus diterapkan mengikuti proses yang terstruktur seperti yang dilakukan dalam siklus pengembangan sistem atau aplikasi.
- b. Modifikasi minor (minor modification), merupakan perubahan pada sistem aplikasi atau perangkat lunak sistem operasi untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki permasalahan atau meningkatkan keamanan.
- c. Modifikasi darurat (emergency modification), dibutuhkan untuk memperbaiki permasalahan pada perangkat lunak atau mengembalikan proses

operasional dengan cepat. Meskipun modifikasi tersebut harus diselesaikan dengan cepat, namun tetap harus diimplementasikan dan dikendalikan dengan baik. Sebagaimana layaknya modifikasi, modifikasi darurat harus diuji sebelum implementasi. Namun jika uji coba tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada modifikasi darurat sebelum implementasi, harus ada prosedur untuk backup file dengan benar. Hal ini penting agar perusahaan dapat membatalkan modifikasi jika modifikasi tersebut menyebabkan gangguan pada system.

**2. Program Development and Changes**

Pengendalian atas program development and changes membahas pengendalian- pengendalian yang berkaitan dengan proses pengembangan dan pemeliharaan/perubahan aplikasi dalam perusahaan. Tujuan pengendalian atas program development and changes adalah untuk memastikan bahwa semua pengembangan dan perubahan pada aplikasi dan atau program TI telah diotorisasi, diuji, dan disetujui oleh personil yang berwenang sebelum diimplementasikan dan atau digunakan oleh user.

Pengembangan dan pemeliharaan/perubahan aplikasi memiliki dua komponen dasar yaitu (Hogan, W.M, 2014):

- a. Akuisisi dan implementasi aplikasi baru – dalam hal ini penguji harus memperhatikan pengendalian- pengendalian yang dapat mengurangi resiko yrag berkaitan dengan proses pengembangan aplikasi baru, misalnya metodologi/standard pengembangan sistem dan mekanisme “quality assurance” yang berlangsung.
- b. Pemeliharaan aplikasi yang telah ada – dalam hal ini penguji harus memperhatikan pengendalian- pengendalian yang berkaitan dengan proses dilakukannya perubahan-perubahan atas aplikasi yang telah ada, misalnya otorisasi permohonan perubahan aplikasi

**3. Computer Operation**

Pengendalian terhadap computer operation membahas pengendalian- pengendalian yang berkaitan dengan proses operasional sistem computer beberapa pengendalian dalam area tersebut antara lain (Hogan, 2014) :

- a. Aktivitas operasional dari seluruh infrastruktur teknologi informasi perusahaan seperti definisi, akuisisi, instalasi, konfigurasi, integrasi dan perawatan TI
- b. Aktivitas operasional day to day. Misalnya pelayanan fungsi IT seperti service level manajemen, prosedur backup dan recovery, manajemen jasa pihak ke 3 (Thrid Party Service Management), ketersediaan sistem, Customer Relationship Management (CRM), manajemen sistem dan konfigurasi, operation management

scheduling dan manajemen fasilitas (Facility Management).

#### 4. Access to program and data

Pengendalian access to program and data membahas mengenai pengendalian- pengendalian yang berkaitan dengan akses kepada program dan data. Tujuan pengendalian atas access to program and data adalah memastikan bahwa hanya personil yang berwenang yang memiliki akses kepada data dan melakukan fungsi spesifik didalam aplikasi TI misalnya inquiry, update dan menghapus data yang ada dalam database suatu aplikasi (Hogan, 2014)

Efektifitas pengendalian di area ini dapat memberikan keyakinan yang memadai dan kecukupan pengendalian dalam memitigasi resiko-resiko sebagai berikut :

- a. Akses yang tidak tepat (inappropriate akses) dan
- b. Penggunaan sistem yang tidak terotorisasi (unauthorized use of system)

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yaitu melihat proses pengendalian internal terhadap proses pengelolaan system pada perusahaan PT XYZ. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat pengaruh tujuan perusahaan maupun manajemen.. Studi peristiwa dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kualitatif berdasarkan hasil audit internal dan survey observasi

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan Proses SDLC pada PT XYZ

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Multi Finance, PT XYZ dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis Perusahaan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Oleh karena itu PT XYZ menerapkan metodologi SDLC (System Development Life Cycle) yang tertuang dalam Memo Internal No. MI-066/OPR/IT/VII/2008 Perihal System Development Life Cycle, dengan mendefinisikan SDLC sebagai berikut (Blanchard & Fabrycky, 2006): System Development Life Cycle (SDLC), merupakan sebuah metode pengembangan/rancang bangun sistem aplikasi berbasis computer yang memandu langkah-langkah pengadaan atau pengembangan sistem/aplikasi mulai dari User Requirement, Sistem Design, Sistem Development, Sistem Testing, User Acceptance Test, Sistem Deployment, Post Implementation Review dan Sistem Disposol

#### 2. Penanggung Jawab Proses SDLC

Fungsi didalam Divisi IT antara lain :

- a. IT Development terdiri dari :

- 1) Departemen Bussiness Application Development (BAD) bertugas untuk melakukan pengembangan system/aplikasi system utama (core system)
- 2) Departemen Enterprise Application Development (EAD) bertugas untuk melakukan pengembangan system/aplikasi pendukung (support application)
- 3) Departemen Management Information Sysytem (MIS) bertugas untuk melakukan pengembangan laporan untuk kebutuhan setiap Divisi di perusahaan
- 4) Departemen Infrastucture bertugas untuk melakukan pengembangan infrastruktur dilokasi data center, DRC maupun kantor cabang

- b. IT Operation Support, bertugas sebagai mediator antara user dan IT Developer, fungsi ini terdiri dari :

- 1) Departemen IT Operation menjadi penata laksana sistem/aplikasi di mesin produksi
- 2) Departemen IT Branch Support menjadi pelaksana yang menganalisis kebutuhan user (user requirement)

- c. Fungsi IT Helpdesk merupakan petugas level satu dari divisi IT untuk memberikan dukungan atas keluhan atau permintaan yang disampaikan oleh end user sistem/aplikasi IT.

- d. Fungsi IT Project Management Office (PMO) bertugas sebagai penata laksana proyek

- e. Fungsi IT Quality Assurance (ITQA), bertugas sebagai pembuat standar kualitas atas seluruh proses didalam SDLC termasuk standar konfigurasi dan sebagai pengawas terhadap kepatuhan proses

- f. Fungsi Quality Control, sebagai pelaksana penyusun skenario uji dan penguji kualitas sistem/aplikasi serta pemohon deploy sisem/aplikasi untuk kegiatan pemeliharaan sistem/aplikasi

Fungsi diluar Divisi IT antara lain :

- a. Fungsi IT Risk Reviewer bertugas memberikan evaluasi resiko terhadap perubahan yang terjadi akibat pemenuhan fitur baru

- b. Fungsi Operation Development bertugas sebagai koordinator antar user atau process owner dalam pembuatan BRD lintas divisi

- c. Fungsi Operation Standard bertugas sebagai penata laksana standarisasi proses dan parameter yang berkaitan dengan penggunaan sistem

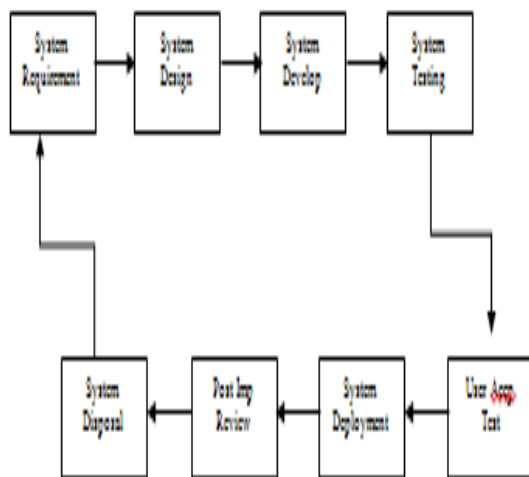
- d. Fungsi IT Risk Commite bertugas sebagai dewan penyerah untuk memberi saran atas resiko yang dapat diterima perusahaan

#### 3. Dokumen Serta Sarana dan Prasarana yang Digunakan dalam Proses SDLC

- a. BRD (Business Requirements Definition) merupakan dokumen yang merinci permintaan dari user atas sistem/fitur/proses/item data yang dikehendaki tersedia pada sistem IT Perusahaan
- b. Persetujuan User merupakan Persetujuan tertulis berupa tanda tangan yang dibuat pada dokumen BRD
- c. Testing Environment merupakan sarana IT yang tersedia untuk melakukan uji coba dengan kelengkapan infrastruktur perangkat keras, operating system, database, aplikasi dan data sesuai standar yang ditetapkan untuk sarana uji coba (testing)
- d. Production Environment merupakan sarana IT yang tersedia untuk mendukung operasional perusahaan dengan kelengkapan infrastruktur, database dan data sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk sarana operasional perusahaan atau transaksi sebenarnya
- e. Check List merupakan daftar kerja yang harus diisi dan dilengkapi saat pelaksanaan pengujian sistem/aplikasi. Temuan/masalah dapat dilaporkan menurut daftar kerja
- f. Operational Program Libraries merupakan sarana/tempat penyimpanan program/modul/sistem/aplikasi di dalam mesin produksi

**4. Tahapan Proses SDLC**

SDLC pada PT XYZ terdiri dari 8 (delapan) tahapan proses sebagai berikut :



Sumber: (Blanchard & Fabrycky, 2006)  
Gambar 3. Tahapan Proses SDLC

Adapun tahapan SDLC sebagai berikut :

- a. System Requirement meliputi :
  - 1) User Requirement, Permintaan user kepada Divisi IT untuk menyediakan sistem/aplikasi harus dituangkan dalam bentuk dokumen yang dikenal dengan dokumen BRD (Business

- Requirements Definition)
- 2) Analisa, Draft BRD dibahas dengan user terkait bersama semua perwakilan Divisi IT untuk diperoleh suatu kesepakatan serta penunjukan Project Manager (PM), yaitu PM user dan PM IT
- 3) Eskalasi, Apabila terjadi ketidaksepakatan atau deadlock dalam penyelesaian draft BRD maka akan dieskalasi oleh PM User (melibatkan IT Operation Support dan atau Operation Development) kepada IT Steering Committee. Apabila solusi tidak dapat diputuskan maka IT Steering Committee akan mengangkat (eskalasi) masalah ini ke tingkat BOD.
- 4) Pembuatan Final BRD, Draft yang sudah ditandatangani oleh user dan telah mendapat rekomendasi dari fungsi Risk Management secara tertulis disebut Final BRD
- 5) Jadwal Proyek (Schedule Project), Jadwal yang telah disiapkan fungsi IT Development akan ditembuskan kepada fungsi PMO untuk melengkapi keseluruhan jadwal proyek (project schedule). Selanjutnya fungsi PMO akan mengirim jadwal proyek yang lengkap kepada fungsi QC dan pemilik proyek (process owner)
- 6) Dokumentasi, Dokumentasi yang dihasilkan dari kegiatan user requirement adalah Business Requirement Definition (BRD)

b. System Design

System design adalah kegiatan perancangan sistem/aplikasi, proses dalam tahap ini meliputi :

- 1) Perancangan sistem/aplikasi, Final BRD diserahkan kepada Tim System Design yang terdiri dari fungsi IT Development untuk dibuat perancangan sistem/aplikasi. Tim design terdiri dari : fungsi IT Development, fungsi Architecture, dan fungsi IT Operation Support
- 2) Pembuatan dokumen teknis, Dokumen yang dihasilkan dalam tahap ini adalah dokumen perancangan antara lain : Database Design, Graphic User Interface (GUI), Information Security Design, System/Application Architecture, Operation Design
- 3) Pelaporan, Team system design segera membuat pelaporan perkembangan perancangan sistem/aplikasi dengan format Project Progress Report

c. System Development

Yang dimaksud dengan proses “System Development” adalah kegiatan pembuatan/pembangunan sebuah system/aplikasi.

Proses dalam tahap ini meliputi sistem/aplikasi baru dan pemeliharaan sistem/aplikasi.

Sistem/Aplikasi Baru

- 1) Persiapan, Berdasarkan final BRD dan dokumen perancangan (Data Base Design, Graphic User

- Interface, Information Security Design, Sistem/aplikasi Architecture, Operation Design), maka IT Development mempersiapkan pembuatan / pembangunan sistem/aplikasi
- 2) Pengujian
  - 3) Pelaporan, Fungsi IT Development membuat laporan perkembangan pembangunan sistem/aplikasi dengan format Project Progress Report dan disampaikan kepada Fungsi PMO
  - 4) Dokumentasi, Dokumen yang dihasilkan dalam sistem Development :
    - a) Technical Acceptance Test (TAT) : Dokumen yang menyatakan bahwa test sudah dilakukan oleh fungsi IT Development
    - b) Data Flow Diagram (DFD) : Dokumen diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah sistem
    - c) Entity Relation Diagram (ERD) : Dokumen yang menggambarkan hubungan antar entitas data dalam sebuah sistem/aplikasi
    - d) User Manual Guidance (UMG) : Dokumen yang berisi petunjuk / penjelasan tatacara pemakaian sistem/aplikasi dipersiapkan oleh user
    - e) Functional Specification Definition (FSD) : Dokumen yang menjelaskan tentang fungsi yang spesifik dalam sistem
    - f) Data Dictionary : Dokumen yang menjelaskan pengertian nama field dan data yang digunakan.

#### Pemeliharaan Sistem/Aplikasi

- 1) Persiapan, Permintaan perbaikan sistem/aplikasi didaftarkan melalui tiket dan disampaikan ke IT Helodesk
- 2) Perbaikan, Perbaikan sistem/aplikasi berdasarkan tiket dari user dilaksanakan oleh IT Development
- 3) Technical Acceptance Test, Pelaksanaan unit test dilaksanakan oleh fungsi IT Development dan hasilnya disampaikan kepada fungsi QC dalam format TAT

#### d. System Testing

Yang dimaksud dengan proses “System Testing” adalah kegiatan pengujian kualitas suatu sistem/aplikasi yang telah dibangun oleh fungsi IT Development.

Proses dalam tahap ini meliputi :

- 1) Pembuatan skenario uji
- 2) Pengujian sistem/aplikasi  
Scope pengujian meliputi :
  - a) Sistem Integration Test (SIT) : Kegiatan pengujian secara terintegrasi dalam sistem/aplikasi
  - b) Performance Test : Pengujian terhadap kinerja sistem/aplikasi
  - c) Stress Test : Pengujian terhadap kemampuan sistem/aplikasi menjalankan transaksi dalam jumlah besar

- 3) Dokumen yang dihasilkan dalam tahap system testing :

- a) Skenario Uji (Testing Scenario), dokumen ilustrasi tentang langkah-langkah pengujian suatu object/sistem/aplikasi
- b) QC Release, dokumen pengesahan dari fungsi QC yang menyatakan bahwa objek sudah lolos dari pengujian kualitas
- c) Deploy Request, dokumen permintaan persetujuan yang dikirim oleh fungsi QC kepada fungsi Operation untuk melakukan deploy sebuah sistem/aplikasi pada mesin produksi

#### e.UAT

Yang dimaksud dengan proses “User Acceptance Test” adalah kegiatan pengujian sistem/aplikasi yang dilakukan oleh user berdasarkan dokumen final BRD dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian spesifikasi antara sistem/aplikasi dengan spesifikasi yang diminta oleh user.

Proses dalam tahap ini meliputi :

- 1) Persiapan skenario
- 2) Persiapan mesin UAT
- 3) Menjalankan uji sistem/aplikasi dengan skenario bisnis
- 4) UAT Sign Off
- 5) Pelaporan dan Deploy Request
- 6) Dokumentasi  
Dokumen yang dihasilkan dalam tahap UAT :
  - a) Operasional Scenario
  - b) UAT Sign Off
  - c) Deploy Request

#### f. System Deployment

Yang dimaksud dengan system deployment adalah kegiatan menempatkan sistem/aplikasi yang sudah lolos UAT ke dalam mesin produksi (Production Environment)

- 1) Untuk permintaan bersifat pemeliharaan (maintenance)  
IT Operation Support akan melakukan tahapan sebagai berikut :
  - a) Memeriksa checklist dalam dokumen QC Release dan membuat analisa terhadap obyek/sistem/aplikasi yang akan ditempatkan di mesin produksi (Production Environment)
  - b) Apabila ditemukan ketidaksesuaian / kesalahan maka temuan kesalahan akan dilaporkan ke IT Development untuk dilakukan perbaikan. Laporan yang sama juga ditujukan kepada fungsi QC
  - c) Berdasarkan laporan tersebut fungsi QC akan menganalisa kembali skenario pengujian dan akan melakukan pengujian kembali
  - d) Apabila tidak diketemukan suatu masalah,

- proses dilanjutkan pada proses persetujuan deploy
- 2) Untuk sistem/aplikasi baru / fitur baru  
Berdasarkan UAT Sign Off, Fungsi IT Operation Support membuat analisa terhadap object/sistem/aplikasi yang ditempatkan pada mesin produksi (Production Environment). Apabila dalam analisa ditemukan kesalahan maka object/sistem/aplikasi terkait akan dilaporkan kepada fungsi IT Development untk dilakukan perbaikan dan kepada fungsi QC untuk dilakukan perbaikan skenario pengujian serta menjalankan pengujian atas hasil perbaikan IT Development, apabila tidak ditemukan suatu kesalahan proses dilanjutkan pada proses persetujuan deploy
  - 3) Deployment ke Production  
Pelaksanaan deployment terhadap object/sistem/aplikasi dilaksanakan oleh IT Operation Support setelah seluruh dokumen diterima lengkap (informasi tata cara deploy dan persetujuan dari masing-masing dokumen) dengan pertimbangan sebagai berikut :
    - a) Pelaksanaan deploy object/sistem/aplikasi dijalankan 2 minggu sekali pada hari Kamis (H), berlaku pula untuk deploy hardware.
    - b) Apabila pelaksanaan deploy hardware memerlukan waktu lebih dari 5 jam maka deploy dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu
  - 4) Dokumentasi  
Dokumen yang dihasilkan dalam tahap system deployment adalah dokumen deploy request yang disetujui oleh pihak pemohon, dan akan dilengkapi dengan tanda tangan fungsi IT Operation Support sebagai pelaksana deploy

g. Post Implementation Review  
Yang dimaksud dengan Post Implementatio Review adalah kegiatan pemantauan hasil implementasi/aplikasi yang telah beroperasi pada mesin produksi (Production Environment).

h. System Disposal  
Yang dimaksud dengan “Sistem Disposal” adalah proses penghapusan sistem/aplikasi dari mesin produksi (Production Environment) yang sudah diputuskan untuk tidak digunakan lagi (disposed)

Proses ini dilakukan untk memastikan :

- 1) Informasi penting dalam sistem/aplikasi tersebut dapat diakses dan dibuka kembali untuk kebutuhan masa mendatang (backup)
- 2) Keamanan data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak berhak dapat terjamin
- 3) Tersedianya data untk pembuktian bahwa migrasi ke sistem pengganti telah dilakukan dengan benar
- 4) Pemenuhan ketentuan perusahaan / regulasi pemerintah dan atau pihak ketiga lainnya dalam hal pengelolaan data dan data history

**5. Pengelolaan Program Libraries**

Program source suatu sistem/aplikasi yang sudah digunakan untuk operasional perusahaan (source code, operating sistem, database) disimpan pada server produksi (Production Environment) dan dikelola oleh IT Operation. Apabila diperlukan perubahan, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur Dual Custody

**6. Kecukupan Pelaksanaan SDLC Proses di PT XYZ**

Meskipun manual Change Control telah diimplementasikan di PT XYZ, tetapi masih terdapat beberapa penerapan yang belum berjalan dengan optimal. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

Tabel 1. Kecukupan Pelaksanaan SDLC Proses di PT XYZ

Tahap	Kondisi	Dampak	Status
Umum	Pembuatan ruangan deploy belum memadai, dibuatkan cubical room tanpa access door	Dapat mengakibatkan pihak yang tidak berwenang dapat masuk dan menggunakan PC Deploy	Belum diatur dalam MI
Inisiasi	Dari hasil sampling terhadap dokumen BRD, belum dilakukan tanda tangan approval IT untuk area Departement Head Infrastruktur, IT Security (pemegang dual custody) dan DBA (pemegang dual custody)	Dapat mengakibatkan lemahnya fungsi pengendalian oleh fungsi IT PMO	Sudah diatur dalam MI
Eksekusi	Penggunaan password Super ID (dual Ccstody) diberikan kepada IT Operation Support untuk implementasi/deploy object/sistem/aplikasi ke Production dan DRC	Dapat mengakibatkan n deploy object/aplikasi fiktif ke dalam system yang dilakukan oleh IT Operation Support	Sudah diatur dalam MI

Sumber: (Blanchard & Fabrycky, 2006)



## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan atas penyebab belum memadainya penerapan SDLC proses di PT XYZ :

1. Belum optimalnya pemahaman tentang penerapan physical security
2. Physical security belum diaplikasikan secara optimal, tercermin dari pembuatan ruangan khusus untuk deploy (implementasi object/sistem/aplikasi) dalam ruangan terbuka dan audittee beranggapan dengan memisahkan ruangan deploy saja sudah cukup walaupun tidak dilengkapi dengan penerapan physical security menggunakan access door
3. Belum optimalnya peran unit kerja tertentu dalam alur SDLC
4. Dalam tahapan inisiasi, diketahui bahwa pada dokumen BRD belum ada tanda tangan approval IT antara lain Departement Head Infrastruktur, IT Security (pemegang dual custody) dan DBA (pemegang dual custody), yang digunakan sebagai bukti bahwa seluruh requirement dalam BRD telah diimplementasikan oleh IT Operation Support ke dalam environment production dan DRC
5. Belum optimalnya pemahaman tentang penerapan dual custody password
6. Terdapat kesalahan pemahaman penerapan dual custody password, dimana saat observasi terhadap proses deploy object/sistem/aplikasi ke dalam environment Production dan DRC, password Super ID di input oleh IT Operation Support secara singly, yang sebelumnya password tersebut diberikan oleh IT Security dan DBA (pemegang dual custody).

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, penulis merekomendasikan beberapa hal untuk dipertimbangkan :

1. Mengoptimalkan penerapan physical security terhadap ruangan deploy untuk mengantisipasi pihak yang tidak berwenang untuk akses ke dalam environment production dengan menerapkan pengamanan ruangan dengan menggunakan access door, serta berikan access door hanya kepada pihak yang berkepentingan dalam menggunakan PC deploy.
2. Mengoptimalkan peran unit kerja terkait dalam alur proses SDLC
3. Optimalisasi peran unit kerja terkait dalam alur proses SDLC, khususnya unit kerja IT PMO selain memiliki tanggung jawab memonitor jalan pengembangan sistem sebaiknya juga memonitor dan mendokumentasikan seluruh dokumen SDLC seperti BRD, TAT dan lainnya
4. Mengoptimalkan pemahaman tentang penerapan dual custody password

5. Pemahaman terhadap penerapan dual custody password tidak hanya atas dasar pemisahan password saja tetapi dalam pelaksanaannya juga harus menerapkan four eyes principal yaitu turut serta dalam proses pelaksanaan deploy object/system/aplikasi sehingga dapat menghindari penggunaan password Super ID - dual custody secara

## REFERENSI

- Blanchard, B. S., & Fabrycky, W. J. (2006). *NoSystems Engineering and Analysis Title*. New Jersey: Prentice Hall.
- Fondasi Audit Internal, Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Jakarta, 2008.
- Hiro Tugiman. (2013). *Auditor Internal Wajib Bersertifikat Title*. Jakarta: Auditor Internal.
- Hogan, W. . (2014). How to apply TQM to the internal audit functio. *Internal Auditing*, 9(3), 3–14.
- Shores, A. . (2012). Improving the Quality of management System. *Quality Progress*, 25(6), 53–57.
- Standar Profesi Audit Internal, Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Jakarta, 2008.

## PROFIL PENULIS

Profil singkat dari penulis adalah Nama penulis Andi Martias, SE, M.Si, Ak, QIA, mempunyai home Base di AMIK BSI BOGOR, memiliki Pendidikan S1 (SE) – Universitas Islam Indonesia, Falkultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, tanggal lulus 16 Juni 2003, melanjutkan S2 (M.Si) – Universitas Gadjah Mada, Program Studi Ilmu Akuntansi, tanggal lulus 16 Juni 2005 juga

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan (Ak) – Universitas Sriwijaya, tanggal lulus 29 November 2007 dan Qualified Internal Auditor (QIA) – Dewan Serifikasi Qualified Internal Auditor, tanggal lulus 16 Desember 2013. Aktivitas penulis sebagai tenaga pengajar di Bina Sarana

Informatika hingga saat ini dari tahun 2010, karyawan di Badan Umum Milik Swasta dan sebagai Anggota Internal Auditor di YPIA Jakarta

## Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Mandiri Tbk. Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Fazhar Sumantri<sup>1</sup>, Dwi Apriliani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>AMIK BSI Jakarta  
Email: fazhar.sumantri@gmail.com

<sup>2</sup>AMIK BSI Jakarta  
Email: dwiapriliiani415@gmail.com

**Cara Sitasi:** Sumantri, F., & Apriliani, D. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Mandiri Tbk. Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. *Moneter*, 5(2), 33–40.

**Abstract** - PT Bank Mandiri Tbk. with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. are the two banks that consistently hold the largest assets in Indonesia, for the community, especially the business people, of course these two banks are an attraction to invest their funds. Before entrusting the funds, it is important for the public to know which bank performs best before entrusting the funds. This study aims to compare the financial performance between PT Bank Mandiri Tbk. with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. the period of 2013-2017 measured in the financial ratios of LDR (X1), ROA (X2), ROE (X3), BOPO (X4), CAR (X5) and DER (X6) using One Way Anova test at the 5% or 0.05 significance level. The results of this study based on the value of each ratio, the financial performance of PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. is superior to PT Bank Mandiri Tbk. if measured using ROA (X2), ROE (X3), CAR (X5), but PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. has a higher risk in managing its operational expenses to its revenue and liquidity management because the credit value is greater than its liquidity value. Based on the One Way Anova test simultaneously in this study it can be concluded that there are significant financial performance differences between PT Bank Mandiri Tbk. with PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., while based on One Way Anova test partially in this research can be concluded that ROA (X2) has difference of financial performance with significance value  $0.009 < 0.05$ .

**Keywords:** Financial Ratios, Financial Performance Comparisons

### PENDAHULUAN

Industri perbankan adalah salah satu komponen penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian nasional khususnya para pelaku bisnis, hal ini dapat dilihat dari UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam publikasi [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), nilai Capital Adenquacy Ratio (CAR) pada November 2017 tercatat sebesar 23,54%, rasio alat likuid per noncore deposit dan rasio alat likuid per DPK masing-masing sebesar 101,75% dan 21,44%, sedangkan untuk tingkat kredit bermasalah sebesar 2,89% untuk perbankan dan 3,08% untuk

perusahaan pembiayaan, hal ini dapat mengantisipasi resiko dan mendukung para pelaku usaha. Berikut adalah data asset bank berdasarkan laporan statistik Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017:

Tabel 1 Laporan Asset Bank di Indonesia Periode 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

	Na	201	201	201	201	2017
	o	3	4	5	6	
	nk					
1	BM	700.	798.	905.	975.	1.078
	RI	083	161	759	163	.703
2	BBR	597.	705.	802.	931.	1.038
	I	706	287	299	693	.673
3	BBC	487.	537.	584.	660.	
	A	134	210	444	145	739.8
						83
4	BB	362.	408.	456.	571.	
	NI	422	047	463	509	709.3
						30
5	BN	218.	227.	244.	237.	
	GA	225	736	285	123	252.1
						31

Sumber: Laporan Statistik Bursa Efek Indonesia 2013-2017 (Data diolah)

Dari tabel 1 diatas terlihat PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) secara konsisten menjadi pemilik asset terbesar di Indonesia, kedua bank tersebut tentu memiliki kinerja yang berbeda dalam mengelola keuangannya. Bagi para pelaku bisnis dan masyarakat tentu harus mengetahui kondisi bank sebelum mempercayakan dananya atau melakukan transaksi lain terkait bisnis mereka. Salah satu alat ukur untuk menilai kesehatan pada bank adalah menggunakan rasio keuangan. Hal inilah yang menarik untuk diteliti bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. menggunakan rasio keuangan.

“Rasio keuangan merupakan suatu cara untuk membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan penting mengenai kesehatan suatu keuangan dari perusahaan. Pertanyaan tersebut meliputi likuiditas perusahaan, kemampuan manajemen memperoleh laba dari penggunaan aktiva perusahaan, dan kemampuan manajemen mendanai investasi yang dilakukannya ke dalam perusahaan.” (Samryn, 2015 :408) Menurut Margaretha (2009 :58) “Analisa rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja bank terdiri dari analisis rasio likuiditas, analisis rasio rentabilitas, dan analisis rasio solvabilitas”

### 1. Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2012:315) dalam Mewengkang (2013:246) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berikut adalah alat ukur yang digunakan dalam rasio ini:

#### **Loan to Deposit Ratio (LDR)**

Menurut Kasmir (2012:319) dalam Mewengkang (2013:349) “Rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”. Menurut Hariyani (2010:55) “Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar”. *Perhitungan Loan to Deposit Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang Diberikan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

### 2. Rasio Rentabilitas

Menurut Kasmir (2012:327) dalam Mewengkang (2013:246) Rasio ini merupakan alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Berikut adalah alat ukur yang digunakan dalam rasio ini:

#### a. **Return on Assets (ROA)**

Menurut Kasmir (2010) dalam Ningsih (2012:40) “Rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan”. Menurut Hariyani (2010:53) “Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil”. *Perhitungan Return on Assets* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

#### b. **Return on Equity (ROE)**

Menurut Kasmir (2012:328) dalam Mewengkang (2013:249) “Rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income*”. Menurut Hariyani (2010:54) “Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil”. *Perhitungan Return on Equity* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

#### c. **Rasio Biaya Operasional (BOPO)**

Menurut Bank Indonesia (2011) dalam Ningsih (2012:40) “Mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya”. Menurut Hariyani (2010:55) “Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil”. *Perhitungan Rasio Biaya Operasional* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2012:322) dalam Mewengkang (2013:246) Rasio ini merupakan alat untuk mengukur kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Berikut adalah alat ukur yang digunakan dalam rasio ini:

#### a. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Kasmir (2012:328) dalam Mewengkang (2013:249) "Rasio yang mengukur kecukupan modal suatu bank". Menurut (Wangsawidjaja., 2012) "CAR menunjukkan seberapa besar modal untuk menunjang kebutuhannya dan semakin besar nilai CAR maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dan menunjukkan semakin sehat bank tersebut". Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang}} \times 100\%$$

#### b. Debt to Equity Ratio (DER)

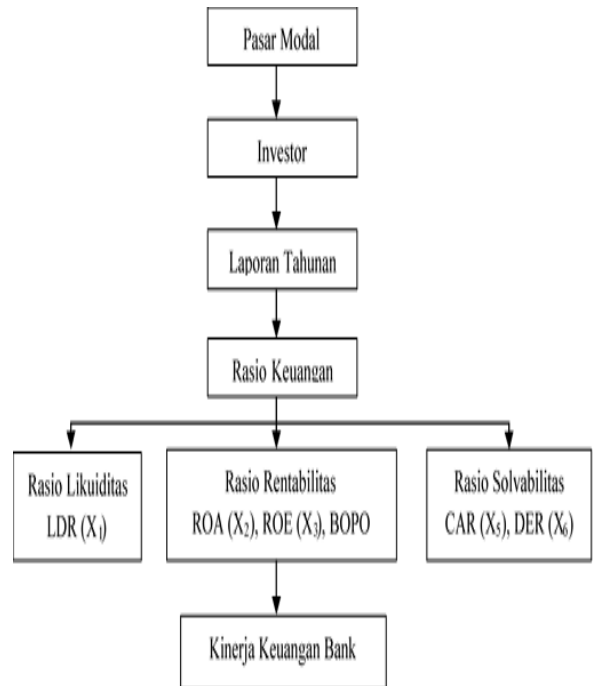
Menurut Kasmir (2012:328) dalam Mewengkang (2013:349) "Rasio yang digunakan untuk utang dengan ekuitas". Menurut (Hery., 2015) "Semakin tinggi *debt to equity ratio* maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan jaminan utang". Perhitungan *Debt to Equity Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisa perbandingan kinerja keuangan antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. periode 2013-2017 menggunakan rasio keuangan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan masing-masing bank periode 2013-2017 pada situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Menjelaskan kronologis penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian (dalam bentuk algoritma, Pseudocode atau lainnya), bagaimana untuk

menguji dan akuisisi data. Deskripsi dari program penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasan tersebut dapat diterima secara ilmiah.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori diatas dapat dirumuskan hipotesis, terdapat perbedaan secara simultan maupun parsial antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Rasio Biaya Operasional (BOPO), Capital Adequency Ratio (CAR), Debt to Equity Ratio (DER).

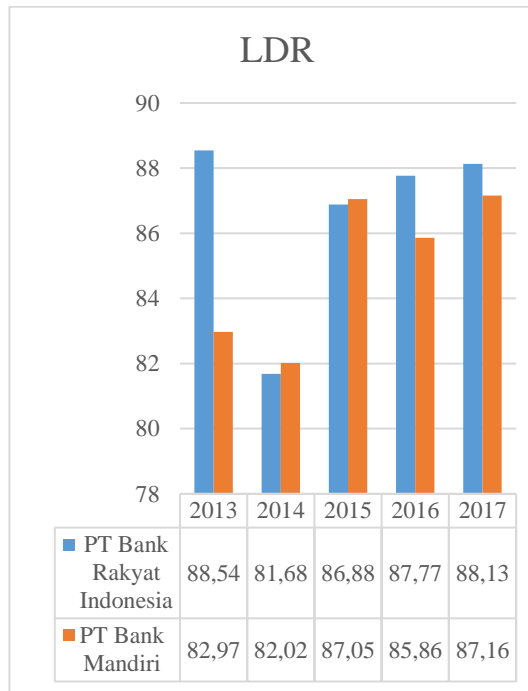
### 2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji One Way Anova dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05, jika nilai t hitung signifikansi < 0.05 maka terdapat perbedaan kinerja keuangan antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., namun jika nilai t hitung signifikansi > 0.05 maka tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Berdasarkan data yang telah diolah maka didapatkan hasil sebagai berikut:

### 3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Berikut adalah grafik perkembangan LDR PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017:



Grafik 1 Perkembangan LDR PT Bank Mandiri Tbk. Dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017

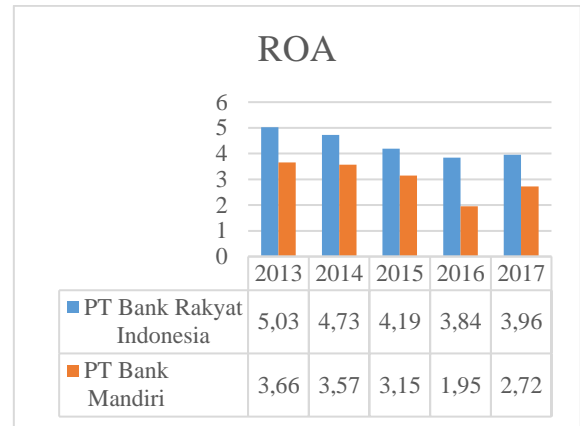
Berdasarkan grafik 1 diatas nilai rata-rata antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan Bank Mandiri Tbk. masing-masing 86.60 dan 85.01, sehingga dapat disimpulkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. memiliki resiko yang lebih tinggi karena nilai kredit yang lebih tinggi dari nilai deposit yang dimiliki bank tersebut.

### 4. Return on Assets (ROA)

Berikut adalah grafik perkembangan ROA PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017:

### 5. Return on Assets (ROA)

Berikut adalah grafik perkembangan ROA PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017:

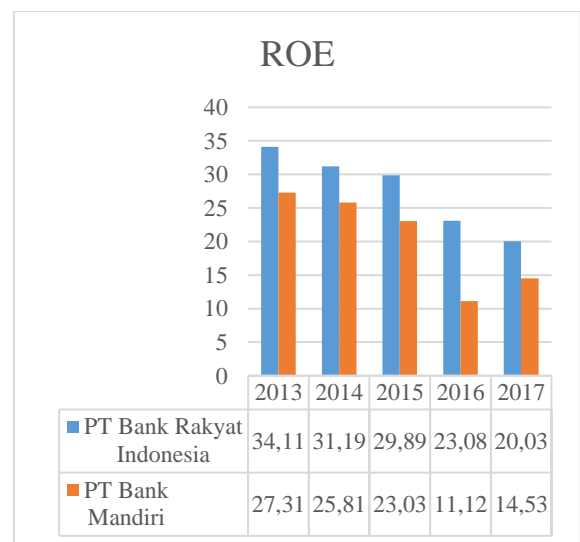


Grafik 2 Perkembangan ROA PT Bank Mandiri Tbk. Dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017

Berdasarkan grafik 2 diatas nilai rata-rata antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan Bank Mandiri Tbk. masing-masing 4.35 dan 3.01, sehingga dapat disimpulkan kemampuan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dalam memperoleh keuntungan lebih unggul dari PT Bank Mandiri Tbk.

### 6. Return on Equity (ROE)

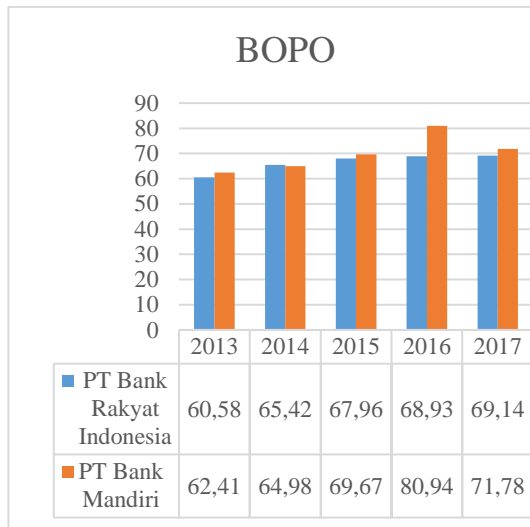
Berikut adalah grafik perkembangan ROE PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017:



Grafik 3 Perkembangan ROE PT Bank Mandiri Tbk. Dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017

### 7. Rasio Biaya Operasional (BOPO)

Berikut adalah grafik perkembangan BOPO PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017:

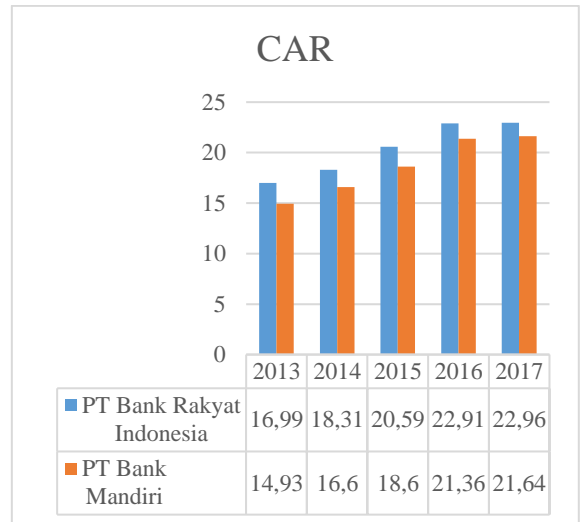


Grafik 4 Perkembangan BOPO PT Bank Mandiri Tbk. Dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017

Berdasarkan grafik 4 diatas nilai rata-rata antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan Bank Mandiri Tbk. masing-masing 66.41 dan 69.96, sehingga dapat disimpulkan PT Bank Mandiri Tbk. lebih unggul dalam mengelola kegiatan operasionalnya dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

### 8. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Berikut adalah grafik perkembangan CAR PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017:

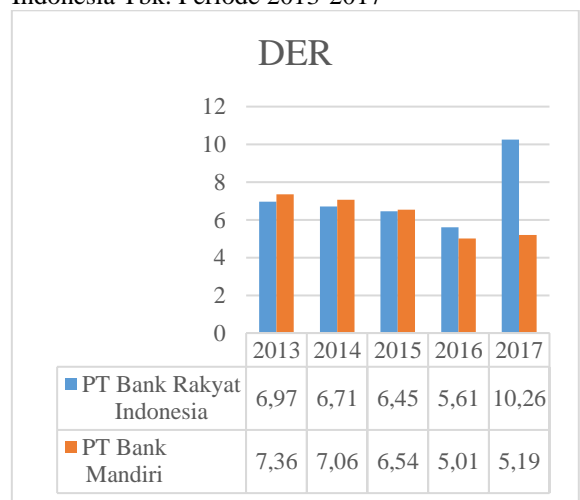


Grafik 1 Perkembangan CAR PT Bank Mandiri Tbk. Dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017

Berdasarkan grafik 5 diatas nilai rata-rata antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan Bank Mandiri Tbk. masing-masing 20.35 dan 18.63, sehingga dapat disimpulkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. memiliki kecukupan modal yang lebih unggul sehingga lebih dapat meminimalisasi resiko dari kredit produktif yang beresiko dibandingkan PT Bank Mandiri Tbk.

### 9. Debt to Equity Ratio (DER)

Berikut adalah grafik perkembangan DER PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017



Grafik 6 Perkembangan DER PT Bank Mandiri Tbk. Dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2013-2017

Berdasarkan grafik 6 diatas nilai rata-rata antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan Bank Mandiri Tbk. masing-masing 7.20 dan 6.23, sehingga dapat disimpulkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. memiliki resiko lebih tinggi dalam menanamkan saham dibandingkan PT Bank Mandiri Tbk.

#### 10. Uji *One Way Anova*

Guna mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. maka dilakukan pengujian menggunakan uji *One Way Anova*, jika nilai sig. < 0.05 maka  $H_0$  diterima yang artinya terdapat perbedaan kinerja keuangan antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. periode 2013-2017, namun jika nilai sig. > 0.05 maka  $H_0$  ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. periode 2013-2017.

#### 11. Pengujian Secara Simultan Terhadap Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Mandiri Tbk. Dengan Bank Rakyat Indonesia Periode 2010-2017

Berikut adalah tabel pengujian *One Way Anova* secara simultan:

Tabel 1 Pengujian *One Way Anova* Secara Simultan

ANOVA					
	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Between Groups</i>	58237.790	5	11647.558	681.489	.000
<i>Within Groups</i>	922.932	54	17.091		
<i>Total</i>	59160.722	59			

Berdasarkan tabel 1 diatas, secara simultan dapat disimpulkan adanya perbedaan kinerja keuangan antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. periode 2013-2017 yang diukur menggunakan rasio keuangan LDR ( $X_1$ ), ROA ( $X_2$ ), ROE ( $X_3$ ), BOPO ( $X_4$ ), CAR ( $X_5$ ), DER( $X_6$ ), karena nilai t hitung  $0.000 < 0.05$ .

#### Pengujian Secara Parsial Terhadap Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Mandiri Tbk. Dengan Bank Rakyat Indonesia Periode 2010-2017

Berikut adalah pengujian *One Way Anova* secara parsial:



**Tabel 2 Pengujian One Way Anova Secara Parsial**

		ANOVA				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
LDR	Between Groups	6.304	1	6.304	.928	.364
	Within Groups	54.366	8	6.796		
	Total	60.671	9			
ROA	Between Groups	4.489	1	4.489	11.939	.009
	Within Groups	3.008	8	.376		
	Total	7.497	9			
ROE	Between Groups	133.225	1	133.225	3.110	.116
	Within Groups	342.730	8	42.841		
	Total	475.955	9			
BOPO	Between Groups	31.506	1	31.506	.981	.351
	Within Groups	256.934	8	32.117		
	Total	288.441	9			
CAR	Between Groups	7.448	1	7.448	.943	.360
	Within Groups	63.199	8	7.900		
	Total	70.647	9			
DER	Between Groups	2.343	1	2.343	1.078	.329
	Within Groups	17.379	8	2.172		
	Total	19.722	9			

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat disimpulkan adanya perbedaan kinerja keuangan antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. yang diukur menggunakan rasio keuangan ROA ( $X_2$ ) dengan nilai 0.009, dimana nilai signifikansi ROA < nilai t hitung. Sedangkan untuk LDR ( $X_1$ ), ROE ( $X_3$ ), BOPO ( $X_4$ ), CAR ( $X_5$ ), DER( $X_6$ ), tidak memiliki perbedaan kinerja keuangan karena nilai signifikansi masing-masing variabel > nilai t hitung.

**PENUTUP**

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. lebih unggul dari pada PT Bank Mandiri Tbk. jika diukur menggunakan ROA ( $X_2$ ), ROE ( $X_3$ ), CAR ( $X_5$ ), namun PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. memiliki resiko yang lebih tinggi dalam pengelolaan beban operasionalnya terhadap pendapatan dan pengelolaan likuiditasnya karena nilai kredit yang diberikan lebih besar dari nilai likuiditas yang dimiliki.
2. Kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio keuangan LDR ( $X_1$ ), ROA ( $X_2$ ), ROE ( $X_3$ ), BOPO ( $X_4$ ), CAR ( $X_5$ ) dan DER ( $X_6$ ). Secara simultan terdapat perbedaan kinerja keuangan antara PT Bank Mandiri Tbk. dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. periode 2017, sedangkan dalam pengujian secara parsial terhadap masing-masing variabel, hanya ROA ( $X_2$ ) yang memiliki perbedaan kinerja keuangan dengan nilai signifikansi  $0.009 < 0.05$ .

3. Penelitian ini adalah perbandingan kinerja dua bank dengan menggunakan 3 jenis rasio keuangan diantaranya rasio likuiditas, rasio rentabilitas dan rasio solvabilitas, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan gunakan data terbaru supaya dapat menginformasikan kondisi terkini pada masyarakat khususnya para pelaku bisnis sehingga mereka dapat lebih menimbang dalam menanamkan dananya pada perusahaan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Wangsawidjaja. (2012). Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
Hery. (2015). Analisis Kinerja Manajemen. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.  
Ningsih, Widya Wahyu. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia. Makasar: Universitas Hasanuddin, Skripsi S1 Program Studi Manajemen.  
Mewengkang, Yves Regina. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah Dan Bank Umum Swasta Nasional Yang Tercatat Di BEI. Jurnal Emba. Vol. 1 No. 4 Desember 2013, Hal. 344-354.  
<https://www.merdeka.com/uang/catatan-lengkap-ojk-soal-kondisi-perbankan-dan-pasar-modal-sepanjang-2017.html>. Catatan

Lengkap OJK Soal Kondisi Perbankan Dan Pasar Modal Sepanjang 2017. Diakses pada 01 Juni 2018.

Margaretha, Farah. (2009). Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Samryn. (2012). Akuntansi Manajemen: Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi Dan Informasi. Jakarta: Kencana.

<http://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>. Laporan Keuangan Dan Tahunan BBRI dan BMRI Periode 2017. Diakses pada 01 Juni 2018.

#### **PROFIL PENULIS**

Fazhar Sumantri, pria kelahiran 07 April 1983 di Tokyo Jepang ini sekarang mengambil profesi

sebagai seorang dosen di AMIK BSI Jakarta dan STIMIK Nusa Mandiri Jakarta, telah menyelesaikan pendidikannya sarjananya di Universitas Trisakti jurusan Finance dengan double degree program di Edith Cowan University jurusan E-Commerce dan melanjutkan pendidikan masternya di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Finance and Wealth Management.

Dwi Apriliani, wanita kelahiran 15 April 1996 di Jakarta ini telah menyelesaikan pendidikan diploma di AMIK BSI Jakarta jurusan Manajemen Informatika dan sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta serta melanjutkan pendidikannya di STIMIK Nusa Mandiri Jakarta jurusan Sistem Informasi.

## **Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian**

**Dinar Riftiasari**

Akademi Manajemen dan Keuangan BSI Jakarta

Email: [dinar.drf@bsi.ac.id](mailto:dinar.drf@bsi.ac.id)

---

**Cara Sitasi:** Riftiasari, D. (2018). Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian. *Moneter*, 5(2), 39–44.

---

**Abstract** - Tax is a contribution collected by the state from the central government and regional governments based on the Law, the cutting and collection of income tax for expenses derived from the State Budget by the treasurer of the Central Government and the Regions. The purpose of this study was to determine the procedure for the cutting and collection of income tax. Income tax (PPh) of Article 22 for the procurement of goods at the Ministry, income tax (PPh) of Article 23 for rent and other income in connection with the use of property, and income Tax (PPh) of Article 4 paragraph (2) for construction services. The analysis method used is descriptive method. The conclusion of the research on the purchase of goods with funds from state spending or shopping areas subject to Income Tax Article 22 amounting to 1.5% of the purchase price already have a taxpayer identification number (NPWP), Cutting of income tax article 23 for rent and other income in connection with the use of property amounting to 2% from total gross, construction service can be charged income tax based on article 4 paragraph 2 which is final. The cutting and collection of income tax is in accordance with the provisions of taxation Income Tax Law number 36 Year 2008.

**Keywords:** income tax cuts and collection, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 paragraph 2

### **PENDAHULUAN**

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun berdasarkan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) (Marina, Rachmat, & Lukas, 2013) Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. (Sorongan, 2014)

Menurut (Marina et al., 2013) Sistem administrasi perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu *withholding tax*. Penerapan *withholding tax system* di Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Di dalam sistem ini, undang-undang merujuk satu pihak yang biasanya merupakan sumber penghasilan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan kepada pihak lain yang menerima penghasilan. Sistem ini diterapkan biasanya merupakan sumber penghasilan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan kepada pihak lain yang menerima penghasilan. Sistem ini diterapkan agar wajib pajak langsung membayar pajak penghasilan ketika menerima penghasilan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bendaharawan pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendaharawan pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak, bendaharawan harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. (Tumbel, Karamoy, & Tirayoh, 2017)

### **1. Pajak Penghasilan**

#### **A. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. (Waluyo, 2010)

#### B. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan dalam (Lestari et al., 2017) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

C. Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak  
Mekanisme pemotongan/pemungutan secara umum menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) antara lain:

- a. Pemotong/pemungut pajak memotong/memungut pajak atas pemberian penghasilan dari suatu transaksi tertentu dengan tarif yang ditentukan.
- b. Pemotong/pemungut pajak menyetorkan dan melaporkan pemotongan/pemungutan pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Bagi WP yang dipotong/dipungut pajaknya, nilai tersebut merupakan kredit pajak (pengurang pajak terutang) atau *prepaid taxes* di SPT Tahunan pada akhir tahun pajak.
- d. Bagi WP yang atas penghasilannya dikenakan PPh bersifat final, nilai yang dipotong/dipungut oleh pihak lain merupakan pelunasan PPh yang terutang dan bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

#### D. Hak dan Kewajiban Bendaharawan Selaku Wajib Potong/Pungut

Sebagai pemungut dan pemotong pajak-pajak negara, maka bendaharawan pemerintah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

Hak wajib pajak

- a. Perlindungan atas kerahasiaan data wajib pajak
- b. Penundaan pembayaran
- c. Pengangsuran pembayaran
- d. Pembebasan pajak
- e. Penundaan pelaporan SPT Tahunan

- f. Restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- g. Insentif perpajakan
- h. Kewajiban wajib pajak
- i. Memiliki NPWP
- j. Melaksanakan pemotongan/pemungutan pajak
- k. Melaksanakan penyetoran atau pembayaran pajak
- l. Melaksanakan pelaporan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan

## 2. Pajak Penghasilan Pasal 22

### A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) PPh Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh pemungut PPh Pasal 22 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

### B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) Pajak penghasilan pasal 22 yang berkenaan dengan bendaharawan pemerintah yakni berupa pembayaran atas barang yang jumlahnya lebih dari Rp 2.000.000 meskipun pembayarannya terpecah-pecah. PPh Pasal 22 dikecualikan atas:

- a. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air PDAM, dan benda-benda pos.
- b. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Bulog.
- d. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- e. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang tertuang pajak penghasilan.
- f. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai

### C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 Bendaharawan dan BUMN/BUMD menurut (Pohan, 2016) Atas pembayaran untuk pembelian atau penyerahan barang yang dibebankan ke APBN/D, besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah sebesar 1,5% dari harga beli yang dipungut pada saat pembayaran. Pemungutan dilakukan oleh Ditjen Anggaran, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), atau BUMN/D yang dananya berasal dari APBN/D.

Tarif dikenakan atas pembelian barang sebesar 1,5% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) bila rekanan penyedia barang/jasa memiliki NPWP. Namun bila rekanan penyedia barang/jasa tidak memiliki NPWP, sesuai pasal 22 ayat 3 UU 36 Tahun 2008, maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi yaitu sebesar 3% berdasarkan (Bawono & Novelsyah, 2016)

#### D. Kewajiban Bendaharawan

Kewajiban Bendaharawan Menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

- a. Memungut PPh Pasal 22 dari rekanan atau penyedia barang.
- b. Menyetorkan PPh Pasal 22 yang terutang ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Memberikan bukti pemungutan PPh Pasal 22 kepada Waib Pajak.
- d. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

#### E. Mekanisme Peyetoran dan Pelaporan

Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 menurut Bawono dan Mochamad Novelsyah (2016:95) antara lain:

- a. Penyetoran PPh Pasal 22 terutang melalui bank persepsi atau kantor pos dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Bila penyetoran terlambat dari hari pembayaran maka dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
- b. Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Masa yang melebihi tanggal tersebut dikenakan denda sebesar Rp 100.000.-

### 3. Pajak Penghasilan Pasal 23

#### A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) PPh Pasal 23 adalah Pajak yang harus dipotong oleh Pemotong atas pembayaran bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, dan jasa (selain jasa yang dipotong PPh Pasal 21).

#### B. Objek Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Sesuai pasal 23 UU. No 36 tahun 2008 terutang PPh dalam (Bawono & Novelsyah, 2016), Objek dan tarif PPh Pasal 23 yaitu:

- a. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21.
- b. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain yang telah dikenai PPh 4 ayat 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.
- c. Jenis jasa yang menjadi objek PPh pasal 23 merupakan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

#### C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh pasal 23 sesuai UU. No 36 tahun 2008 terutang PPh dalam (Bawono & Novelsyah, 2016), terdiri atas:

- a. Tarif 15% untuk objek pajak berupa Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21.
- b. Tarif 2% untuk objek pajak berupa Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain yang telah dikenai PPh 4 ayat 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.
- c. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif normal. Tarif dikenakan dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

#### D. Kewajiban Bendaharawan

Kewajiban Bendaharawan Menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

- a. Memotong PPh Pasal 23 dari Wajib Pajak.
- b. Menyetorkan PPh Pasal 23 yang terutang ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- d. Memberikan Bukti Potong pada Rekanan.

#### E. Mekanisme Peyetoran dan Pelaporan

Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

- a. Penyetoran PPh Pasal 23 terutang melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bila penyetoran terlambat dari tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
- b. Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Masa yang melebihi tanggal jatuh tempo tersebut dikenakan denda sebesar Rp 100.000.-

### 4. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2

#### A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Menurut (Setiawan & Fitriandi, 2017) PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final adalah Pajak yang bersifat final (rampung) yang dikenakan atas penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam (Barata, 2011) objek pajak berupa:

- a. Bunga Deposito dan tabungan lainnya
- b. Bunga Obligasi dan surat utang negara
- c. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

- d. Penghasilan berupa hadiah undian
- e. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
- f. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
- g. Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- h. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
- i. Usaha jasa konstruksi
- j. Usaha *real estate*
- k. Persewaan tanah dan/atau bangunan
- l. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah

C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Tarif untuk pengenaan pajak sesuai objek penghasilan yang terkait dengan bendaharawan sebagai berikut:

Tabel 1 Tarif PPh 4 Ayat 2

No	Jenis Penghasilan	Tarif
1	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	5%
2	Persewaan Tanah dan Bangunan	10%
3	Kegiatan Konstruksi, Meliputi:	
a	Jasa pelaksana Konstruksi tidak memiliki kualifikasi	4%
b	Jasa pelaksana Konstruksi kualifikasi usaha kecil	2%
c	Jasa pelaksana Konstruksi kualifikasi usaha besar dan menengah	3%
d	Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi berkualifikasi usaha	4%
e	Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
4	Hadiah atas undian	25%

Sumber (Bawono & Novelsyah, 2016)

D. Kewajiban Bendaharawan

Kewajiban Bendaharawan Menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

- a. Memotong PPh Pasal 4 (2) dari Wajib Pajak.
- b. Menyetorkan PPh Pasal 4 (2) yang terutang ke bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- c. Menyerahkan Bukti Potong PPh Pasal 4 (2) kepada Wajib Pajak.
- d. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

E. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan

Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 (2) menurut (Bawono & Novelsyah, 2016) antara lain:

- a. Penyetoran PPh Pasal 4 (2) terutang melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bila penyetoran terlambat dari tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dari nilai pajak terutang.
- b. Penyampaian SPT Masa melalui KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Penyampaian SPT Masa yang melebihi tanggal jatuh tempo tersebut dikenakan denda sebesar Rp 100.000.-

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif, merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar cara dalam pengambilan data dan informasi. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan final dan tidak final yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kementerian tahun pajak 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian atas pembelian barang dikenakan tarif sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bila rekanan memiliki NPWP dan bila tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi yaitu sebesar 3%. Saat terutang dan dipungut PPh Pasal 22 pada saat pembayaran. Berikut ini tabel jumlah pemungutan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Tabel 2 Pemungutan dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 Tahun 2017

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipungut	Lapor
Januari	-	-	-
Februari	1.274.189.160	19.112.838	16 Maret 2017
Maret	1.914.963.920	28.724.459	17 April 2017
April	1.031.894.120	15.491.476	10 Mei 2017
Mei	1.622.051.790	24.330.780	09 Juni 2017
Juni	639.837.450	9.597.565	18 Juli 2017
Juli	444.496.390	6.667.472	21 Agustus 2017
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Sumber: Bendahara SK Operasi dan Pemeliharaan

Berdasarkan Tabel 2 pemungutan PPh Pasal 22 tahun 2017 oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian melakukan pemungutan atas penyerahan barang kepada rekanan atau penyedia barang dari rekanan yang memiliki NPWP untuk masa pajak Januari sampai dengan Juli. Pemungutan pembelian barang kepada rekanan atau penyedia barang atas penyerahan barang untuk masa pajak Februari sampai dengan Juli dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sehingga dapat dijelaskan dari tabel 2 diatas bahwa perhitungan pemungutan PPh Pasal 22 atas nilai objek pajak dengan PPh yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran tahun 2017 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Pemungutan PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final oleh karena itu, pemungutan PPh Pasal 22 tersebut merupakan kredit pajak bagi Wajib Pajak yang dipungut (Penjual).

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian tahun 2017 untuk masa pajak Februari sampai dengan Juli telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yaitu penyampaian menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 22 kode formulir F.1.1.32.02 dan dilengkapi dengan dokumen berupa SSP sebagai bukti pemungutan melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## 2. Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bila rekanan memiliki NPWP dan bila tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi yaitu sebesar 4%. Saat terutang PPh Pasal 23 pada saat penghasilan tersebut dibayarkan Bendaharawan kepada Wajib Pajak, dan besarnya pajak terutang langsung dipotong oleh Bendaharawan. Berikut ini tabel jumlah pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Tabel 3 Pemotongan dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2017

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)	Lapor
Januari	-	-	-
Februari	96.994.000	1.939.880	16 Maret 2017
Maret	2.259.444.910	45.188.903	17 April 2017
April	1.135.855.410	22.717.108	10 Mei 2017
Mei	2.785.373.220	55.707.465	14 Juni 17
Juni	965.798.280	19.255.988	18 Juli 2017
Juli	993.525.400	19.870.498	21 Agustus 2017
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Sumber: Bendahara SK Operasi dan Pemeliharaan Berdasarkan Tabel 3 pemotongan PPh Pasal 23 tahun 2017 oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian melakukan pemotongan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dari rekanan yang memiliki NPWP untuk masa pajak Januari sampai dengan Juli. Pemotongan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kepada wajib pajak rekanan masa pajak Februari sampai dengan Juli dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Kemudian Bendahara Pengeluaran membuat daftar bukti pemotongan dan mengisi dengan benar dan lengkap bukti pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan bentuk dan isian yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada Wajib Pajak rekanan sebagai bukti pemotongan. Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta bersifat tidak final kecuali sewa dan penghasilan lain atas sewa tanah dan atau

bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final, sehingga dapat dijelaskan dari tabel 3 diatas bahwa perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 oleh bendahara pengeluaran tahun 2017 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta tahun 2017 untuk masa pajak Februari sampai dengan Juli telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yaitu penyampaian menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 23 kode formulir F.1.1.32.03 dan dilengkapi dengan dokumen berupa SSP dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## 3. Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 oleh Bendahara Pengeluaran Kementerian atas jasa konstruksi baik dari pelaksana maupun pengawasan. Besarnya pajak penghasilan yang terutang untuk pelaksanaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi besar dikenakan tarif sebesar 3% dan untuk pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif sebesar 4% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Saat terutang PPh Pasal 4 ayat 2 pada saat penghasilan tersebut diterima Wajib Pajak dan Bendaharawan langsung memotong penghasilan tersebut sesuai pajak terutang. Berikut ini tabel jumlah pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dimana Bendahara Pengeluaran Kementerian sebagai pengguna jasa pemotong PPh Pasal 4 ayat 2.

Tabel 4 Pemotongan dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2017

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)	Lapor
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	3.423.294.080	111.286.654	17 April 2017
April	568.158.360	17.044.751	10 Mei 2017
Mei	2.981.866.690	89.456.001	14 Juni 2017
Juni	4.400.757.790	132.022.734	18 Juli 2017
Juli	2.420.421.010	72.612.632	21 Agustus 2017
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Sumber: Bendahara SK Operasi dan Pemeliharaan

Berdasarkan Tabel 4 pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2017 oleh bendahara pengeluaran menunjukkan pemotongan atas jasa konstruksi kepada rekanan masa pajak Februari sampai dengan Juli dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebagai pelaksana konstruksi pengguna jasa sebagai pemotong PPh sebesar 3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jasa konstruksi sebagai pengawas konstruksi pengguna jasa sebagai pemotong PPh sebesar 4% kemudian Bendahara pengeluaran membuat daftar

bukti pemotongan dan mengisi dengan benar dan lengkap bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan bentuk dan isian yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada rekanan sebagai bukti pemotongan, sehingga dapat dijelaskan dari tabel 4 di atas bahwa perhitungan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 oleh bendahara pengeluaran tahun 2017 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut bersifat final.

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tahun 2017 untuk masa pajak Februari sampai dengan Juli telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 yaitu penyampaian menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 kode formulir F.1.1.32.04 dan dilengkapi dengan dokumen berupa SSP dan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan final dan tidak final tahun pajak 2017 oleh bendahara pengeluaran kementerian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan dan Pelaporan SPT Masa PPh 22 oleh bendahara pengeluaran kementerian telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dalam melakukan Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final atas pembelian barang dipungut sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 menggunakan formulir F.1.1.32.02 dilengkapi dengan SSP melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Pemotongan dan Pelaporan SPT Masa PPh 23 oleh bendahara pengeluaran kementerian telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dalam melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 menggunakan formulir F.1.1.32.03 dilengkapi dengan SSP dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3. Pemotongan dan Pelaporan SPT Masa PPh final Pasal 4 ayat 2 oleh bendahara pengeluaran kementerian telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dalam melakukan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 bersifat final atas jasa konstruksi sebagai pelaksana konstruksi pengguna jasa sebagai pemotong PPh sebesar 3% dan jasa konstruksi sebagai pengawas konstruksi

pengguna jasa sebagai pemotong PPh sebesar 4% dari Dasar Pengenaan Pajak dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 menggunakan formulir F.1.1.32.04 dilengkapi dengan SSP dan Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2 melalui KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## REFERENSI

- Barata, A. A. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. (Z. dan M. E. Simatur, Ed.) (1 ed.). Jakarta.
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2016). *Perpajakan Untuk Bendaharawan*. (I. R. Bawono, Ed.) (Revisi). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lestari, D. P., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2017). Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus PT Batik Danar Hadi Solo). *Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 13(1), 84–91. <https://doi.org/10.1534/g3.118.200372>
- Marina, Rachmat, K., & Lukas, T. (2013). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Pada PT. BIN (PERSERO) Di Tahun 2012. *Ilmiah*, 17(2), 41–47.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Keempat). Jakarta: PT Gramedia.
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas Tuntas PPh POTPUT*. (E. S. Suharsi, Ed.) (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sorongan, C. T. (2014). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *EMBA*, 2(1), 704–714.
- Tumbel, A., Karamoy, H., & Tirayoh, V. (2017). Evaluasi Mekanisme Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 553–564.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2008).
- Waluyo. (2010). *Akuntansi Pajak*. (Ema Sri Suharsi, Ed.) (3 ed.). Jakarta.

## PROFIL PENULIS

Dinar Riftiasari, Lulus S1 Akuntansi Univ Trisakti thn 2008, Lulus S2 Manajemen Univ Trisakti thn 2012, Dosen AMK BSI Jakarta jabatan fungsional Asisten Ahli



## **Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok Proses Pada PT. Persada**

**Dian Indah Sari**

AMIK BSI BEKASI  
Jl. Cut Mutiah No.88 Bekasi Timur  
e-mail : [dian.dhr@bsi.ac.id](mailto:dian.dhr@bsi.ac.id)

---

**Cara Sitasi:** Dian Indah Sari (2018) 'Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok Proses Pada PT. Persada', *Moneter*, 2(5), pp. 163–170.

---

**Abstract** - *Process processing in manufacturing companies can be divided into two major groups namely the production process by order and mass production process. This study aims to calculate the cost of production using the cost of process method at PT.Persada. The research method used in this research, among others, Field Research is to obtain data by coming directly to the company. Field research is conducted by interviewing the company's head and part directly involved with the research topic. Literature study is to obtain data by means of literature studies obtained from books and journals to obtain theories related to research topics. Data analysis is after obtaining the data then performed data analysis by calculating unit ekulivalensi and report cost of goods production. Based on the above discussion it can be concluded as follows: PT. Persada uses the calculation of the cost of production is still simple. Because in the calculation of the cost of production using the rate of market price changes. Calculation of cost of goods manufactured by the cost method of the process as follows: Total production cost assembly department is Rp 39.700.000. Number of production costs of the department of settlement is Rp 46.900.000. Total production costs as a whole is Rp 85.600.000. Apabila PT Persada using the method the cost of the process in calculating the cost of production will result in greater profits.*

**Keywords:** *Cost of Production, Cost of Process*

### **PENDAHULUAN**

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi dan memasarkan hasil produksinya tersebut. Ada tiga fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran dan fungsi administrasi dan umum.

Bagian yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi produksi dibagi menjadi dua kelompok yaitu bagian yang mengolah secara langsung bahan baku menjadi produk jadi dan bagian yang membantu menyediakan jasa untuk memperlancar proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kelompok pertama disebut departemen produksi dan kelompok kedua disebut departemen pembantu.

Secara garis besar proses pengolahan pruduk dalam perusahaan manufaktur dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu proses produksi berdasarkan pesanan dan proses produksi massa. Perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan mengumpulkan biaya produksinya dengan metode kos pesanan. Perusahaan yang proses produksinya berupa produksi massa mengumpulkan biaya produksinya dengan metode kos proses.

PT.Persada adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang produksi mainan anak.

Perusahaan memproduksi satu jenis produk mainan anak-anak dengan jumlah produksinya sama dan jenis produknya standar. Sehingga dalam prose produksi menggunakan harga pokok proses. Dalam proses produksi melalui dua departemen produksi yaitu departemen perakitan dan departemen penyelesaian. Karena sifat produksinya agak rumit tidak bisa dihindari terjadinya produk cacat. Penelitian ini mempunyai perumusan masalah yaitu untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses pada PT.Persada.

PT.Persada dalam menentukan harga pokok produksi hanya mengikuti taksiran dari perubahan harga pasar yang berlaku. Hal ini mengakibatkan kurang efisien dan efektif dalam menghitung harga pokok produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok proses pada PT. Persada.

### **1.Pengertian Harga Pokok Produksi**

Harga pokok produksi (Mulyadi, 2013) adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Harga pokok produksi adalah sejumlah biaya yang terjadi dan dibebankan dalam proses produksi.

## 2. Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi

Adapun metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi tersebut (Supriyono, 2013) adalah sebagai berikut :

### a. Metode Harga Pokok Pesanan (*Job Order Cost Method*)

Metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan harga pokok produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Pengolahan produk akan dimulai setelah datangnya pesanan dari langganan/pembeli melalui dokumen pesanan penjualan (*sales order*), yang memuat jenis dan jumlah produk yang dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan diterima dan harus diserahkan.

### b. Metode Harga Pokok Proses (*Process Cost Method*)

Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan harga pokok produk dimana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya : bulan, triwulan, semester, tahun. Pada metode harga pokok proses perusahaan menghasilkan produk yang homogen, bentuk bersifat standar, dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Tujuan produksi untuk mengisi persediaan yang selanjutnya akan dijual kepada pembeli, oleh karena itu sifat produk homogen dan bentuknya standar maka kegiatan dilakukan secara kontinyu atau terus-menerus.

## 3. Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi

Dalam harga pokok produksi, biaya produksi yang bersangkutan dengan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi, biaya dalam perusahaan manufaktur dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok biaya menurut (Rudianto, 2013) sebagai berikut :

### a. Biaya Produksi, terdiri dari :

#### 1) Biaya Bahan Baku.

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi dalam volume tertentu.

#### 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung.

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi.

#### 3) Biaya *Overhead* Pabrik.

Biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Termasuk dalam kelompok biaya *overhead* pabrik ini adalah sebagai berikut :

a) Biaya bahan penolong (bahan tidak langsung) adalah bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk tertentu.

Bahan enolong merupakan unsur bahan baku yang tetap dibutuhkan oleh suatu produk jadi, tetapi bukan merupakan unsur utama.

b) Biaya tenaga kerja penolong (tenaga kerja tidak langsung) adalah pekerja yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan suatu barang tetapi tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi.

c) Biaya pabrikasi lain adalah biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja penolong.

### b. Biaya Nonproduksi, terdiri dari :

1) Biaya pemasaran adalah untuk menampung keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan demi mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke tangan pelanggan.

2) Biaya administrasi dan umum adalah untuk menampung keseluruhan biaya operasi kantor.

## 3. Laporan Biaya Produksi

Dalam penentuan Biaya proses, semua biaya yang dibebankan ke setiap departemen produksi dapat diikhtisarkan dalam laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen. Menurut Bustami (2013), Laporan biaya produksi setiap departemen memiliki format yang beragam, dengan informasi menunjukkan :

### a. Skedul Kuantitas

Memuat informasi produk dalam proses awal, produk masuk proses pada periode bersangkutan, produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang, produk dalam proses akhir, produk hilang, produk rusak dan produk cacat.

### b. Biaya dibebankan

Memuat informasi biaya produk dalam proses awal, biaya yang dibebankan dari departemen sebelumnya, biaya dibebankan periode bersangkutan, unit ekuivalensi dan biaya per unit masing-masing elemen biaya.

### c. Pertanggungjawaban Biaya

Memuat informasi biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang, biaya produk yang hilang akhir proses, biaya produk rusak, biaya produk cacat, biaya yang telah diserap produk dalam proses.

## 4. Metode Harga Pokok Proses

Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok (biaya produksi) yang berdasarkan atas proses atau departemen untuk suatu periode tertentu, biasanya satu bulan. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya produksi tidak langsung (*overhead*) yang dibebankan, dibebankan pada rekening-rekening barang dalam proses setiap departemen. Pada setiap akhir

periode, total harga pokok (biaya produksi) yang terjadi pada suatu departemen dibagi dengan jumlah unit yang selesai diproduksi akan menghasilkan harga pokok per unit departemen yang bersangkutan.

Karakteristik Penentuan Biaya proses menurut (Bustami & Nurlela., 2013) sebagai berikut :

- a. Aktivitas produksi bersifat terus menerus.
- b. Produksi bersifat massa dengan tujuan mengisi persediaan yang siap dijual.
- c. Produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relative homogeny dan berdasarkan standar.
- d. Biaya dibebankan kesetiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi.
- e. Pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu.

Karakteristik Metode Harga Pokok Proses menurut (Mulyadi, 2013) antara lain :

- a. Produk yang dihasilkan adalah produk standar.
- b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.
- c. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
- d. Mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi
- e. Menghitung harga pokok produksi per satuan dengan cara membagi total produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi biasanya akhir bulan.
- f. Perbedaan biaya produksi langsung dan biaya tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanyamenghasilkan satu jenis produk seperti perusahaan semen.

### 5. Metode Harga Pokok Proses-Produk Diolah Melalui Lebih Dari Satu Departemen Produksi.

Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, perhitungan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan oleh departemen produksi pertama sama dengan harga pokok produk yang diolah dalam satu departemen produksi.

Perhitungan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama telah merupakan produk jadi dari departemen sbelumnya, yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya, maka produk yang dihasilkan oleh departemen setelah

departemen pertama terdiri dari:

- a. Biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya.
- b. Biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dnegan standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, dalam hal ini perlu diperhatikan baiay yang dikeluarkan untuk memperbaiki rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki.

Faktor penyebab terjadinya produk cacat. menurut (Bustami & Nurlela., 2013) antara lain :

#### a. Bersifat normal

Dimana setiap proses produksi tidak buisa dihindari terjadinya produk cacat, maka biaya untuk memperbaiki produk cacat tersebut dibebankan ke setiap departemen dimana terjadinya produk cacat, dengan cara menggabungkansetiap elemen biaya yang dibebankan pada setiap departemen.

#### b. Akibat kesalahan

Dimana terjadinya produk cacat diakibatkan kesalahan dalam proses produksi seperti kurangnya perencanaan, kurangnya pengawasan dan pengendalian, kelalaian pekerja dan sebagainya. Maka biaya untuk memperbaiki produk cacat seperti ini tidak dibebankanke setiap lelemen biaya, tetapi dianngap sebagai kerugian perusahaan yang harus dimasukkan ke dal;am rekening rugi produk cacat.

### 6. Perhitungan Unit ekuivalen Produksi

Dalam perhitungan unit ekuivalen produksi , apabila terjadi produk cacat, akan diperhitungkan dalam unit ekuivalen, karena produk cacat tersebut telah menyerap biaya dimana terjadinya produk .cacat tersebut.

**Rumus :**

$\text{Produk Selesai} + (\text{PDP akhir} \times \text{Tingkat Penyelesaian}) + \text{Produk Cacat}$
---

Sumber : (Bustami & Nurlela., 2013)

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain riset lapangan yaitu memperoleh data dengan cara datang langsung ke perusahaan. Riset lapangan dilakukan dengan cara wawancara kepada pimpinan perusahaan dan bagian yang terlibat langsung dengan topik penelitian. Studi pustaka yaitu memperoleh data dengan cara studi literature yang diperoleh dari buku dan jurnal untuk memperoleh teori yang berhubungan dengan topik penelitian. Analisis data yaitu setelah memperoleh data maka dilakukan analisis data dengan cara

menghitung unit ekivalensi dan laporan harga pokok produksi

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

PT. Persada merupakan perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak hanya satu jenis dengan ukuran standar dan jumlah produksi setiap bulan sama. Mainan anak-anak yang diproduksi adalah mainan mobil-mobilan. Data yang penulis peroleh adalah data produksi dan biaya produksi bulan Agustus 2016. Adapun data produksi dan biaya produksi PT. Persada sebagai berikut:

**Tabel 1. PT.Persada Data Produksi Departemen Perakitan Bulan Agustus 2016**

	Departemen Perakitan	Departemen Penyelesaian
Produk yang dimasukkan ke dalam proses	20.000	
Produk selesai dan ditransfer ke departemen		
Penyelesaian	18.400	18.800
Produk selesai dan ditransfer ke gudang		17.600
<b>Produk dalam proseses akhir :</b>		
100 % BBahan, 75 % BKonversi	1.200	
100 % BBahan, 80 % BKonversi		1.000
Produk Cacat	400	200

Sumber : PT.Persada , 2016

**Tabel 4. PT.Persada Biaya Produksi Per Unit Departemen Perakitan Bulan Agustus 2016**

Jenis Biaya	Total	Unit ekuivalen	Biaya Produksi Per unit
Biaya Bahan		20.000	1.000
Biaya Tenaga Kerja	20.000.000	19.700	800
Biaya Overhead Pabrik	15.760.000	19.700	200
	3.940.000		
<b>Total</b>	<b>39.700.000</b>		<b>2.000</b>

Sumber : Data primer diolah, 2016

**Tabel 5. PT.Persada Perhitungan Harga Pokok Produksi Departemen Perakitan Agustus 2016**  
**Perhitungan Harga Pokok Produksi**

HP.Sesuai produk baik : 18.400 unit x 2.000	36.800.000
HP.Produk cacat : 400 x 2.000	<u>800.000</u>
HP.Sesuai ditransfer : 18.800 unit	<b>37.600.000</b>
HP. Produk dalam Proses	
Biaya Bahan : 100% x 1.200 x 1.000 =	1.200.000
Biaya Tenaga Kerja : 75% x 1.200 x 800 =	720.000
Biaya Overhead : 75% x 1.200 x 200 =	<u>180.000</u>
	<b>2.100.000</b>

**Tabel 2. PT. Persada Biaya Produksi Departemen Perakitan Bulan Agustus 2016**

Jenis Biaya	Departemen Perakitan	Departemen Penyelesaian
Biaya Bahan	20.000.000	
Biaya Tenaga Kerja	15.760.000	7.440.000
Biaya Overhead Pabrik	3.940.000	1.860.000
<b>Jumlah Biaya Produksi</b>	<b>39.700.000</b>	<b>9.300.000</b>

Sumber : PT. Persada , 2016

**Tabel 3. PT.Persada Unit Ekuivalensi Departemen Perakitan Bulan Agustus 2016**

Jenis Biaya	Jumlah Produksi Dept Perakitan	Unit Ekuivalensi
Bahan	18.400 + (100% x 1.200) + 400 =	20.000
Tenaga Kerja	18.400 + (75% x 1.200) + 400 =	19.700
Overhead Pabrik	18.400 + (75% x 1.200) + 400 =	19.700

Sumber : Data primer diolah, 2016

<b>Jumlah Biaya Produksi Departemen Perakitan</b>	<b>39.700.000</b>
---	-------------------

Sumber : Data primer, 2016

**Tabel 6. PT.Persada Laporan Biaya Produksi Departemen Perakitan Bulan Agustus 2016**

<b>PT.Persada</b>			
<b>Laporan Biaya Produksi</b>			
<b>Departemen Perakitan</b>			
<b>Bulan Agustus 2016</b>			
<b>1. Data Produksi</b>			
Produk masuk proses			20.000 unit
Produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian	18.400 unit		
Produk dalam proses ahir bulan dengan Tingkat penyelesaian BBB dan Penolong 100%	1.200 unit		
Biaya konversi 30 %			
Produk cacat	400 unit		
			20.000 unit
<b>2. Biaya Dibebankan</b>			
Jenis Biaya	Total	Unit ekuivalen	Biaya Produksi Per unit
Biaya Bahan	20.000.000	20.000	1.000
Biaya Tenaga Kerja	15.760.000	19.700	800
Biaya Overhead Pabrik	3.940.000	19.700	200
<b>Total</b>	<b>39.700.000</b>		<b>2.000</b>
<b>3. Perhitungan Harga Pokok Produksi</b>			
HP.Selesai produk baik : 18.400 unit x 2.000			36.800.000
HP.Produk cacat : 400 x 2.000			<u>800.000</u>
HP.Selesai ditransfer ke Dept Perakitan : 18.800 unit			<b>37.600.000</b>
HP. Produk dalam Proses			
Biaya Bahan : 100% x 1.200 x 1.000 = 1.200.000			
Biaya Tenaga Kerja : 75% x 1.200 x 800 = 720.000			
Biaya Overhead : 75% x 1.200 x 200 = <u>180.000</u>			2.100.000
<b>Jumlah Biaya Produksi Departemen Perakitan</b>			<b>39.700.000</b>

Sumber : Data primer diolah, 2016

**Tabel 7. Jurnal Pencatatan Biaya Produksi Departemen Perakitan Agustus 2016**

No	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	Produk Dalam Proses – Biaya Bahan	20.000.000	
	Produk Dalam Proses – Biaya Tenaga Kerja Produk Dalam Proses – BDP	15.700.000	
		3.940.000	
	Persediaan Bahan		20.000.000
	Biaya Gaji dan upah		15.700.000
	Biaya BOP		3.940.000
	(Mencatat pembebanan biaya)		
2	Persediaan Produk Dalam Proses	2.100.000	
	Produk Dalam Proses – Biaya Bahan		1.200.000
	Produk Dalam Proses – Biaya Tenaga Kerja		720.000
	Produk Dalam Proses – BDP		180.000
	(Mencatat produk dalam proses)		
3	Produk Dalam Proses – HP.Dep Penyelesaian		
	Produk Dalam Proses – Biaya Bahan	37.600.000	18.800.000
	Produk Dalam Proses – Biaya Tenaga Kerja		15.040.000
	Produk Dalam Proses – BDP		3.760.000
	(Mencatat produk selesai)		

**Keterangan**

Biaya Bahan = 20.000.000 – 1.200.000 = 18.800.000

Biaya Tenaga Kerja = 15.760.000 -- 720.000 = 15.040.000

BOP = 3.940.000 – 180.000 = 3.760.000

**Tabel 8. PT.Persada Unit Ekuivalensi Departemen Perakitan Departemen Penyelesaian Agustus 2016**

Jenis Biaya	Jumlah Produksi Dept Perakitan	Unit Ekuivalensi
Tenaga Kerja	$17.600 + (80\% \times 1.000) + 200 =$	18.600
Overhead Pabrik	$17.600 + (80\% \times 1.000) + 200 =$	18.600

Sumber : Data primer diolah, 2016

**Tabel 9. PT.Persada Biaya Produksi Per Unit Departemen Penyelesaian Bulan Agustus 2016**

Jenis Biaya	Total Biaya	Unit ekuivalen	Biaya Produksi Per unit
HP Dari Dept Perakitan	<b>37.600.000</b>	18.800	2.000
Tenaga Kerja	7.440.000	18.600	400
Overhead Pabrik	1.860.000	18.600	100
<b>Total</b>	<b>46.900.000</b>		<b>2.500</b>

Sumber : Data primer diolah, 2016

**Tabel 10. PT.Persada Perhitungan Harga Pokok Produksi Departemen Penyelesaian Agustus 2016**

<b>Perhitungan Harga Pokok Produksi</b>	
HP.Selesai produk baik : 17.600 x 2.500	44.000.000
HP.Produk cacat : 200 x 2.500	<u>500.000</u>
HP.Selesai ditransfer ke gudang : 17.800 unit	<b>44.500.000</b>
HP. Produk dalam Proses	
HP Dept Perakitan : 1.000 x 2.000 = 2.000.000	
Biaya Tenaga Kerja : 80% x 1.000 x 400 = 320.000	
Biaya Overhead : 80% x 1.000 x 100 = <u>80.000</u>	
	<b>2.400.000</b>
<b>Jumlah Biaya Produksi Departemen Penyelesaian</b>	<b>46.900.000</b>

Sumber : Data primer diolah, 2016

**Tabel 11. PT.Persada Laporan Biaya Produksi Departemen Penyelesaian Bulan Agustus 2016**

<b>PT. Persada Laporan Biaya Produksi Departemen Penyelesaian Bulan Agustus 2016</b>			
<b>1. Data Produksi</b>			
Jenis Biaya	Jumlah Produksi Dept Perakitan	Unit	Ekuivalensi
Tenaga Kerja	$17.600 + (80\% \times 1.000) + 200 =$	18.600	
Overhead Pabrik	$17.600 + (80\% \times 1.000) + 200 =$	18.600	
<b>2. Biaya Dibebankan</b>			
Jenis Biaya	Total Biaya	Unit ekuivalen	Biaya Produksi Per unit
HP Dari Dep Perakitan	37.600.000	18.800	2.000
Tenaga Kerja	7.440.000	18.600	400
Overhead Pabrik	1.860.000	18.600	100
<b>Total</b>	<b>46.900.000</b>		<b>2.500</b>
<b>3. Perhitungan Harga Pokok Produksi</b>			
HP.Selesai produk baik : 17.600 x 2.500		44.000.000	
HP.Produk cacat : 200 x 2.500		<u>500.000</u>	
HP.Selesai ditransfer ke gudang : 17.800 unit		<b>44.500.000</b>	
HP. Produk dalam Proses			
HP Dept Perakitan : 1.000 x 2.000 = 2.000.000			
Biaya Tenaga Kerja : 80% x 1.000 x 400 = 320.000			
Biaya Overhead : 80% x 1.000 x 100 = <u>80.000</u>			
			<b>2.400.000</b>
<b>Jumlah Biaya Produksi Departemen Penyelesaian</b>			<b>46.900.000</b>

Sumber : Data primer diolah, 2016

**Tabel 12. Jurnal Pencatatan Biaya Produksi Departemen Penyelesaian Agustus 2016**

No	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	Produk Dalam Proses – Biaya Tenaga Kerja Produk Dalam Proses – BDP	7.440.000	
	Biaya Gaji dan upah	1.860.000	7.440.000
	Biaya BOP		1.860.000
	(Mencatat pembebanan biaya)		
	Persediaan Produk Dalam Proses	2.400.000	
2	Produk Dalam Proses – Biaya Bahan		2.000.000
	Produk Dalam Proses – Biaya Tenaga Kerja		320.000
	Produk Dalam Proses – BDP		80.000
	(Mencatat produk dalam proses)		
	Produk Dalam Proses – HP.Dep Penyelesaian	44.500.000	
3	Produk Dalam Proses – Biaya Bahan		35.600.000
	Produk Dalam Proses – Biaya Tenaga Kerja		7.120.000
	Produk Dalam Proses – BDP		1.780.000
	(Mencatat produk selesai)		

**Keterangan**

Biaya Bahan = 37.600.000 – 2.000.000 = 35.600.000

Biaya Tenaga Kerja = 7.440.000 -- 320.000 = 7.120.000

BOP = 1.860.000 – 80.000 = 1.780.000

**KESIMPULAN**

Memberikan pernyataan bahwa apa yang Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: PT. Persada menggunakan perhitungan harga pokok produksi yang masih sederhana. Karena dalam perhitungan harga pokok produksi menggunakan tingkat perubahan harga pasar. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode harga pokok proses sebagai berikut : Jumlah biaya produksi departemen perakitan adalah Rp 39.700.000. Jumlah biaya produksi departemen penyelesaian adalah Rp 46.900.000. Jumlah biaya produksi secara keseluruhan adalah Rp 85.600.000. Apabila PT Persada menggunakan metode harga pokok proses dalam perhitungan harga pokok produksi maka akan menghasilkan laba perusahaan yang lebih besar

**PROFIL PENULIS**

DIAN INDAH SARI, SE.AK, MM. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Akuntansi di (UNSRI) Universitas Negeri Sriwijaya Palembang, lulus tahun 2000. Memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) di Universitas BSI Bandung, lulus tahun 2014. Saat ini bekerja sebagai dosen AMIK BSI Bekasi.

**REFERENSI**

- Bustami, B., & Nurlela. (2013). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mulyadi. (2013). *Akuntansi Biaya*. (5th ed.). Yogyakarta: STIM.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Supriyono. (2013). *Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: BPFE.



## Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Persero Di Bursa Efek Indonesia

Sri Rusiyati

STMIK Nusa Mandiri Jakarta  
e-mail: sri.siq@nusamandiri.ac.id

---

**Cara Sitasi:** Rusiyati, S. (2018) 'Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Persero Di Bursa Efek Indonesia', *Moneter*, 5(2), pp. 171–176.

---

**Abstract** - This research aims to determine the effect of financial ratios on profitability at state banks in the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research period is taken for 5 years starting from 2013 to 2017. Data collection in this research uses secondary data in the form of data collecting from the annual bank financial statement published on the Indonesia Stock Exchange and by each state-owned bank. The sample consisted of 4 state-owned banks i.e. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) and PT Bank Mandiri (Persero). The independent variables in this research is the financial ratio consisting of Net Interest Margin (NIM), Loan Deposit Ratio (LDR) and Operational Income to Operating Income (BOPO) which affect profitability, namely Return On Assets (ROA) as an independent variable, and the analysis has been done using multiple linear regression analysis. The result of this research shows that partially there is a positive and significant influence between NIM and LDR on ROA and there is a negative and significant influence between BOPO on ROA. Factors that affect on Profitability (ROA) can be explained by the independent variables of 98.2% caused by NIM, BOPO and LDR, while the remaining 1.8% is caused by other factors not included in this research such as inflation, monetary policy, exchange rate etc.

**Keywords:** NIM, BOPO, LDR, Profitabilitas, ROA

### PENDAHULUAN

Persaingan di industri perbankan saat ini begitu ketat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah bank yang beroperasi di Indonesia antara lain ditunjukkan oleh kelompok Bank Persero atau Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta Nasional yang terlihat dari besarnya jumlah total aset, penghimpunan dana pihak ketiga, dan pemberian kredit. Menghadapi persaingan yang ketat, meningkatkan dan menjaga kinerja perusahaan merupakan suatu tuntutan untuk dapat bertahan di industri perbankan.

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas: Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Publikasi Lain. Laporan keuangan bank menunjukkan kinerja keuangan bank dan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode (Rusiyati, 2018).

Informasi keuangan dalam laporan keuangan agar dapat bermanfaat untuk mengukur kondisi keuangan diperlukan analisis rasio keuangan diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas atau rentabilitas.

Rasio rentabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba dimana tujuan dari setiap perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan. Faktor rentabilitas merupakan faktor terpenting bagi para kreditur karena merupakan jaminan utama bagi para kreditur.

Menurut Kasmir dalam (Jumhana, 2017) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan

Hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Menurut (Wibowo & Syaichu, 2013) dikatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap ROA sedangkan variable CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh.

Menurut (Eng, 2013) dikatakan bahwa NIM, BOPO, LDR, NPL dan CAR secara bersama-sama ternyata berpengaruh signifikan, sehingga dapat diyakini memainkan peranan yang cukup penting dalam menentukan perubahan ROA.

Menurut (Yatiningsih, 2015) menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif signifikan dan dominan terhadap ROA. Variabel BOPO, LDR, dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Menurut (Harun, 2016) bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA/Return On Asset, NIM/Net Interest Margin tidak berpengaruh terhadap ROA/Return On Asset, Efisiensi operasi BOPO/Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional berpengaruh signifikan terhadap ROA/Return On Asset.

Menurut (Avrita & Pangestuti, 2016) dikatakan bahwa variabel LDR berpengaruh tidak signifikan dan negative terhadap variabel ROA pada bank go public dan LDR berpengaruh signifikan negative terhadap variable ROA pada bank non go public, NIM berpengaruh signifikan positif terhadap variabel ROA pada bank go public dan NIM berpengaruh tidak signifikan positif terhadap variabel ROA pada bank non go public, BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap variabel ROA pada bank go public dan BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap variabel ROA pada bank non go public.

Menurut (Avrita & Pangestuti, 2016) menyatakan berdasar hasil pengujian hipotesis 3a menunjukkan bahwa pada bank go public variabel LDR berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap variabel ROA pada bank go public, berdasar hasil pengujian hipotesis 3b menunjukkan bahwa pada bank non go public variabel LDR berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel ROA pada bank non go public, berdasar hasil pengujian hipotesis 5a menunjukkan bahwa pada bank go public variabel BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel ROA pada bank go public.

Menurut (Suwandi & Oetomo, 2017) dikatakan bahwa Hipotesis yang menyatakan bahwa variable bebas BOPO berpengaruh negative terhadap variable terikat ROA adalah diterima dan Hipotesis yang menyatakan bahwa variable bebas loan to deposit ratio berpengaruh positif terhadap variable terikat return on assets adalah ditolak.

Hal-hal sebagaimana diuraikan diatas yang melatar belakangi peneliti untuk membahas lebih jauh mengenai analisis pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas pada bank persero di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2017.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini ditekankan pada informasi keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yang ada dalam laporan keuangan tahunan bank persero yang terdaftar di Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi dan korelasi berganda yang berguna untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari NIM, BOPO dan LDR terhadap Profitabilitas yaitu ROA pada bank persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2017.

### 2. Variabel dan Pengukurannya

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Variabel Tidak Bebas atau Terikat (Dependent Variable)  
Rasio Profitabilitas yaitu ROA sebagai variabel tidak bebas (Y) dalam penelitian ini.
- b. Variabel Bebas (Independent Variable)  
Dalam penelitian ini yang dianggap mempengaruhi profitabilitas (ROA) terdiri dari:
  - 1) *Net Interest Margin* (NIM) dengan kode X1
  - 2) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dengan kode X2
  - 3) *Loan Deposit Ratio* (LDR) dengan kode X3

Model persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

- Y = Profitabilitas (ROA)
- a = Konstanta
- X<sub>1</sub> = *Net Interest Margin* (NIM)
- X<sub>2</sub> = Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
- X<sub>3</sub> = *Loan Deposit Ratio* (LDR)
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = Koefisien regresi
- e = Faktor pengganggu

Pendekatan regresi berganda pada profitabilitas menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Adapun variabel dan pengukurannya dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 : Variabel dan Pengukuran

Variabel	Indikator	Pengukuran
NIM	1. Pendapatan Bunga bersih	Rasio
	2. Aktiva Produktif	
BOPO	1. Beban Operasional	Rasio
	2. Pendapatan Operasional	
LDR	1. Total Kredit	Rasio
	2. Dana Pihak Ketiga	
ROA	1. Laba Bersih Sebelum Pajak	Rasio
	2. Total Aset	

### 3. Populasi

Populasi atau ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank berdasarkan kategori kelompok bank yang berjumlah enam kelompok bank yaitu Bank Persero atau Bank Umum Milik Negara (BUMN), Bank Umum Swasta

Nasional (BUSN) Devisa, BUSN Non – Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, Bank Asing. Menurut Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Desember 2017, jumlah bank umum yang beroperasi sebanyak 115 bank yang terdiri dari 4 Bank Persero, 42 BUSN Devisa, 21 BUSN Non Devisa, 27 BPD, 12 Bank Campuran, dan 9 Bank Asing.

#### 4. Sampel dan Penarikan Data

Dari beberapa kelompok bank yang termasuk dalam populasi perbankan tersebut, dipilih 1 kelompok bank yaitu bank persero atau Bank Umum Milik Negara (BUMN) yang tercatat di Bank Indonesia atau Bursa Efek Indonesia. Penentuan sample ini menggunakan purposive sampling atau pemilihan sample berdasarkan tujuan. Periode data yang digunakan oleh bank persero tersebut adalah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Sampel bank persero yang tercatat di Bank Indonesia atau Bursa Efek Indonesia berjumlah 4 bank ditunjukkan oleh Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 : Daftar Bank Persero di Bursa Efek Indonesia

No	Kode	Nama Perusahaan
1	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero)
4	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Desember 2017)

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder berasal dari laporan keuangan masing-masing bank yang telah dipublikasikan dan dari laporan keuangan idx di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2017.

Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui: Studi Kepustakaan yaitu penggalan sumber data data berasal juga berasal dari literatur, jurnal ilmiah, majalah koran, publikasi, membaca buku-buku referensi, buku-buku teori, internet dan berbagai informasi lainnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 6. Metode Analisis Data

Pengujian dilakukan sebagai berikut :

##### a. Perumusan Hipotesis

Ho = 0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara NIM, BOPO dan LDR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia.

Hi ≠ 0 Terdapat pengaruh yang signifikan antara NIM, BOPO dan LDR terhadap

Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia.

##### b. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi dalam model. Rumus uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-k-1}}{\sqrt{1-r^2}} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

t hitung = statistik student t hitung

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel independen

Untuk Hipotesis nol (Ho) di atas diterima atau ditolak digunakan kriteria pengujian sebagai berikut :

Jika t tabel > t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima

Jika t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak

##### c. Menentukan derajat signifikan (α) tingkat kesalahan yang dapat ditolerir, ditentukan sebesar α = 5%

##### d. Uji Statistik F

Koefisien korelasi berganda dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

R = Koefisien korelasi berganda

k = Jumlah variabel independen

n = jumlah anggota sampel

Pengujian terhadap signifikansi model matematis yang dipilih dilakukan dengan menggunakan uji F dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho : β<sub>1</sub> = β<sub>2</sub> = 0 artinya secara bersama-sama antara NIM, BOPO dan LDR yang terdapat dalam model tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia.

Hi : β<sub>1</sub> ≠ β<sub>2</sub> ≠ 0 Artinya secara bersama-sama variabel antara NIM, BOPO dan LDR yang terdapat dalam model berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia.

Hipotesis nol (Ho) di atas dapat diterima atau ditolak digunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima

F hitung < F tabel, maka Ho diterimadan  
Hi ditolak

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Analisis pengaruh NIM, BOPO dan LDR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013 sampai dengan 2017.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan dari keempat bank persero yang ada di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, hasil perhitungan analisis NIM, BOPO dan LDR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil perhitungan pengaruh antara NIM, BOPO

Keterangan	Nilai	Variabel		
		X <sub>1</sub> (NIM)	X <sub>2</sub> (BOPO)	X <sub>3</sub> (LDR)
Constant	6.535			
Coefficient		0.366	-0.108	0.022
Uji Statistikt (sig)		0.000	0.000	0.014
Uji Statistik t hitung		9.403	-11.296	2.747
R	0.991			
R Square	0.982			
F Hitung (Sig)	0.000			
F Hitung	295.568			

dan LDR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2013 sampai dengan 2017.

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Persero Terdaftar di BEI (data diolah kembali)

Uraian penjelasan Tabel 3. sebagai berikut:  
Pada bagian koefisien regresi dapat dilihat nilai konstanta sebesar 6.535, nilai β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub> dan β<sub>3</sub> adalah sebesar 0.366, -0.108 dan 0.022 dan maka persamaan yang diperoleh dari persamaan regresi berganda dari penelitian ini adalah :

$$\hat{Y} = 6.535 + 0.366X_1 - 0.108X_2 + 0.022X_3$$

T hitung (9.403) (-11.296) (2.747)

R<sup>2</sup> = 0.982  
F Hitung = 295.568

Dimana :

- Ŷ = Profitabilitas (ROA)
- X<sub>1</sub> = Net Interest Margin (NIM)
- X<sub>2</sub> = Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

X<sub>3</sub> = Loan Deposit Ratio (LDR)

Apabila dengan asumsi parameter lainnya konstan maka persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 6.535 menyatakan bahwa jika variabel independen sebesar nol, maka profitabilitas (ROA) yang terbentuk adalah 6.535.
- b. Koefisien regresi dari variable *Net Interest Margin* (NIM) β<sub>1</sub> = 0.366 menunjukkan bahwa apabila variabel NIM mengalami kenaikan sebesar 1 maka profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 0.366 dan sebaliknya apabila variabel NIM mengalami penurunan sebesar 1 maka profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0.366 .
- c. Koefisien regresi dari variable Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) β<sub>2</sub> = -0.108 menunjukkan bahwa apabila variabel BOPO mengalami kenaikan sebesar 1 maka profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0.108 dan sebaliknya apabila variabel BOPO mengalami penurunan sebesar 1 maka profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 0.108.
- d. Sedangkan koefisien regresi *Loan Deposit Ratio* (LDR) β<sub>3</sub>= 0.022 hal ini berarti bahwa apabila LDR mengalami kenaikan sebesar 1 maka profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 0.022 dan sebaliknya apabila LDR mengalami penurunan sebesar 1 maka profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 0.022.

2. Uji Statistik t

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan bilai t tabel dan t hitung atau dengan melihat nilai signifikansi t (sig-t). Pada analisis uji statistik t tersebut digunakan untuk melihat keberartian koefisien regresi dengan α = 10% dihasilkan t tabel = t0.05,16 = 1.746.

Hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung dan t hitung (sig) masing-masing variabel sebesar:

X1 (NIM) = 9.403 dan 0.000  
X2 (BOPO) = -11.296 dan 0.000  
X3 (LDR) = 2.747 dan 0.014

X<sub>1</sub> (NIM) dan X<sub>3</sub> (LDR) menunjukkan t hitung > t table atau 9.403 > 1,746 dan 2.747 > 1,746 dan t hitung (sig) < 0.10 atau 0.000 dan 0.014 < 0.10 berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *Net Interest Margin* (NIM) dan *Loan Deposit Ratio* (LDR) terhadap Profitabilitas (ROA).

Sedangkan X<sub>2</sub> (BOPO) menunjukan t hitung < t table atau -11.296 < 1,746 dan t hitung (sig) < 0.10 atau 0.000 < 0.10 berarti pengaruh antara Beban

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA) adalah negatif dan signifikan.

3. Hasil Nilai  $R^2$  yang tampak dalam persamaan di atas merupakan koefisien determinasi yang menunjukkan proporsi atau bagian dari perubahan dalam variabel tidak bebas secara bersama-sama terhadap variabel bebas.

R Square (koefisien determinasi) sebesar 0.982 (98.2%) menunjukkan bahwa variasi perubahan naik turunnya Profitabilitas (ROA) disebabkan oleh NIM, BOPO dan LDR sebesar 98,2% sedangkan sisanya sebesar 1,8 % disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti tingkat inflasi, kebijakan moneter, perubahan kurs dan sebagainya.

#### 4. Uji ANOVA atau F tes

Hipotesis uji Anova atau F-tes sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$  :

Tidakadapengaruhantara NIM, BOPO dan LDR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$  :

Ada pengaruh yang signifikan antara NIM, BOPO dan LDR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia.

Dengan menggunakan  $\alpha = 5\%$  dihasilkan  $F_{tabel} : F_{0.05(3,16)} = 3,24$ .

Hasil F hitung sebesar 295.568 menunjukan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $295.568 > 3.24$  atau F hitung (sig) sebesar 0.000 menunjukkan signifikansi karena lebih kecil dari 0.05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara NIM, BOPO dan LDR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

#### KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan dari hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Net Interest Margin* (NIM) dan *Loan Deposit Ratio* (LDR) terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Dengan demikian apabila Net Interest Margin (NIM) dan Loan Deposit Ratio (LDR) mengalami kenaikan maka Profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan dan sebaliknya apabila Net Interest Margin (NIM) dan Loan Deposit Ratio (LDR) mengalami penurunan maka Profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan.

2. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Persero di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Dengan demikian apabila BOPO mengalami kenaikan maka Profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan dan sebaliknya apabila BOPO mengalami penurunan maka Profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas (ROA) bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya sebesar 98,2 % disebabkan oleh NIM, BOPO dan LDR, sedangkan sisanya sebesar 1,2% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam estimasi ini seperti tingkat inflasi, kebijakan moneter, perubahan kurs dan sebagainya.

#### REFERENSI

- Arif Sugiono Dan Edu.U (2011). Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan, Jakarta: Grasindo
- Avrita, R. D., & Pangestuti, I. R. D. (2016). Analisis Pengaruh CAR, NPL, LDR, NIM, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank UmumGo Public Dan Bank Umum Non Go Public Di Indonesia Periode Tahun 2011-2014). *Diponegoro Journal Ofmanagement*, 5(2), 1–13.
- Eng, T. S. (2013). Pengaruh Nim, Bopo, Ldr, Npl & Car Terhadap Roa Bank Internasional Dan Bank Nasional Go Public Periode 2007 – 2011. *Dinamika Manajemen ISSN: 2338 – 123X*, 1(3), 153–167.
- Harun, U. (2016). Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL Terhadap ROA. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 67–82.
- Jumhana, C. S. (2017). Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Rasio Aktivitas Terhadap Profitabilitas Pada Koperasi Karyawan PT Surya Toto Indonesia. *Jurnal Sekuritas*, 11(22), 54–73.
- Laporan Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.tahun 2013-2017.
- Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2013-2017.
- Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero). tahun 2013-2017.
- Laporan Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tahun 2013-2017.
- Rusiyati, S. (2018). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Persero di Indonesia. *Cakrawala*, XVIII(1), 37–42. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/3268>

- Soentoro Ali Idris. (2003). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: CV Taramedia
- Suparmoko. M (1999). Metode Penelitian Praktis (edisi Keempat). Yogyakarta : BPFE
- Suwandi, J., & Oetomo, H. W. (2017). Pengaruh CAR, NPL, BOPO dan LDR Terhadap ROA Pada BUSN Devisa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 6(7), 1–21.
- Wibowo, E. S., & Syaichu, M. (2013). Analisis pengaruh suku bunga, inflasi, car, bopo, npf terhadap profitabilitas bank syariah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Yatiningsih. (2015). Analisis Pengaruh BOPO, LDR, NPL, Size, CAR dan NIM terhadap ROA (Studi pada Bank Umum Konvensional

Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013), 4(3), 1–10.

#### **PROFIL PENULIS**

**Sri Rusiyati**, lahir di Kebumen, 26 Mei 1969 dan menyelesaikan studi S2 tahun 2004 program studi Magister Manajemen pada Universitas Budiluhur. Saat ini aktif sebagai dosen di STMIK Nusa Mandiri Jakarta dan Universitas Bina Sarana Informatika.

## Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Impor Pada Kawasan Berikat

Indria Widyastuti<sup>1</sup>, Anis Sahara<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika  
e-mail: indria\_w2001@yahoo.com

<sup>2</sup>Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3i Jakarta  
e-mail: anis\_sahara@yahoo.com

---

**Cara Sitasi:** Widyastuti, I., & Sahara, A. (2018). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Impor Pada Kawasan Berikat. *Moneter*, 5(2), 177–184.

---

**Abstract** - The aim of the government to establish Kawasan Berikat (KB) is to increase efficiency by bringing the supply of raw materials to the needs of the domestic industry in a timely manner, as well as the availability of promotional facilities to support its marketing, which in turn is expected to increase the competitiveness of export products in the global market. Companies especially those engaged in manufacturing in carrying out their business activities certainly need raw materials. To get the raw material, the company must get it from another party by making a transaction called purchase. Purchase transactions can be classified into two, namely local purchases and import purchases. The issuance of the Decree of the Director General of Customs and Excise No.431 / BC / 2001 which stipulates the imposition of VAT on capital goods and factory equipment that are directly related to PDKB activities originating from other Indonesian Customs Areas (DPIL). The solution to the problem: the imposition of VAT on the purchase of capital goods from other Indonesian Customs Areas (Domestic) in accordance with the provisions of article 2 paragraph (2) PP No. 33 of 1996 stated that "for the delivery of domestic taxable goods to bonded stockpiling sites facilities are given free of charge VAT & PPnBM.

**Keywords:** accounting information system, purchase, import

### PENDAHULUAN

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan pembentukan Kawasan Berikat (KB) adalah peningkatan efisiensi dengan mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu, serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Widowati, 2017) : Pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dari pengeluaran PPN di kawasan berikat yang diutamakan untuk impor adalah untuk mendukung pertahanan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan bangsa, meningkatkan kesehatan masyarakat dan mempertahankan pembangunan nasional. Perusahaan terutama yang bergerak di bidang manufaktur dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu membutuhkan bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku tersebut maka perusahaan harus mendapatkannya dari pihak lain dengan cara melakukan transaksi yang disebut pembelian. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri dan pembelian impor adalah pembelian

dari pemasok luar negeri. Oleh karena itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Liana, 2012) dapat disimpulkan bahwa : Desain Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku perlu untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat membantu bagian gudang untuk merencanakan secara akurat jumlah persediaan bahan baku di dalam gudang, kapan harus memesan bahan baku ke pemasok serta kapan pemasok mengirim bahan baku. Hal ini akan berakibat perusahaan tidak pernah kekurangan bahan baku dan tidak pernah akan menyimpan persediaan bahan baku secara berlebihan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Paulus Hartanto, 2016) : Pengendalian Persediaan bahan baku merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena persediaan merupakan investasi perusahaan yang besar nilai maupun fungsinya. Perusahaan perlu menerapkan perencanaan mengenai pengendalian persediaan yang memperkirakan ketepatan pengiriman dan ketepatan jumlah atau volume bahan baku. Manajemen persediaan yang diterapkan dengan baik akan menghasilkan kinerja produksi yang baik dan tepat waktu.

### Latar Belakang Masalah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Paulus Hartanto, 2016): Peran Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) adalah salah satu lembaga pemerintah

yang memiliki peran sangat penting dalam mendorong perekonomian nasional. Sebagai petugas fiskal dan juga sebagai kontrol terhadap lalu lintas barang baik impor atau ekspor, DJBC mengembangkan tugas & tanggung jawab yang besar. Akan tetapi pada pelaksanaannya, proses impor & ekspor di kawasan berikat masih terdapat beberapa kendala. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ministry, National, Competitiveness, & Haryana, 2017) : Lamanya dwelling time proses pengadaan bahan baku & bahan penolong dari luar negeri (impor) akan menghambat & berdampak pada peningkatan biaya logistik terutama pada biaya pengadaan & penyimpanan bahan baku. Pada akhirnya biaya logistik yang tinggi akan berdampak pada produksi yang tidak efisien & rendahnya daya saing.

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (T. Sihaloho & Muna, 2010): Terdapat beberapa identifikasi masalah yang sering terjadi di kawasan berikat terutama yang berkaitan dengan proses impor bahan baku, diantaranya :

1. Pelayanan perijinan satu atap di kawasan berikat (KB) tidak berjalan sebagaimana mestinya setelah otonomi daerah, hal ini membawa konsekuensi waktu biaya yang makin besar yang harus ditanggung oleh pengusaha di kawasan berikat.
2. Kurangnya pemahaman berbagai pihak terkait akan keberadaan & fungsi KB menyebabkan munculnya intervensi melalui berbagai peraturan daerah yang diterapkan di kawasan berikat.
3. Persetujuan Berusaha di Kawasan Berikat (PDKB) sering diinterpretasikan oleh Kepala Bea Cukai di KB sebagai ijin operasi yang akan menimbulkan ketidakpastian ditambah tidak jelasnya berapa lama surat PDKB tersebut bisa diterbitkan & didapatkan pengusaha. Hal tersebut dapat menghambat program & jadwal yang telah disepakati investor dengan pemasok & Pembeli dari luar negeri yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya kepercayaan kepada investor di kawasan berikat.

### Rumusan Masalah

PT Byung Hwa Indonesia yang dipilih sebagai tempat riset adalah merupakan salah satu perusahaan otomotif Korea di Kawasan Industri Jababeka yang merupakan salah satu kawasan berikat di wilayah Kabupaten Bekasi. Barang-barang impor biasa diadakan oleh PT Byung Hwa Indonesia adalah bahan baku besi dan *sparepart*. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh investor dalam melaksanakan proses impor bahan baku di kawasan berikat maka disusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembelian impor pada PT Byung Hwa Indonesia?

2. Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan saat pelaksanaan pembelian impor pada PT Byung Hwa Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pembelian kredit pada PT Byung Hwa Indonesia?
4. Permasalahan apa saja yang sering dihadapi dalam pelaksanaan sistem akuntansi pembelian kredit pada PT Byung Hwa Indonesia?

### Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut (Mulyadi, 2016) : Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Menurut (Krismiaji, 2015) adalah : Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan interaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.

Demikian pula menurut penelitian yang dilakukan oleh (Juwitasary & Martani, 2015) : Sistem Informasi Akuntansi adalah subsistem dari sistem informasi yang mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi akuntansi dan informasi lain yang berkaitan dengan suatu kejadian bisnis dalam proses rutin transaksi akuntansi.

### Pengertian Impor

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Budiarso, 2016) : Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, secara umum proses impor adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.

### Pengertian Kawasan Berikat

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tumpal Sihaloho & Muna, 2010) : Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya melakukan kegiatan usaha industry pengolahan barang & bahan, kegiatan rancang bangun perkerataasan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir & pengepakan atas barang & bahan asal impor atau barang & bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Adapun kriteria dari Kawasan Berikat :

Tujuan: Manufaktur, Luas Lokasi: 20 ha sd 1.600 ha, Lokasi: dekat dengan pelabuhan & bandara, Jenis Kegiatan: terutama bidang manufaktur, Tujuan Pasar: ekspor, Perlakuan pembelian dari dalam negeri: diperlakukan sebagai pembeli dalam negeri & kena PPN, Otoritas dari Kawasan: umumnya dibawah pemerintahan pusat atau daerah setempat.

Untuk mendukung kelancaran proses impor selanjutnya pemerintah mendirikan Pusat Logistik Berikat (PLB). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Laksono & Kristiantoro, 2017): Pusat Logistik



Berikat (PLB) didesain sebagai penyempurnaan konsep Kawasan Berikat. PLB adalah solusi untuk mengatasi inefisiensi pengelolaan logistic. Ide utama dari kebijakan PLB adalah untuk menempatkan gudang penimbunan ekspor & impor dalam negeri. Dengan demikian, industri dalam negeri tidak perlu selalu mengimpor lagi ketika membutuhkan bahan baku, barang modal dan bahan pendukung

## METODOLOGI PENELITIAN

### Metodologi Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Deskriptif adalah metode yang menurunkan dan menafsirkan data yang ada. Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam menunjang tercapainya tujuan penelitian ini, penulis memerlukan data-data yang relevan yang bersumber dari:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)  
Penulis memperoleh data dengan mengumpulkan dan membaca berbagai buku referensi serta sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan sistem akuntansi pembelian impor.
2. Studi Lapangan (*Field Research*)  
Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada perusahaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan mengamati aktivitas dan kegiatan yang dilakukan, yang berhubungan dengan objek penelitian yang dibahas dalam penelitian sehingga memperoleh data yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a. Pengamatan  
Penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu pada PT. Byung Hwa Indonesia dengan mengamati sistem akuntansi pembelian impor pada PT Byung Hwa Indonesia.
  - b. Wawancara  
Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan antara lain dengan bagian Exim, Pembelian dan Akunting.
  - c. Studi Dokumentasi  
Melakukan pengambilan data-data dengan mendokumentasikan bukti-bukti ataupun data-data yang terkait dan berhubungan dengan sistem akuntansi pembelian impor.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di PT Byung Hwa Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka 1, Jalan Jababeka VI Blok J/4-A Harjamekar Cikarang Utara, Bekasi, 17530, Indonesia. Phone: (021) 893-5001 Fax: (021) 893-5003
2. Waktu Penelitian  
Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2018 sampai dengan September 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pihak-pihak yang terkait dengan Sistem Akuntansi Pembelian Impor pada PT Byung Hwa Indonesia

Dalam pelaksanaan pembelian impor terdapat beberapa pihak-pihak terkait untuk mendukung proses pembelian impor, antara lain:

- a. Departemen Gudang  
Jika terdapat barang habis, maka pihak gudang segera membuat surat permintaan bahan baku dengan menggunakan dokumen *Advance for stationery* dan diberikan kepada departemen *purchasing*
- b. Departemen *Purchasing*  
*Purchasing* menginformasikan rencana pembelian dengan mengirimkan *purchase order* melalui *e-mail* kepada pemasok dan selanjutnya melakukan negoisasi agar terjadi kesepakatan. Setelah terjadi kesepakatan, *purchasing* menerima kelengkapan dokumen impor yang telah disiapkan oleh pemasok luar negeri seperti *invoice*, *packing list* dan *bill of lading*.
- c. Departemen Exim  
Pada departemen ini, Exim menerima dan mengecek kelengkapan dokumen impor dari pemasok luar negeri dan dokumen *purchase order* dari *purchasing*. Departemen exim menerima informasi jadwal kedatangan barang impor dari agen pengiriman (*forwarder*). Kemudian *staff* exim membuat dokumen pemberitahuan impor untuk *customs clearance* dan berkoordinasi dengan *forwarder* untuk memastikan barang impor bisa terkirim.
- d. Departemen Akunting  
Akunting bertugas untuk mengecek *invoice* yang sudah jatuh tempo atau mendekati jatuh tempo agar dapat didahulukan pembayarannya. Apabila sudah dilakukan pembayaran, akunting memasukan transaksi ke jurnal sistem. Pembayaran dilakukan dengan sistem transfer bank.

### 2. Dokumen-dokumen yang digunakan saat Pelaksanaan Pembelian Impor pada PT Byung Hwa Indonesia

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan saat pelaksanaan pembelian impor antara lain:

- a. *Advance For Stationary* (AFS)

Dokumen ini dibuat oleh departemen gudang yang berisi rincian barang yang dipesan termasuk nama produk dan jumlah barang yang dipesan.

- b. *Purchase Order* (PO)  
*Purchase order* adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli (*purchasing*) yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Dokumen ini berisi rincian barang yang akan dibeli oleh pihak *purchasing* termasuk nama produk, jumlah barang yang dibeli, dan harga yang dicantumkan oleh *purchasing*.
- c. *Invoice*  
Dokumen ini dibuat oleh *supplier* luar negeri yang digunakan sebagai suatu bukti pembelian dengan mencantumkan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli. Karena pembelian impor, maka *invoice* dikirimkan melalui *e-mail* dan kemudian *invoice* tersebut didistribusikan ke pihak-pihak terkait.
- d. *Packing List*  
Dokumen ini dibuat oleh *supplier* luar negeri yang berisi rincian barang yang akan dikirim seperti nama, kode dan jumlah barang, berat bersih, berat kotor, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal. Nomor dan tanggal yang digunakan sesuai dengan data *invoice*.
- e. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB)  
Dokumen ini diterbitkan oleh pihak pelayaran yang diberikan kepada pemasok luar negeri dan kemudian diberikan kepada *purchasing* PT Byung Hwa Indonesia. *Bill of lading* atau biasa disebut dengan B/L adalah dokumen pengangkutan barang melalui jalur laut dan *Airway bill* / AWB adalah dokumen pengangkutan barang melalui jalur udara. Dokumen ini memuat informasi lengkap *Shipper*, *Consignee*, nama dan bendera kapal, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, data muatan, nomor B/L dan tanggal dikeluarkannya barang yang ditentukan oleh pihak pelayaran.
- f. Pemberitahuan Impor Barang BC 2.3  
Dokumen ini dibuat oleh pihak exim dengan menggunakan sistem ceisa TPB. Sistem ceisa (*Customs Excise Information System and Automation*) TPB merupakan aplikasi penyampaian dokumen secara elektronik yang mengintegrasikan semua jenis dokumen perijinan Kawasan Berikat dalam satu aplikasi. Dokumen BC 2.3 digunakan untuk pengurusan dokumen impor yang memuat informasi tentang nama pemasok, importir, PPJK, sarana pengangkut, data dokumen (*invoice*, *packing list* dan *bill of lading/airway bill*), nomor pendaftaran dan tanggal bc 2.3, perhitungan pajak dalam rangka impor, dan data barang impor.
- g. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)  
Dokumen ini didapat dari respon ceisa TPB. Saat pembuatan dokumen BC 2.3, apabila data sudah sesuai dengan dokumen pelengkap impor, maka

dokumen BC 2.3 dikirim dan akan mendapat respon berupa SPPB.

### 3. Pelaksanaan Sistem Informasi Pembelian Bahan Baku Impor Pada PT Byung Hwa Indonesia

#### a. Jaringan Prosedur

- 1) Prosedur Permintaan Barang Impor  
Dlam prosedur ini, departemen gudang atau departemen yang bersangkutan mengajukan permintaan pembelian dalam surat permintaan barang dengan menggunakan dokumen *Advance for stationery* kepada departemen *purchasing*.
- 2) Prosedur Pemesanan Barang  
Dalam prosedur ini, departemen *purchasing* mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada *supplier* luar negeri untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan *supplier* barang yang diperlukan perusahaan.
- 3) Prosedur Penerimaan Barang  
Departemen exim menerima barang yang telah dikirim oleh *supplier* luar negeri melalui jasa *forwarder*. Setelah itu, barang impor tersebut diberikan ke gudang untuk segera di cek oleh departemen gudang.
- 4) Prosedur Pencatatan Hutang  
Departemen akunting akan menjurnal setiap pembelian yang terjadi di sistem perusahaan. Setiap hutang yang terjadi dalam perusahaan hendaknya dicatat sesuai dengan faktur atau dokumen sejenisnya sebagai tanda bukti adanya pembayaran yang tertunda. Berikut merupakan pencatatan transaksi pembelian pada PT Byung Hwa Indonesia.

	A	B	C	D	E	F
	<b>PT Byung Hwa Indonesia</b>					
	General Journal					
	Date	Transaction Number	Transaction Description Account Description	Debet (USD)	Credit (USD)	
0	17-Jan-18	BH180117-1	Impor Byung Hwa Precesion Korea			
1	17-Jan-18	BH180117-1	Pembelian BB	58.379,90		
2	17-Jan-18	BH180117-1	Hutang Dagang			58.379,90
8	13-Feb-18	BH180213-1	Impor Byung Hwa Precesion Korea			
9	13-Feb-18	BH180213-1	Pembelian BB	32.679,35		
0	13-Feb-18	BH180213-1	Hutang Dagang			32.679,35
5	07-Mar-18	BH180307-1	Impor Byung Hwa Precesion Korea			
6	07-Mar-18	BH180307-1	Pembelian BB	36.738,08		
7	07-Mar-18	BH180307-1	Hutang Dagang			36.738,08
18			<b>Sub Total</b>	<b>127.797,33</b>		<b>127.797,33</b>

Sumber : Data Akuntansi PT Byung Hwa Indonesia

Gambar 1 Jurnal Transaksi Pembelian Impor

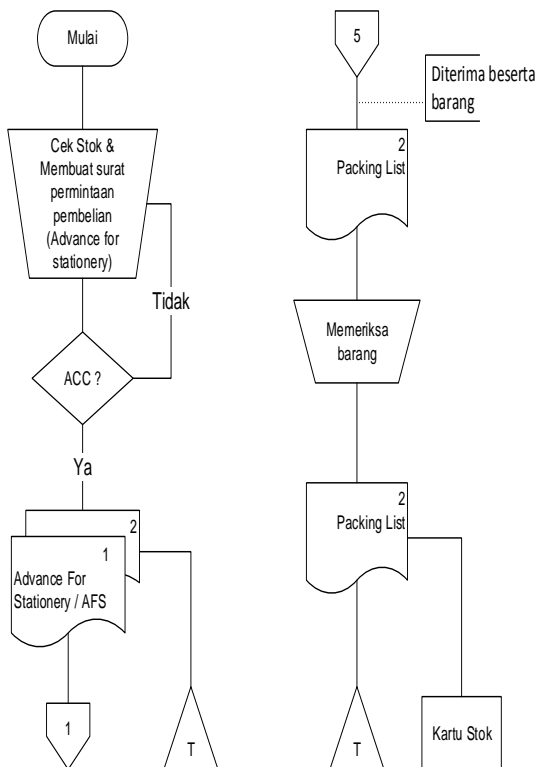
5) Prosedur Pembayaran Hutang

Setelah data diinput kedalam sistem, departemen akunting akan melakukan pembayaran melalui sistem transfer ke *supplier* luar negeri. Berikut merupakan pencatatan akuntansi pada saat pelunasan hutang.

A	B	C	D	E	F
<b>PT Byung Hwa Indonesia</b>					
Date	Transaction Number	Transaction Description Account Description	Debet (USD)	Credit (USD)	
10-Feb-18	BH180117-1	Hutang Byung Hwa Precesion Korea	58.379,90		
		Bank		58.379,90	
10-Mar-18	BH180213-1	Hutang Byung Hwa Precesion Korea	32.679,35		
		Bank		32.679,35	
10-Apr-18	BH180307-1	Hutang Byung Hwa Precesion Korea	36.738,08		
		Bank		36.738,08	

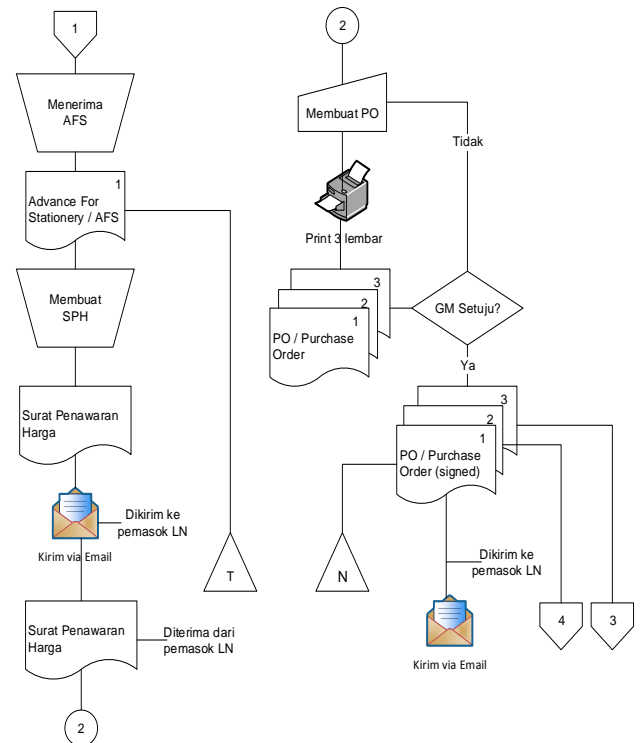
Sumber : Data Akuntansi PT Byung Hwa Indonesia  
Gambar 2 Jurnal Transaksi Pelunasan Pembelian Impor

**b. Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Departemen Gudang**



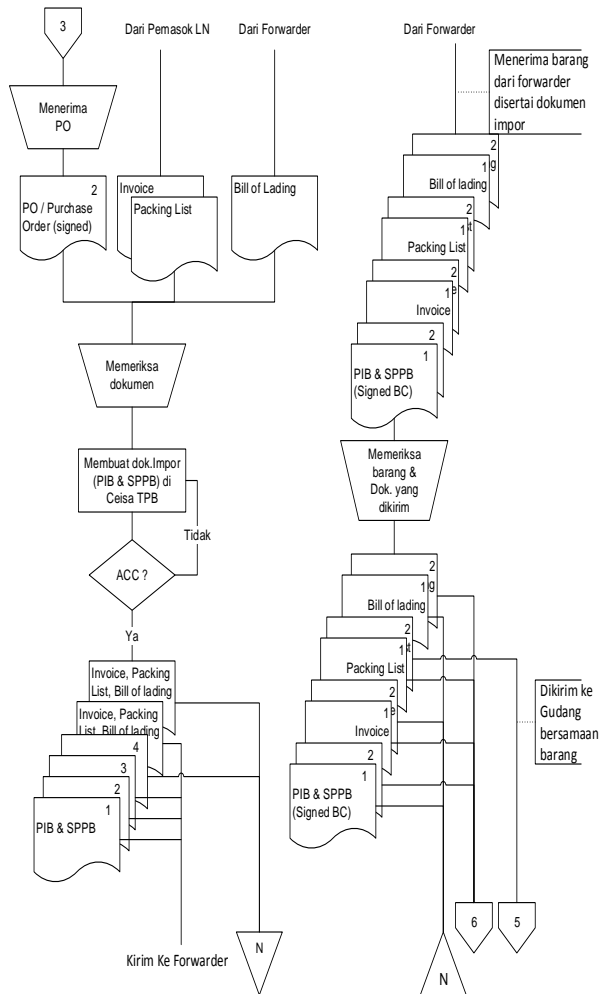
Sumber : Data Diolah  
Gambar 3 Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Dept. Gudang

**c. Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Departemen Purchasing**



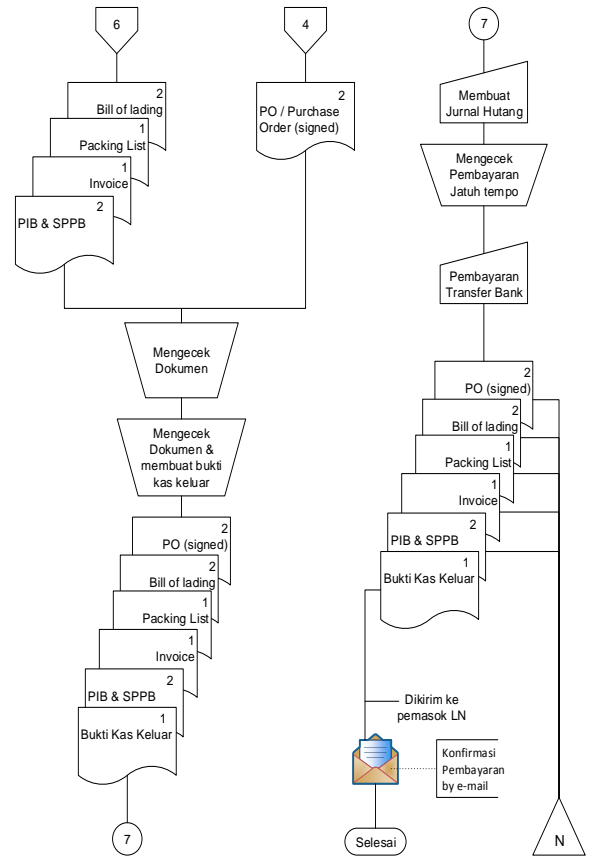
Sumber : Data Diolah  
Gambar 4 Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Dept. Purchasing

**d. Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Departemen Exim**



Sumber : Data Diolah  
Gambar 5 Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Dept. Akunting

**e. Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Departemen Akunting**



Sumber : Data Diolah  
Gambar 6 Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Dept. Akunting

**f. Penjelasan Flowchart**

Adapun penjelasan flowchart sebagai berikut:

- 1) Dimulai pada departemen gudang dengan mengecek stok persediaan bahan baku digudang. Jika barang hampir habis, segera membuat surat permintaan pembelian dengan menggunakan dokumen *Advance For Stationery* (AFS) yang dibuat sebanyak 2 lembar. Untuk lembar yang pertama diberikan ke departemen *purchasing* dan lembar yang kedua diarsipkan oleh departemen gudang sebagai dokumentasi berdasarkan tanggal dokumen dibuat. Permintaan bahan baku harus disepakati dan disetujui oleh *Asst. Manajer Gudang*.
- 2) Departemen *purchasing* menerima dokumen AFS dari departemen gudang yang kemudian membuat surat penawaran harga yang dikirimkan ke *supplier* luar negeri melalui *e-mail* selanjutnya departemen *purchasing* menerima konfirmasi dari *supplier* luar negeri mengenai surat penawaran harga. Setelah itu, membuat dan mengajukan *purchase order* (PO) ke *General Manajer* (GM). Apabila PO disetujui maka GM menandatangani dokumen tersebut. Dan apabila ditolak maka PO tersebut dikembalikan ke *purchasing* untuk diperbaiki. PO dibuat sebanyak 3 lembar. Untuk lembar pertama di-*scan* dan dikirimkan ke *supplier* luar negeri melalui *e-mail* yang

kemudian akan diarsipkan oleh *purchasing* berdasarkan nomor dokumen PO. Lembar kedua PO tersebut diberikan kepada departemen akunting dan lembar ketiga diberikan kepada departemen exim.

- 3) Exim menerima PO yang sudah ditandatangani oleh GM dari *purchasing*. Selain itu, exim menerima *invoice*, *packing list* dari *supplier* luar negeri dan menerima *bill of lading* dari *forwarder*. Dokumen-dokumen tersebut diperiksa dan disesuaikan. Apabila sudah sesuai, departemen exim membuat dokumen pemberitahuan impor barang (PIB BC 2.3) dan SPPB untuk proses *customs clearance*. PIB dan SPPB dibuat sebanyak 4 lembar. Untuk lembar 1-3 diberikan ke *forwarder* dan untuk yang lembar ke-empat diarsipkan berdasarkan nomor dokumen. Setelah proses *custom clearance* selesai, *forwarder* mengirimkan dokumen beserta barang impor ke PT Byung Hwa Indonesia. Exim memeriksa dokumen impor dan mendistribusikan dokumen dan barang ke pihak-pihak terkait.
- 4) Gudang menerima *packing list* dan barang impor. Barang dan dokumen diperiksa apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian barang disimpan di gudang bahan baku dan dokumen di input dalam kartu stok dan diarsipkan berdasarkan nomor dokumen.
- 5) Pihak akunting menerima dokumen PO lembar kedua dari *purchasing* dan menerima *invoice*, *packing list*, *bill of lading*, PIB BC 2.3 dan SPPB dari exim. Dokumen-dokumen tersebut diperiksa dan jika sudah sesuai maka akunting membuat bukti kas keluar yang kemudian membuat jurnal hutang. Setelah itu mengecek pembayaran yang sudah jatuh tempo. Manajer akunting melakukan transfer untuk pembayaran hutang melalui Bank. Setelah melakukan pembayaran, akunting melakukan konfirmasi kepada *supplier* luar negeri melalui *e-mail* dan dokumen-dokumen tersebut diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor dokumen.

##### **5. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan sistem akuntansi pembelian kredit pada PT Byung Hwa Indonesia**

- a. Dikeluarkannya SK Dirjen Bea dan Cukai No.431/BC/2001 yang menetapkan adanya pengenaan PPN atas barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan PDKB yang berasal dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL).  
Pemecahan masalahnya: pengenaan PPN atas pembelian barang modal asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (Dalam Negeri) sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) PP No 33 tahun 1996 dinyatakan bahwa "atas penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN & PPnBM.

- b. Sesuai keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 176/P/2000 pasal 2 menyebutkan jasa perawatan mesin, peralatan & sparepart tergolong jenis jasa yang dikenakan PPN. Hal ini tentu saja dirasa memberatkan investor karena hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan pesanan dengan spesifikasi dan merek yang sudah ditentukan oleh buyer.

Pemecahan masalahnya: pengenaan PPN atas pembelian barang modal asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (Dalam Negeri) sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) PP No 33 tahun 1996 dinyatakan bahwa "atas penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN & PPnBM termasuk didalamnya untuk jasa perawatan mesin (sparepart) dan jasa maklon.

- c. Sering terjadi perbedaan persepsi antara investor (PDKB) dengan petugas Bea & Cukai mengenai pengertian barang modal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan proses produksi. Hal ini pada akhirnya sangat merugikan investor karena dapat menimbulkan "moral hazard" dan investor harus membayar bea masuk dan pajak-pajak lainnya atas impor barang modal yang langsung berkaitan dengan proses produksi di dalam kawasan berikat.

Pemecahan masalahnya: sesuai keputusan Menteri Keuangan No 291/KMK.051997 pasal 14 ayat (b) dinyatakan bahwa atas impor barang modal atau peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM & PPh pasal 22 impor.

- d. Untuk masalah infrastruktur di kawasan berikat juga masih perlu diperhatikan karena infrastruktur jalan darat di kawasan berikat umumnya rusak dan macet. Kemacetan terutama terjadi diakses menuju Dry Port station (stasiun peti kemas) dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Pemecahan masalahnya: kawasan berikat berdasarkan PP No 26/2008 umumnya berada di lokasi Pusat Kajian Nasional (PKN) dan sesuai dengan kriteria pertama dari PKN yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.

##### **KESIMPULAN**

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan pembentukan Kawasan Berikat (KB) adalah peningkatan efisiensi dengan mendekati persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu, serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global.

Perusahaan terutama yang bergerak di bidang manufaktur dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu membutuhkan bahan baku. Untuk mendapatkan

bahan baku tersebut maka perusahaan harus mendapatkannya dari pihak lain dengan cara melakukan transaksi yang disebut pembelian. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua yaitu pembelian lokal dan pembelian impor.

Dikeluarkannya SK Dirjen Bea dan Cukai No.431/BC/2001 yang menetapkan adanya pengenaan PPN atas barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan PDKB yang berasal dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL).

Pemecahan masalahnya: pengenaan PPN atas pembelian barang modal asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (Dalam Negeri) sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) PP No 33 tahun 1996 dinyatakan bahwa "atas penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN & PPnBM

## REFERENSI

- Budiarso. (2016). ANALISIS PEMUNGUTAN dan PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 22 atas KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR PELAYANAN dan PENGAWASAN BEA dan CUKAI KOTA MANADO. *Jurnal EMBA*, 4, 753–762.
- Juwitasary, H., & Martani, M. (2015). ANALISA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN dan PERSEDIAAN PT. XYZ. *Jurnal Comtech*, 6(1), 96–108.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (4th ed.). Yogyakarta: Unit Penerbit & Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Laksono, J., & Kristiantoro, H. (2017). PENENTUAN PRIORITAS PEMILIHAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT BERDASAR ASPEK SUSTANABILITY. *Jurnal BPPK*, 10(1), 51–61.
- Liana, L. (2012). DESAIN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI BIAYA PERSEDIAAN PADA SISTEM MANUFAKTUR. *Dinamika Teknik*, VI(1), 1–13.
- Ministry, A. H., National, P., Competitiveness, I., & Haryana, A. (2017). Peran Pusat Logistik Berikat ( PLB ) Dalam Menurunkan Dwelling Time di Pelabuhan Indonesia. *Cendekia Niaga*, 1(January), 1–10.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Paulus Hartanto, A. (2016). SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) DI CV. ISTANA PITA SEMARANG. *KOMPAK*, 9(1), 1–8. Retrieved from <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/180/172>

Sihaloho, T., & Muna, N. (2010). Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 4(1), 75–101.

Sihaloho, T., & Muna, N. (2010). Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. *Litbang Perdagangan*, 4(1), 75–101.

Widowati, R. B. (2017). ENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS EKSPOR / IMPOR BARANG KENA PAJAK ( Studi Kasus PT Astra Honda Motor yang Melakukan Impor Kendaraan Toyota Dari Jepang ). *Jurnal Reportorium*, IV(2), 87–94.

Widyastuti, I., & Sahara, A. (2018). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Impor Pada Kawasan Berikat. *Moneter*, 5(2), 177–184.

## PROFIL PENULIS

Penulis lahir pada 19 Nopember 1974 di Jember, mendapat gelar Sarjana Ekonomi (prodi Akuntansi) dari STIE Malangkeucewara lulus 1997 dan Magister Akuntansi (prodi Keuangan & Perbankan) dari Universitas Trisakti lulus tahun 2011. Saat ini menjadi salah satu dosen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas BSI Jakarta dan memiliki Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli. Tulisan ilmiah yang pernah dibuat salah satunya berhasil mendapatkan Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) dari Kopertis Wilayah III Jakarta tahun 2016 dengan judul penelitian Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK)

## **Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta**

**Seno Sudarmono Hadi<sup>1</sup>, Restiyana Dyah Ayu Saputri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>AMIK BSI Jakarta  
e-mail: seno.ssh@bsi.ac.id

<sup>2</sup>AMK BSI Jakarta  
e-mail: restyanadiah@gmail.com

---

**Cara Sitasi:** Seno Sudarmono Hadi, R. D. A. S. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *Moneter*, 5(2), 185–194.

---

**Abstract** - *Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta is an organization that performs its duties as a regional revenue manager in the collection of taxes and user charges in DKI Jakarta. Motor Vehicle Tax is a Regional Tax that contributes considerably in order to increase local original income. The purpose in this study is the analysis of the contribution of motor vehicle tax to the original revenue area at the DKI Jakarta Regional Tax and Retribution Agency. Data collection methods used are documentation studies, observation and interviews. The method of data analysis is a qualitative analysis, ie an analysis that is not based on statistical calculations that are quantitative (sum) and presented systematically. The result of the research shows that the percentage fluctuation of PKB contribution to PAD from year to year. PKB contribution to PAD in fiscal year 2012 amounted to 18.63% decreased in fiscal year 2013 by 1.48 points (17.15%). Then in fiscal year 2014 the contribution of PKB to PAD decreased again by 1.23 points (15.92%). However, in two years PKB's contribution to PAD has increased, in fiscal year 2015 the contribution of PKB to PAD has increased by 2.13 points (18.05%) and budget year 2016 PKB contribution to PAD has increased by 0.81 points (18, 86%).*

**Keywords:** *Motor Vehicle Tax, Local Tax, Local Original Income, Vehicle Tax Contributions*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan di DKI Jakarta berasal dari Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana bagi pemerintah DKI Jakarta dalam melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat dalam segala bidang. Sumber Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil atau Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah sebagai hukum publik yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah diatur dalam Undang – Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Salah satu Pajak

Daerah yang diatur dalam Undang – Undang tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD). Penggunaan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat dan menambah keuntungan bagi Pemerintah Daerah dalam penerimaan Pajak. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, maka perlu adanya pembanding yaitu dengan membandingkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin tinggi kualitas otonominya. Namun sebaliknya jika semakin sedikit Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka, semakin rendah kualitas otonominya.

Berdasarkan pengertian Undang - Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Samudra (2016:92-93) disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat – alat berat dan

alat – alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum.

Selain pengertian Pajak Kendaraan Bermotor sendiri, ada beberapa istilah teknis penting lainnya yang telah diatur pengertiannya dalam Undang – Undang dan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beberapa pengertian teknis itu adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) samapi dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).
3. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.
5. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
6. Tenaga kuda/horse power adalah ukuran daya kemampuan mesin.
7. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan.
8. Nilai jual adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
9. Pening Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat pening PKB adalah tanda lunas pajak kendaraan bermotor.
10. Tanda Pelunasan atau Pengesahan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TPPKB, adalah bukti pelunasan pembayaran pajak dan pengesahan kendaraan bermotor.
11. Pemilikan adalah hubungan hukum antara orang atau badan dengan kendaraan bermotor yang tercantum dalam Buku Kepmilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
12. Jalan umum adalah sarana jalan yang dibangun dan pemeliharaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang

dimaksud Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) samapi dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka (2) adalah:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata – mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga – lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata – mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Menurut Samudra (2016:93-94) Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor tersebut.
3. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan menguasai mengandung arti penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu karena perjanjian sewa yang termasuk leasing. Kewajiban pembayaran.
4. Pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya dan apabila Wajib Pajaknya berupa badan maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.

Menurut Samudra (2016:94-96) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu:

1. Nilai Jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot adalah daya berat/angkut kendaraan bermotor yang diukur berdasarkan jumlah tonase/isi silinder



dari kendaraan bermotor tersebut. Bobot ini dinyatakan sebagai koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
2. Koefisien lebih dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Adapun nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata – rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Dalam harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jualnya dapat ditentukan sebagian atau seluruh berdasarkan faktor – faktor sebagai berikut:

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor sama
4. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
5. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
6. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

Bobot kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor – faktor sebagai berikut:

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
3. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri – ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin dua tak atau empat tak, dan isi silinder.

Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam bentuk tabel perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Dan perhitungan pajak kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahun.

Berikut adalah contoh Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Tabel .1**  
**Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) DKI Jakarta (Beberapa Contoh)**

No.	Merk	Tipe	Tahun Buat	DP-PKB
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Jenis Mobil Penumpang Sedan</b>			
1	AUDI	A4 1.8 AT	2010	Rp 323.000.000
2			2011	Rp 371.000.000
3			2012	Rp 409.000.000
4			2013	Rp 455.000.000
5			2014	Rp 518.000.000
<b>B</b>	<b>Jenis Mobil Penumpang Jeep</b>			
1	AUDI	Q5 2.0 TFSI AT	2010	Rp 450.000.000
2			2011	Rp 600.000.000
3			2012	Rp 721.000.000
4			2013	Rp 805.000.000
<b>C</b>	<b>Jenis Mobil Penumpang Minibus</b>			
1	BMW	X1 SDRIVE181 AT	2010	Rp 310.000.000
2			2011	Rp 320.000.000
3			2012	Rp 350.000.000
4			2013	Rp 400.000.000
5			2014	Rp 450.000.000
<b>D</b>	<b>Jenis Mobil Barang/Beban Pik Up</b>			
1	Daihatsu	S401RP-PMREJ HA	2010	Rp 62.400.000
2			2011	Rp 70.200.000
3			2012	Rp 74.100.000
4			2013	Rp 78.000.000
5			2014	Rp 84.500.000

Sumber: Pergub DKI Jakarta No. 210 Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, maka tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi dan badan ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel .2**  
**Tarif Kepemilikan Kendaraan Bermotor Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

No.	Kepemilikan Kendaraan	Tarif Pajak berdasarkan DP-PKB
1	2	3
<b>A</b>	<b>Kepemilikan Orang Pribadi</b>	
1	Kepemilikan Pertama	2,00% X DP-PKB
<b>No.</b>	<b>Kepemilikan Kendaraan</b>	<b>Tarif Pajak berdasarkan DP-PKB</b>
2	Kepemilikan Kedua	2,50% X DP-PKB
3	Kepemilikan Ketiga	3,00% X DP-PKB
4	Kepemilikan Keempat	3,50% X DP-PKB
5	Kepemilikan Kelima	4,00% X DP-PKB
6	Kepemilikan Keenam	4,50% X DP-PKB
7	Kepemilikan Ketujuh	5,00% X DP-PKB
8	Kepemilikan Kedelapan	5,50% X DP-PKB
9	Kepemilikan Kesembilan	6,60 X DP-PKB
10	Kepemilikan Kesepuluh	6,50% X DP-PKB
11	Kepemilikan Kesebelas	7,00% X DP-PKB
12	Kepemilikan Keduabelas	7,50% X DP-PKB
13	Kepemilikan Ketigabelas	8,00% X DP-PKB

14	Kepemilikan Keempatbelas	8,50% X DP-PKB
15	Kepemilikan Kelimabelas	9,00% X DP-PKB
16	Kepemilikan Keenambelas	9,50% X DP-PKB
17	Kepemilikan Tujuhbelas	10,00% X DP-PKB
<b>B</b>	<b>Badan</b>	<b>2,00% X DP-PKB</b>
1	TNI/POLRI, Pemerintah Psat dan pemerintah daerah	0,50% X DP-PKB
2	Angkutan umum, ambulan, mobil Jenazah, dan Pemadan kebakaran	0,50% X DP-PKB
3	Soal keagamaan, Lembaga sosial dan Keagamaan	0,50% X DP-PKB
4	Alat berat dan alat-alat besar	0,20% X DP-PKB

Sumber: Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2015 Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor bahwa besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10).

Menurut Samudra (2015:97) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut – turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum diakui. Ketentuan lebih lanjut mengenai restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pajak Kendaraan Bermotor terutang pada saat kendaraan bermotor tersebut dimiliki atau dokumen lain yang dipersamakan.

Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Di dalam SPTPD tersebut memuat keterangan sebagai berikut:

1. Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat lengkap serta kode wilayah pemilik kendaraan bermotor
2. Tanggal kendaraan bermotor dimiliki
3. Jenis, Merk/type, isi silinder, tenaga kuda (horse power), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin
4. Gandengan dan jumlah sumbu

SPTPD tersebut disampaikan dalam waktu 14 hari semenjak saat kepemilikan atau tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan baru, dan 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah. Apabila terjadi perubahan terhadap kendaraan bermotor yang

dimiliki, maka perubahan tersebut harus dilaporkan dengan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu empat belas hari sejak selesainya perubahan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data – data yang diperlukan untuk bahan penulisan Tugas Akhir ini, sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi  
Penulis mengumpulkan data dan mencari bahan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, baik berupa sumber tertulis maupun karya – karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Observasi  
Penulis melakukan pengamatan langsung tentang target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah dari Tahun 2012 – 2016.
3. Wawancara  
Penulis mengadakan wawancara dengan pejabat yang relevan dalam pengelolaan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan pejabat yang relevan terkait dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta diperoleh data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2012 – 2016 serta upaya, kendala dan solusi yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam penerimaan PKB dan PAD, sebagai berikut:

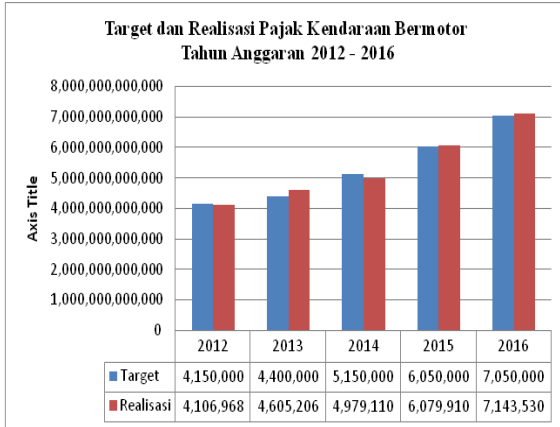
1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016

**Tabel .3**  
**Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)BPRD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi PKB (Rp)
1	2012	4.150.000.000.000	4.106.968.370.530
2	2013	4.400.000.000.000	4.605.206.082.027
3	2014	5.150.000.000.000	4.979.110.607.650
4	2015	6.050.000.000.000	6.079.910.054.399
5	2016	7.050.000.000.000	7.143.530.355.999

Sumber: BPRD DKI Jakarta

Dari Tabel 3, maka target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2012 – 2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan

**Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2012 - 2016**

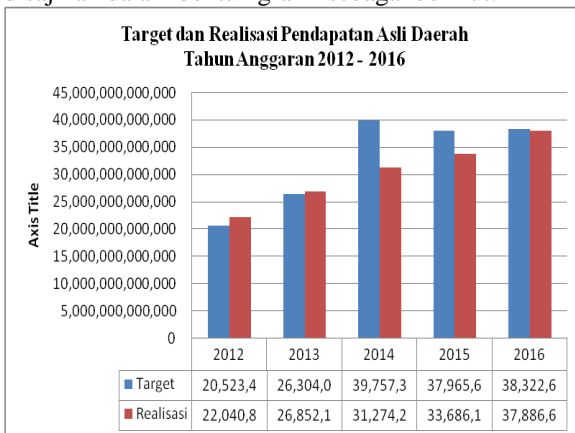
## 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Di DKI Jakarta tahun anggaran 2012 – 2016

Tabel 4

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPRD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

No	Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
1	2012	20.523.433.000.000	22.040.801.447.924
2	2013	26.304.098.000.000	26.852.192.452.636
3	2014	39.757.308.000.000	31.274.215.885.720
4	2015	37.965.616.000.000	33.686.176.815.708
5	2016	38.322.614.000.000	37.886.623.633.394

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta  
Dari Tabel 4, maka target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2012 – 2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan

**Gambar 2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 - 2016**

## 3. Upaya, Kendala Dan Solusi yang dilakukan

### BPRD DKI Jakarta

#### A. Upaya yang dilakukan BPRD adalah:

- 1) Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
- 2) Melakukan penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan terbaru
- 4) Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka. meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- 5) Meningkatkan kerja sama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

#### B. Kendala yang dihadapi oleh BPRD adalah:

- 1) Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak  
Dalam melakukan pemenuhan membayar pajak terkadang Wajib Pajak sangat sulit untuk melakukannya. Wajib Pajak sering tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, belum daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan. Penyebab terjadinya kurangnya kepatuhan ini karena jarak yang terlalu jauh dalam pembayaran pajak sehingga membuat Wajib Pajak malas untuk melakukan pembayaran. Atau karena sanksi administrasi yang ditetapkan tidak terlalu besar membuat Wajib Pajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pembayaran pajak.
- 2) Penghindaran tarif pajak progresif  
Tarif pajak progresif ditetapkan untuk setiap Wajib Pajak pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Penghindaran tarif progresif hampir dialami oleh semua SAMSAT. Dikarenakan Wajib Pajak apabila membeli kendaraan yang bukan baru jarang mengganti nama dan juga terkadang Wajib Pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu, sering tidak menggunakan namanya. Akan tetapi menggunakan nama anak atau istrinya sehingga itu membuat kesulitan SAMSAT dalam melakukan pengenaan pajak progresif.
- 3) Kendaraan yang mutasi keluar daerah  
Hambatan – hambatan yang menjadi tidak tercapainya suatu target PKB adalah kendaraan yang mutasi keluar daerah. Kendaraan yang mutasi keluar daerah lebih banyak dari pada kendaraan yang masuk daerah. Maksudnya banyak kendaraan yang sebelumnya berada di wilayah Jakarta kemudian keluar dari daerah Jakarta dan masuknya kendaraan ke daerah tidak sebesar kendaraan yang keluar daerah. Hal ini disebabkan karena tarif pajak di Jakarta cenderung lebih besar dibandingkan di luar daerah. Dengan begitu penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terjadi potential loss.

4) Terjadinya fluktuasi (naik turun) realisasi penerimaan PKB maupun PAD sehingga mempengaruhi pencapaian target.

**C. Solusi atas kendala yang terjadi adalah:**

- 1) Meningkatkan sistem pelayanan yang dibuat oleh BPRD seperti pembayaran pajak melalui bank (multikanal), penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Pemberian Surat Panggilan terhadap Wajib Pajak yang telat membayar atau menghindari untuk membayar pajak. Pertama kali akan diberikan surat pemberitahuan kemudian surat panggilan. Lalu apabila surat panggilan tersebut tidak ditanggapi maka diberikan surat teguran. Apabila Wajib Pajak tetap tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak maka akan dikenakan denda kepada Wajib Pajak tersebut.
- 3) Melakukan penagihan pajak terhadap kendaraan bermotor yang masih menunggak atau belum melakukan daftar ulang, khususnya kendaraan – kendaraan bermotor yang memiliki potensi pajak yang besar.
- 4) Pemberian keringanan denda terhadap Wajib Pajak yang menunggak dan serta penghapusan sanksi administrasi.
- 5) Dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan maka akan dilakukan evaluasi terhadap target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target yang realistis, serta memperluas basis penerimaan.
- 6) Pemberian informasi melalui media baik media cetak dan elektronik, para wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi – informasi yang berkaitan dengan pajak dan bisa mengugah kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya.

**4. Hasil Analisa**

**A. Analisa Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2012 – 2016**

Untuk melakukan analisa Pencapaian Target Pajak Kendaraan Bermotor, maka digunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Target PKB} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

**1). Perhitungan capaian target penerimaan PKB tahun 2012**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2012}}{\text{Target PKB 2012}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 4.106.968.370.530}}{\text{Rp 4.150.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 0,9896 \times 100\%$$

$$= 98,96\%$$

**2) Perhitungan capaian target penerimaan PKB tahun 2013**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2013}}{\text{Target PKB 2013}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 4.605.206.082.027}}{\text{Rp 4.400.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 1,0466 \times 100\%$$

$$= 104,66\%$$

Capaian target PKB tahun 2013 = 104,66%

Dengan demikian capaian target PKB tahun 2012 sebesar 104,66%.

**3). Perhitungan capaian target penerimaan PKB tahun 2014**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2014}}{\text{Target PKB 2014}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 4.979.110.607.650}}{\text{Rp 5.150.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 0,9668 \times 100\%$$

$$= 96,68\%$$

Dengan demikian capaian target PKB tahun 2014 sebesar 96,68%

**4) Perhitungan capaian target penerimaan PKB tahun 2015**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2015}}{\text{Target PKB 2015}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 6.079.910.054.399}}{\text{Rp 6.050.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 1,0049 \times 100\%$$

$$= 100,49\%$$

Dengan demikian capaian target PKB tahun 2015 sebesar 100,49%

**5). Perhitungan capaian target penerimaan PKB tahun 2016**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2016}}{\text{Target PKB 2016}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 7.143.530.355.999}}{\text{Rp 7.050.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 1,0132 \times 100\%$$

$$= 101,32\%$$

Dengan demikian capaian target PKB tahun 2016 sebesar 101,32%

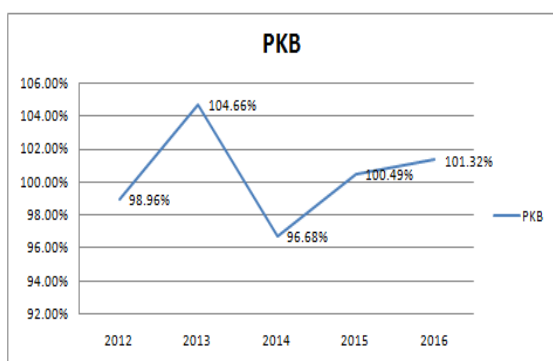
Berdasarkan perhitungan tersebut maka analisa Capaian Target Pajak Kendaraan Bermotor, dapat dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Capaian Target Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

No	Tahun	Capain Target (%)
1	2012	98,96
2	2013	104,66
3	2014	96,68
4	2015	100,49
5	2016	101,32

Sumber: BPRD DKI Jakarta

Dari Tabel III.3, maka analisa capaian target Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2012 – 2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: data Olahan.

**Gambar 3**  
**Capaian Target Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun Anggaran 2012 – 2016**

Berdasarkan gambar 3, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Perbandingan capaian target PKB tahun 2012 – 2013**

Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2012 sebesar (98,96%) sedangkan tahun anggaran 2013 sebesar (104,66%). Artinya tahun anggaran 2013 lebih baik dari pada tahun anggaran 2012 sebesar 5,7 poin (104,66% - 98,96%). Terjadinya peningkatan capaian target PKB disebabkan oleh:

- Tingginya tingkat pendapatan per kapita penduduk menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Sehingga dinamika ini mendorong meningkatnya potensi penerimaan PKB.
- Sarana transportasi umum yang kurang memadai dengan aktivitas yang sangat tinggi di DKI Jakarta membuat para warga DKI Jakarta lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum.

**2. Perbandingan capaian target PKB tahun 2013 – 2014**

Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2013 sebesar (104,66%) sedangkan tahun anggaran 2014 sebesar (96,68%). Artinya tahun anggaran 2013 lebih baik dari pada tahun anggaran 2014 sebesar 7,98 poin (104,66% - 96,68%). Terjadinya penurunan capaian target PKB ini disebabkan oleh:

- Adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor.
- Adanya kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan.

Untuk menangani masalah tersebut hal yang dilakukan adalah:

- Melakukan koordinasi lebih intensif dengan dealer agar memberikan fasilitas kredit kepemilikan kendaraan yang mudah, uang muka yang terjangkau, tingkat bunga yang

rendah, dan angsuran kredit yang tidak terlalu besar.

- Membuat peraturan daerah yang didalamnya menetapkan sanksi apabila Wajib Pajak tidak melakukan daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan.

**3. Perbandingan capaian target PKB tahun 2014 – 2015**

Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2014 sebesar (96,68%) sedangkan tahun anggaran 2015 sebesar (100,49%). Artinya tahun anggaran 2015 lebih baik dari pada tahun anggaran 2014 sebesar 3,81 poin (100,49% - 96,68%). Terjadinya peningkatan capaian target PKB ini disebabkan oleh:

- Tingginya tingkat jumlah kendaraan bermotor dan industri otomotif yang terus melakukan inovasi – inovasi baru dalam bidang teknologi mesin membuat para konsumen ingin memiliki kendaraan baru.
- Fasilitas kredit kepemilikan kendaraan yang mudah, dengan tingkat uang muka yang terjangkau, tingkat bunga yang rendah, dan angsuran kredit yang tidak terlalu besar membuat para pengguna kendaraan bermotor banyak melakukan kredit kendaraan bermotor. Dengan demikian, jumlah subjek pajak kendaraan bermotor akan bertambah dan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkat.

**4. Perbandingan capaian target PKB tahun 2015 – 2016**

Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2015 sebesar (100,49%) sedangkan tahun anggaran 2016 sebesar (101,32%). Artinya tahun anggaran 2016 lebih baik dari pada tahun anggaran 2015 sebesar 0,83 poin (101,32% - 100,49%). Terjadinya peningkatan capaian target PKB ini disebabkan oleh:

- Adanya peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat.
- Adanya kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa meningkatkan penerimaan pajak daerah.

**B. Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

Untuk melakukan analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Asli Daerah, maka digunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PKB terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**1). Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2012**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2012}}{\text{Realisasi PAD 2012}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 4.106.968.370.530}{\text{Rp } 22.040.801.447.924} \times 100\%$$

$$= 0,18633 \times 100\%$$

$$= 18,63\%$$

Dengan demikian kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2012 sebesar 18,63%.

**2). Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2013**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2013}}{\text{Realisasi PAD 2013}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 4.605.206.082.027}{\text{Rp } 26.852.192.452.636} \times 100\%$$

$$= 0,17150 \times 100\%$$

$$= 17,15\%$$

Dengan demikian kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2013 sebesar 17,15%.

**3). Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2014**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2014}}{\text{Realisasi PAD 2014}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 4.979.110.607.650}{\text{Rp } 31.274.215.885.720} \times 100\%$$

$$= 0,15920 \times 100\%$$

$$= 15,92\%$$

Dengan demikian kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2014 sebesar 15,92%.

**4). Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2015**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2015}}{\text{Realisasi PAD 2015}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 6.079.910.054.399}{\text{Rp } 33.686.176.815.708} \times 100\%$$

$$= 0,18048 \times 100\%$$

$$= 18,05 \%$$

Dengan demikian kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2015 sebesar 18,05%.

**5). Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2016**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2016}}{\text{Realisasi PAD 2016}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 7.143.530.355.999}{\text{Rp } 37.886.623.633.394} \times 100\%$$

$$= 0,1886 \times 100\%$$

$$= 18,86 \%$$

Dengan demikian kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2016 sebesar 18,86%

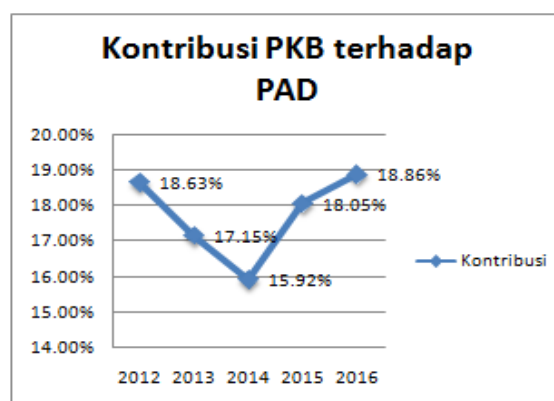
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 - 2016, dapat dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

No	Tahun	Kontribusi (%)
1	2012	18,63
2	2013	17,15
3	2014	15,92
4	2015	18,05
5	2016	18,86

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 6, maka Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 – 2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan

**Gambar 4**  
**Kontribusi PKB terhadap PAD Tahun Anggaran 2012 – 2016**

Berdasarkan gambar III.4, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2012 – 2013

Kontribusi target PKB terhadap PAD tahun anggaran 2012 (18,63%) sedangkan tahun anggaran 2013 (17,15%), artinya tahun anggaran 2012 lebih baik dari pada tahun anggaran 2013 sebesar 1,48 poin (18,63% - 17,15%).

Terjadinya penurunan Kontribusi PKB terhadap PAD disebabkan oleh:

- Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak sering tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, belum daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan.
- Kesulitan dalam menetapkan Dasar Pengenaan Pajak atau DPP apabila ada kendaraan baru yang harganya mahal. Dalam menetapkan DPP diperlukan Nilai Jual Kendaraan Bermotor atau NJKB yang

mempunyai pengaruh secara signifikan dalam penerimaan PKB. Akan tetapi NJKB ditetapkan oleh KEMENDAGRI sehingga membuat penerimaan PKB kurang optimal.

Untuk menangani penurunan tersebut maka dilakukan hal – hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem pelayanan yang dibuat oleh BPRD seperti pembayaran pajak melalui bank (multikanal), penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak.
  - b. BPRD melakukan koordinasi secara rutin dengan KEMENDAGRI terkait dengan NJKB, agar penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi lebih optimal.
2. Perbandingan Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2013 – 2014
- Kontribusi target PKB terhadap PAD tahun anggaran 2013 (17,15%) sedangkan tahun anggaran 2014 (15,92%), artinya tahun anggaran 2013 lebih baik dari pada tahun anggaran 2014 sebesar 1,23 poin (17,15% - 15,92%).
- Terjadinya penurunan Kontribusi PKB terhadap PAD disebabkan oleh:
- a. Kesadaran Wajib Pajak masih kurang karena sanksi administrasi yang ditetapkan tidak terlalu besar membuat Wajib Pajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi dan cenderung menyepelekan pembayaran.
  - b. Kendaraan yang mutasi keluar dari Jakarta lebih banyak dari pada kendaraan yang masuk ke Jakarta. Hal ini disebabkan karena tarif pajak di Jakarta cenderung lebih besardibandingkan di luar daerah.
- Untuk menangani penurunan tersebut maka dilakukan hal – hal sebagai berikut:
- a. Melakukan penagihan pajak terhadap kendaraan bermotor yang masih menunggak atau belum melakukan daftar ulang, khususnya kendaraan – kendaraan bermotor yang memiliki potensi pajak yang besar.
  - b. Mendorong Pemerintah untuk mempersulit persyaratan kendaraan yang akan melakukan mutasi keluar Jakarta.
3. Perbandingan Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2014 – 2015
- Kontribusi target PKB terhadap PAD tahun anggaran 2014 (15,92%) sedangkan tahun anggaran 2015 (18,05%), artinya tahun anggaran 2015 lebih baik dari pada tahun anggaran 2014 sebesar 2,13 poin (15,92% - 18,05%). Terjadinya peningkatan Kontribusi PKB terhadap PAD disebabkan oleh:
- a. Adanya tindakan Intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan BPRD sehingga meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan.

- b. Adanya penyuluhan yang dilakukan oleh BPRD terkait dengan pajak kendaraan maupun pajak lainnya kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

4. Perbandingan Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2015 – 2016

Kontribusi target PKB terhadap PAD tahun anggaran 2015 (18,05%) sedangkan tahun anggaran 2016 (18,86%), artinya tahun anggaran 2016 lebih baik dari pada tahun anggaran 2015 sebesar 0,81 poin (18,05 – 18,86%).

Terjadinya peningkatan Kontribusi PKB terhadap PAD disebabkan oleh:

- a. Adanya peningkatan sistem pelayanan yang dibuat oleh BPRD seperti pembayaran pajak melalui bank (multikanal), penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Adanya pemberian informasi melalui media baik media cetak dan elektronik, para wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi – informasi yang berkaitan dengan pajak dan bisa mengugah kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya.

## KESIMPULAN

Penelitian Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta merupakan penelitian kualitatif, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 31 Mei 2017. Metode pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Berdasarkan hasil analisa data lapangan diperoleh informasi dan kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2012 sebesar 98,96% mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2013 sebesar 5,7 poin (104,66%). Namun pada tahun anggaran 2014 capaian target penerimaan PKB mengalami penurunan sebesar 7,98 poin (96,68%). Pada tahun anggaran 2015 capaian target PKB mengalami kenaikan sebesar 3,81 poin (100,49%). Dan pada tahun anggaran 2016 capaian target penerimaan PKB juga mengalami kenaikan kembali sebesar 0,83 poin (101,32%).
2. Kontribusi PKB terhadap PAD pada tahun anggaran 2012 sebesar 18,63% mengalami penurunan pada tahun anggaran 2013 sebesar 1,48 poin (17,15%). Kemudian pada tahun anggaran 2014 kontribusi PKB terhadap PAD mengalami penurunan kembali sebesar 1,23 poin (15,92%). Namun pada tahun anggaran 2015 kontribusi PKB terhadap PAD mengalami kenaikan sebesar 2,13 poin (18,05%). Dan pada tahun anggaran

2016 kontribusi PKB terhadap PAD juga mengalami kenaikan kembali sebesar 0,81 poin (18,86%).

3. Masalah yang dihadapi dalam peningkatan penerimaan kontribusi PKB terhadap PAD diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan, penghindaran tarif progresif pajak yang dilakukan wajib pajak dan adanya kendaraan yang mutasi keluar daerah yang disebabkan karena tarif pajak di Jakarta cenderung lebih besar dibandingkan di luar daerah.

#### REFERENSI

- Abuyamin, Oyok. 2016. Perpajakan. Bandung: Mega Ranchage Press.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba 4.

Samudra, Azhari Aziz. 2016. Perpajakan Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### PROFIL PENULIS

Lahir Di Sleman Yogyakarta Tanggal 04 Januari 1968, Alumni Strata Satu FE Jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Starata Dua Program Magister Manajemen Universitas Gunadarma Jakarta Dan . Baru Menempuh Program Doktorat (S3) Manajemen Bisnis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila Jakarta (2018).

Sebagai Staff Akademik Atau Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta Sejak Tahun 1999

Mengajar Di Beberapa Perguruan Tinggi Di Jakarta diantaranya Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, AMIK BSI Jakarta Dan STMIK Nusa Mandiri Jakarta.